



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**

**MATRIKS PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2021**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.1 -

MATRIKS PEMBANGUNAN RKP 2021

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT KETAHANAN EKONOMI UNTUK PERTUMBUHAN YANG BERKUALITAS DAN BERKEADILAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan					73.087.725,0	
PP : Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	Kapasitas Terpasang Pembangkit EBT (GW) kumulatif	2	11,80		
		Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta Kilo Liter)	2	10,20		
KP : Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Meningkatnya Akselerasi Pengembangan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas terpasang tambahan pembangkit EBT (MW) P1	2	1.001,10		
ProP : Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Terlaksananya Percepatan Pembangunan Pembangkit Energi Terbarukan	Kapasitas Terpasang Tambahan PLTA (MW)	2	440,3		Kemen ESDM
		Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Panas Bumi (MW)	2	80,00		
		Kapasitas Terpasang Tambahan PLT Bioenergi (MW)	2	152,00		
		Kapasitas Terpasang Tambahan PLTS (MW)	2	328,8		
KP : Peningkatan Pasokan Bahan Bakar Nabati	Meningkatnya Pasokan Bahan Bakar Nabati	Jumlah Pemanfaatan Biofuel untuk Domestik (Juta KL)	2	10,20		
ProP : Akselerasi Pengembangan BBN	Terlaksananya Akselerasi Pengembangan BBN	Persentase Mandatori Pencampuran BBN ke dalam Bahan Bakar Fosil (%)	2	Mandatori B30		Kemen ESDM
KP : Peningkatan Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Meningkatnya Pelaksanaan Konservasi dan Efisiensi Energi	Intensitas Energi Primer (SBM/Rp Miliar)	2	138,00		
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	2	0,90		
ProP : Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	Terlaksananya Perluasan Penerapan Efisiensi Energi	Persentase Penyelesaian Penyusunan Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM) (%)	2	100,00		Kemen ESDM
KP : Peningkatan Pemenuhan Energi Domestik	Meningkatnya Pemenuhan Energi Domestik	Alokasi Batubara untuk Kepentingan Dalam Negeri (DMO) yang Direncanakan (Juta Ton)	2	168,00		
		Persentase Pemanfaatan Gas Bumi Domestik (%)	2	65,00		
ProP : Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri	Terlaksananya Pemenuhan Energi yang Kompetitif	Jumlah Laporan Pemenuhan Energi yang Kompetitif bagi Industri (Laporan)	2	1,00		Kemen ESDM
KP : Pengembangan Industri Pendukung EBT	Meningkatnya Pengembangan Industri Pendukung EBT	TKDN sektor pembangkit EBT (%)	2	44,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.1.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan Industri EBT	Terlaksananya Pengembangan Industri EBT	TKDN Sektor EBT dalam Rangka Mendukung Kemandirian Energi Nasional (Indeks Skala 100)	2	55,45		Kemen ESDM
PP : Peningkatan Kuantitas/Ketahanan Air Untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Produktivitas air (water productivity) (m3/kg)	5	3,30		
KP : Pemantapan Kawasan Berfungsi Lindung (kumulatif)	Meningkatnya pemantapan kawasan berfungsi lindung (kumulatif)	Luas Minimal Kawasan berfungsi Lindung (kumulatif) (Juta ha)	5	65,00		
ProP : Inventarisasi Jasa Lingkungan Tinggi	Terlaksananya inventarisasi jasa lingkungan tinggi	Luas area dengan Indeks Jasa Lingkungan Tinggi (Ekoregion)	5	7,00		Kemen LHK
ProP : Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Terlaksananya Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Lindung Nasional secara Partisipatif	Desa dalam dan sekitar kawasan konservasi (desa)	5	1.500,00		Kemen LHK
KP : Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya pengelolaan hutan berkelanjutan	Luas kawasan hutan produksi (Juta Ha)	2	34,10		
ProP : Optimalisasi Hasil Hutan dan Jasa Lingkungan	Terlaksananya optimalisasi hasil hutan dan jasa lingkungan	Jumlah unit usaha pemanfaatan hasil hutan dan jasa lingkungan (juta m3)	2	30,00		Kemen LHK
ProP : Penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Terlaksananya penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah KPH yang difasilitasi penguatannya (unit)	5	40,00		Kemen LHK
KP : Penyediaan Air untuk Pertanian	Meningkatnya penyediaan air untuk pertanian	Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan non padi (ha)	2	17.860		
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (ha)	2	16.860		Kemen PUPR
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (ha)	2	51.400		
ProP : Pembangunan Sistem Penyediaan Air untuk Komoditas Pertanian Bernilai Ekonomi Tinggi	Terlaksananya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (ha)	2	1.000		Kemen PUPR
KP : Penyediaan Air Baku untuk Kawasan Prioritas	Meningkatnya penyediaan air baku untuk kawasan prioritas	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	2	88,79		
ProP : Penyediaan dan Pengamanan Air Baku dan Air Tanah	Terlaksananya penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan penyediaan air baku (m3/detik)	2	4,92		Kemen PUPR dan Kemen ESDM
KP : Pemeliharaan, Pemulihan, dan Konservasi Sumber Daya Air dan Ekosistemnya termasuk Revitalisasi Danau dan Infrastruktur Hijau	Meningkatnya pemeliharaan, pemulihan, dan konservasi sumber daya air dan ekosistemnya termasuk revitalisasi danau dan infrastruktur hijau	Peningkatan tutupan hutan (ha)	2	385.000,00		
ProP : Rehabilitasi Hutan dan Lahan	Terlaksananya rehabilitasi hutan dan lahan	Luas hutan dan lahan yang terehabilitasi secara nasional (ha)	2	385.000,00		Kemen LHK
ProP : Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Terlaksananya revitalisasi/ penyelamatan Danau Prioritas Nasional	Perbaikan kualitas danau prioritas nasional (danau prioritas)	2	15,00		Kemen LHK dan Kemen ATR
KP : Pengembangan Waduk Multiguna	Berkembangnya pemanfaatan waduk multiguna	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m³) (Kumulatif)	2	15,10		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah tampungan yang direvitalisasi dan dioptimalisasi pemanfaatannya (unit)	2	22		
ProP : Pembangunan dan Rehabilitasi Bendungan	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah bendungan multiguna yang selesai (unit)	2	13		Kemen PUPR
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Terlaksananya Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit)	2	15		Kemen PUPR
		Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya (unit)	2	7		
PP : Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	Meningkatnya ketersediaan, akses, dan kualitas konsumsi pangan	Nilai Tukar Petani (NTP) (nilai)	5	102,00-104,00		
		Angka Kecukupan Energi (AKE) (kkal/hari)	5	2.100,00		
		Angka Kecukupan Protein (AKP) (gram/kapita/hari)	5	57,00		
		Prevalence of Undernourishment (PoU) (%)	5	5,80		
		Food Insecurity Experience Scale (FIES) (%)	5	4,80		
KP : Peningkatan Kualitas Konsumsi, Keamanan, Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Meningkatnya kualitas konsumsi, keamanan, fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Konsumsi ikan (2.2.2(c)) (kg/kapita/tahun)	5	58,08		
		Konsumsi daging (kg/kapita/tahun)	5	13,80		
		Konsumsi sayur dan buah (gram/kapita/tahun)	5	273,20		
		Konsumsi protein asal ternak (gram/kapita/hari)	5	10,70		
		Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi ((%) Penerima BPNT)	5	40,00		
		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan (%)	5	85-95		
		Luas lahan produksi beras biofortifikasi (ha)	2	50.000,00		
		Persentase pangsa pangan organik** (%)	5	8,00		
ProP : Peningkatan Diversifikasi Konsumsi Pangan	Terlaksananya peningkatan diversifikasi konsumsi pangan	Jumlah produksi ubi kayu (juta ton)	5	21,23		Kementan
		Jumlah produksi ubi jalar (juta ton)	5	2,10		
ProP : Peningkatan Keamanan Pangan	Terlaksananya peningkatan keamanan pangan	Rasio tindak lanjut OPTK dan HPHK pada komoditas pertanian melalui media pembawa di tempat pemasukan/ pengeluaran yang ditetapkan (%)	5	91,00		Kementan
ProP : Pengembangan Fortifikasi dan Biofortifikasi Pangan	Terlaksananya pengembangan fortifikasi dan biofortifikasi pangan	Penelitian dan Pengembangan Biofortifikasi Pangan (Varietas)	5	1,00		Kementan
KP : Peningkatan Ketersediaan Pangan Hasil Pertanian, Perikanan dan Pangan Hasil Laut Secara Berkelanjutan	Meningkatnya ketersediaan pangan hasil pertanian, perikanan dan pangan hasil laut secara berkelanjutan	Penggunaan Benih Bersertifikat (%)	5	65,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.1.4 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Ketersediaan Beras (Juta ton)	5	42,70		
		Ketersediaan Protein Hewani (Juta ton)	5	2,60		
		Produksi jagung (Juta ton)	5	31,90		
		Produksi daging (Juta ton)	5	4,20		
		Produksi umbi-umbian (Juta ton)	5	24,60		
		Produksi sayuran (Juta ton)	5	16,20		
		Produksi buah-buahan (Juta ton)	5	23,12		
ProP : Peningkatan Produksi Padi	Meningkatnya produksi padi	Peningkatan produksi padi (%)	5	5,67		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Jagung	Meningkatnya produksi jagung	Peningkatan produksi jagung (%)	5	3,40		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Kedelai	Meningkatnya produksi kedelai	Peningkatan produksi kedelai (%)	5	7,08		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Daging	Meningkatnya produksi daging	Peningkatan produksi daging (%)	5	5,28		Kementan
ProP : Peningkatan Produksi Hortikultura	Meningkatnya produksi hortikultura	Peningkatan produksi sayuran (%)	5	2,70		Kementan
		Peningkatan produksi buah-buahan (%)	5	4,30		
KP : Peningkatan Produktivitas, Kesejahteraan Sumber Daya Manusia (SDM) Pertanian, Perikanan dan Kepastian Pasar	Meningkatnya produktivitas, kesejahteraan sumber daya manusia (SDM) pertanian, perikanan dan kepastian pasar	Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	5	70-80		
		Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp juta/tenaga kerja/tahun)	5	51,70		
ProP : Asuransi Pertanian	Terlaksananya asuransi pertanian	Jumlah asuransi usaha tani padi (hektar)	5	1.000.000,00		Kementan
		Jumlah asuransi usaha ternak sapi/kerbau (ekor)	5	150.000,00		
ProP : Pendidikan Pertanian	Terlaksananya pendidikan pertanian	Persentase Lulusan Pendidikan Vokasi Pertanian yang bekerja di bidang pertanian (%)	5	75,00		Kementan
ProP : Penyuluhan dan Pendampingan Sekolah Lapang	Terlaksananya penyuluhan dan pendampingan Sekolah Lapang	Persentase SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya	5	65,00		Kementan
		Persentase Kelembagaan petani yang meningkat kapasitasnya (%)	5	19,00		
ProP : Korporasi Petani	Berkembangnya korporasi petani	Jumlah korporasi petani (korporasi)	5	33,00		Kementan
KP : Peningkatan Keberlanjutan Produktivitas Sumber Daya Pertanian, dan Digitalisasi Pertanian	Meningkatnya keberlanjutan produktivitas sumber daya pertanian, dan digitalisasi pertanian	Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)	5	65,00		
		Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*) (Varietas unggul baru dan galur)	5	30;8		
		Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (Akses)	5	4.250,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.1.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Air Pertanian	Terkelolanya sumber daya air pertanian	Indeks pemenuhan lahan pertanian yang mendapat pengairan (%)	5	34,35		Kementan
ProP : Pengelolaan Sumber Daya Lahan Pertanian	Terkelolanya sumber daya lahan pertanian	Indeks ketersediaan lahan pertanian (nilai)	5	65,84		Kementan
		Indeks keberlanjutan lahan pertanian (nilai)	5	99,84		
KP : Peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Terlaksananya peningkatan tata kelola sistem pangan nasional	Global food security index (nilai)	5	65,50		
ProP : Stabilisasi Harga Pangan	Terlaksananya stabilisasi Harga Pangan	Koefisien Varian Harga Pangan (%)	5	2,00		Kementan dan Kemendag
ProP : Penanganan Rawan Pangan serta Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat	Terlaksananya penanganan rawan pangan serta cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Persentase daerah rentan rawan pangan (%)	5	16,00		Kementan
		Cadangan pangan Nasional (juta ton)	5	2,00		
PP : Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman, Perikanan Dan Kelautan	Meningkatnya pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Konservasi Kawasan Kelautan (14.5.1*) (juta ha)	5	24,60		
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (14.4.1*) (%)	5	≤67		
		Produksi Perikanan (juta ton)	5	27,55		
		Produksi garam (juta ton)	5	3,10		
		Nilai Tukar Nelayan (NTN) (nilai)	5	102-104		
KP : Peningkatan Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir serta Pengelolaan Ruang Laut	Meningkatnya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelola WPP (14.2.1(b)) (Unit)	5	11,00		
		Akurasi pendataan stock dan pemanfaatan WPP (WPP)	4	11,00		
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (RZ)	4	22,00		
ProP : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Terlaksananya pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Jumlah model percontohan penguatan tata kelola WPP (WPP)	4	5,00		Kemen KP
ProP : Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	Terlaksananya penataan ruang laut dan Rencana Zonasi Pesisir	Jumlah KSN dan KSNT yang Memiliki Rencana Zonasi KSN dan Rencana Zonasi KSNT dan antarwilayah laut (RZ)	5	22,00		Kemendagri, Kemen KP, BIG
ProP : Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang laut	Jumlah pengendalian pemanfaatan ruang laut dan reklamasi (lokasi)	5	9,00		Kemen KP
KP : Peningkatan Ekosistem Kelautan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	Meningkatnya ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Jumlah kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kawasan)	5	10,00		
ProP : Pengembangan Wisata Bahari dan Jasa Maritim	Terlaksananya pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	Jumlah kawasan wisata bahari dan BMKT yang terkelola	5	6,00		Kemen KP
ProP : Pengembangan Marine Bioproduct dan Bioteknologi	Terlaksananya pengembangan <i>marine bioproduct</i> dan bioteknologi	Jumlah bioteknologi dan biofarmakologi yang dikembangkan (paket)	5	8,00		Kemen KP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.1.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Peningkatan Produksi, Produktivitas, Standardisasi Mutu dan Nilai Tambah Produk Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya produksi, produktivitas, standardisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Produksi ikan (Juta ton)	5	16,00		
		Produksi rumput laut (Juta ton)	5	11,55		
ProP : Peningkatan Produksi Perikanan	Meningkatnya produksi perikanan	Produksi ikan tangkap (Juta ton)	5	8,08		Kemen KP
		Produksi ikan budidaya (juta ton)	5	7,92		
ProP : Peningkatan Produksi Rumput Laut	Meningkatnya produksi rumput laut	Jumlah Produksi Rumput Laut (Juta ton)	5	11,55		Kemen KP
ProP : Peningkatan Produksi Garam	Meningkatnya produksi garam	Jumlah Produksi Garam (Juta ton)	5	3,10		Kemen KP
ProP : Karantina Ikan dan Jaminan Mutu	Terlaksananya karantina ikan dan jaminan mutu	Persentase pencegahan impor, ekspor, antar area jenis ikan yang dilarang, dilindungi dan dibatasi (%)	5	90,00		Kemen KP
KP : Peningkatan Fasilitas Usaha, Pembiayaan, dan Akses Perlindungan Usaha Kelautan dan Perikanan Skala Kecil serta Akses terhadap Pengelolaan Sumber Daya	Meningkatnya fasilitas usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp Triliun)	5	3,30		
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) (indeks)	5	102,00		
ProP : Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	Meningkatnya perlindungan nelayan dan pembudidaya ikan	Jumlah nelayan dan pembudidaya ikan yang terlindungi (orang)	5	125.000,00		Kemen KP
ProP : Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	Terlaksananya peningkatan akses pembiayaan usaha perikanan	Sertifikasi tanah nelayan dan lahan budidaya (bidang)	5	20.500,00		Kemen KP
ProP : Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya penataan perizinan kelautan dan perikanan	Integrasi sistem perizinan pusat-daerah (provinsi)	4	34,00		Kemen KP
KP : Peningkatan SDM dan Riset Kemaritiman dan Kelautan serta Database Kelautan dan Perikanan	Meningkatnya SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	Jumlah hasil riset yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	5	8,00		
ProP : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	Terlaksananya peningkatan SDM kelautan dan perikanan	Jumlah masyarakat yang disuluh (orang)	1	410.000,00		Kemen KP
ProP : Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	Terlaksananya penguatan inovasi teknologi dan riset kelautan dan perikanan	Jumlah riset kemaritiman dan kelautan (hasil riset)	5	26,00		Kemen KP
PP : Penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM), dan Koperasi	Menguatnya kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi	Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.3.1(c)* ((%))	5	26,50		
		Pertumbuhan wirausaha (%)	5	2,50		
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5	5,20		
KP : Peningkatan Kemitraan Usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Meningkatnya kemitraan usaha antara Usaha Mikro Kecil dan Usaha Menengah Besar	Proporsi IMK (Industri Mikro Kecil) yang menjalin kemitraan (%)	5	9,00		
ProP : Pengembangan Kapasitas Usaha dan Kualitas Produk	Terlaksananya pengembangan kapasitas usaha dan kualitas produk	Jumlah UMKM yang dikembangkan kapasitas usahanya (UMKM)	5	7.990,00		Kemenperin, Kemenparekraf, Kemen KUKM, BSN, Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Perluasan Kemitraan Usaha	Terlaksananya perluasan kemitraan usaha	Jumlah UMKM yang diperluas cakupan kemitraannya (UMKM)	5	777,00		Kemen KUKM, KPPU
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan untuk Bermitra	Terlaksananya penguatan kapasitas kelembagaan untuk bermitra	Jumlah UMKM yang ditingkatkan kapasitas usahanya (UMKM)	5	500,00		Kemen KUKM
KP : Peningkatan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Meningkatnya kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha	Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)	5	20,30		
		Proporsi IKM dengan pinjaman/kredit (9.3.2*) (%)	5	2,80		
		Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor produksi (%)	5	65,00		
ProP : Dukungan Pemberian Modal Awal Usaha	Terlaksananya dukungan pemberian modal awal usaha	Jumlah wirausaha pemula yang mendapat modal usaha (orang)	5	6.900,00		Kememparekraf, Kemen KUKM
ProP : Pendampingan UMKM untuk Mengakses Kredit	Terlaksananya pendampingan UMKM untuk mengakses kredit	Jumlah UMKM yang didampingi mengakses kredit/pembiayaan (UMKM)	5	10.000,00		Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Skema Pembiayaan bagi Wirausaha dan UMKM	Terlaksananya pengembangan skema pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM	Jumlah UMKM yang dikembangkan skema pembiayaannya (UMKM)	5	850,00		Kemen KUKM
KP : Peningkatan kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Meningkatnya kapasitas, jangkauan, dan inovasi koperasi	Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (Koperasi)	5	75,00		
ProP : Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Manajer Koperasi	Terlaksananya peningkatan kapasitas bagi koperasi	Jumlah pengurus dan pengelola koperasi yang ditingkatkan kapasitasnya (orang)	5	2.300,00		Kemen KUKM
ProP : Pendampingan Kelompok untuk Membentuk Koperasi	Terlaksananya pendampingan kepada masyarakat untuk membentuk koperasi	Jumlah orang/masyarakat yang didampingi membentuk koperasi (orang)	5	3.000,00		Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Jangkauan dan Cakupan Usaha	Terlaksananya pengembangan jangkauan dan cakupan usaha kepada koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan jangkauan dan cakupan usahanya (koperasi)	5	525,00		Kemen KUKM
ProP : Pengembangan Inovasi Koperasi	Terlaksananya Pengembangan Inovasi kepada Koperasi	Jumlah koperasi yang dikembangkan untuk berinovasi (koperasi)	5	225,00		Kemen KUKM
KP : Peningkatan Penciptaan Start-up dan Peluang Usaha	Meningkatnya penciptaan start-up dan peluang usaha	Jumlah Wirausaha baru industri kecil yang tumbuh (WUB)	5	1.650,00		
		Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri (9.3.1*) (%)	5	18,80		
		Penumbuhan start-up (start-up)	5	700,00		
ProP : Pelatihan Kewirausahaan	Terlaksananya pelatihan kepada wirausaha atau calon wirausaha	Jumlah wirausaha yang dilatih (orang)	5	82.400,00		Kemenperin, Kemendikbud, Kemenaker, KemenKUKM, Kemen PPPA, Kemenpora



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.1.8 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Inkubasi Usaha	Terlaksananya inkubasi kepada wirausaha	Jumlah wirausaha yang diinkubasi (Orang)	5	200,00		Kemen KUKM, Kemenparekraf, Kemenperin
ProP : Penguatan Kapasitas Layanan Usaha	Terlaksananya layanan pengembangan Usaha kepada UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat layanan usaha (UMKM)	5	7.170,00		Kemenperin, KemenKUKM, Kemendag
ProP : Pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	Terlaksananya pengembangan sentra Industri Kecil dan Menengah	Jumlah sentra industri kecil dan menengah (IKM) di luar Jawa yang beroperasi (Sentra IKM Kumulatif)	5	20,00		Kemenperin
KP : Peningkatan Nilai Tambah Usaha Sosial	Meningkatnya nilai tambah usaha sosial	Kontribusi usaha sosial (Persen PDB)	5	2,10		
ProP : Pembinaan Wirausaha Sosial	Terlaksananya pembinaan wirausaha sosial	Jumlah Lembaga yang membina wirusaha sosial (Lembaga)	5	44,00		Kemen KUKM
PP : Peningkatan Nilai Tambah, Lapangan Kerja, dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	5	4.75-5.54		
		Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	5	17.63-17.84		
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	5	1.277,00		
		Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	1	17,90		
		Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	1	14,60		
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	1	10,50		
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	1	17,90		
		Peringkat Kemudahan Berusaha Indonesia/ EODB (Peringkat)	5	menuju 40		
		Nilai Realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	5	858,50		
		Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	5	268,70		
KP : Peningkatan Industri Pengolahan Berbasis Pertanian, Kemaritiman, dan Non Agro yang Terintegrasi Hulu-Hilir	Meningkatnya industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pertumbuhan PDB subsektor industri makanan dan minuman (%)	5	5.00-5.50		
		Pertumbuhan PDB perkebunan (%)	5	5,00		
		Peningkatan produksi kakao (%)	5	2,30		
		Peningkatan produksi kopi (%)	5	1,50		
		Peningkatan produksi kelapa sawit (%)	5	5,90		
		Pertumbuhan PDB hortikultura (%)	5	5,80		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.9 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan Industri Berbasis Perkebunan	Terlaksananya pengembangan industri berbasis perkebunan	Produksi Kopi (juta ton)	5	0,78		Kemendagri, Kementan, Kemenperin, Kemenko Perekonomian
		Produksi Kakao (juta ton)	5	0,76		
		Produksi Karet (juta ton)	5	3,63		
		Produksi Kelapa Dalam (juta ton)	5	2,98		
Pro P : Pengembangan Industri Berbasis Pertanian Pangan	Terlaksananya pengembangan industri berbasis pertanian pangan	Pertumbuhan volume ekspor pertanian (%)	5	1,35		Kementan
ProP : Pengembangan Industri Berbasis Kehutanan	Terlaksananya pengembangan industri berbasis kehutanan	Pertumbuhan PDB Industri Furnitur (%)	5	4,00-5,00		Kemenperin, Kemen LHK
ProP : Pengembangan Industri Kemaritiman	Terlaksananya pengembangan industri kemaritiman	Pertumbuhan PDB perikanan(%)	5	8,11		Kemenperin, Kemen KP
ProP : Pengembangan Industri Kimia, Farmasi dan Logam	Terlaksananya pengembangan industri kimia, farmasi dan logam	Pertumbuhan PDB Industri Kimia, Farmasi, dan Obat Tradisional (%)	5	6,00-7,25		Kemenperin
KP : Peningkatan Industrialisasi Berbasis Hilirisasi Sumber Daya Alam, termasuk melalui Pengembangan Smelter dan Kawasan Industri terutama di Luar Jawa	Meningkatnya industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam, termasuk melalui pengembangan smelter dan kawasan industri terutama di luar Jawa	Jumlah Kawasan Industri (KI) yang difasilitasi di luar Jawa (KI-KEK Industri)	5	5,00		
ProP : Pengembangan Kawasan Industri dan Smelter secara Terintegrasi	Terlaksananya pengembangan kawasan industri dan smelter secara terintegrasi	Pertumbuhan PDB industri Logam Dasar (%)	5	5.00 - 6.25		Kemenperin, Kemen ESDM, Kemenhub, Kemen PUPR, BPWS
ProP : Pemanfaatan Mineral dan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah	Terlaksananya pemanfaatan mineral dan batubara untuk peningkatan nilai tambah	Indeks Pasokan Mineral untuk Peningkatan Nilai Tambah Dalam Negeri (%)	2	75,53		Kemen ESDM
		Rasio Pemanfaatan Batubara untuk Peningkatan Nilai Tambah Batubara (%)	2	50,00		
KP : Peningkatan Daya Saing Destinasi dan Industri Pengolahan Pariwisata, termasuk Wisata Alam, yang Didukung Penguatan Rantai Pasok	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk wisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	Destinasi pariwisata prioritas yang dipercepat pengembangannya (destinasi)	5	10,00		
		Revitalisasi destinasi Bali (destinasi)	5	1,00		
		Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas (Unit)	5	25,00		
		Destinasi wisata berbasis Geopark (destinasi)	5	16,00		
		Destinasi wisata bahari (destinasi)	5	6,00		
ProP : Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk Mendukung Destinasi Pariwisata Prioritas	Terlaksananya pengembangan 25 kawasan hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	Jumlah destinasi wisata alam prioritas (destinasi)	5	25,00		Kemen LHK



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.10 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Aksesibilitas, Amenitas, dan Atraksi, serta Daya Dukung Destinasi Pariwisata	Terlaksananya peningkatan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung destinasi pariwisata	Destinasi yang ditingkatkan aksesibilitas, amenitas, dan atraksi, serta daya dukung (destinasi)	5	18,00		Kemendagri, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemenparekraf
ProP : Penguatan Rantai Pasok Industri dan Kapasitas Masyarakat, termasuk Melalui Desa Wisata	Terlaksananya penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata	Jumlah penguatan rantai pasok industri dan kapasitas masyarakat, termasuk melalui desa wisata (destinasi/provinsi)	5	13,00		Kemenparekraf
ProP : Pengelolaan dan Standar Layanan Destinasi Pariwisata	Terlaksananya pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata	Jumlah pengelolaan dan standar layanan destinasi pariwisata (destinasi)	4	3,00		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 16 Destinasi Pariwisata Geopark	Terlaksananya pengembangan 16 destinasi pariwisata geopark	Jumlah koordinasi pengembangan Geopark (Kegiatan)	5	1,00		Kemen ESDM, Kemen PPN/Bappenas
KP : Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk dan usaha kreatif dan digital	Pertumbuhan PDB ekonomi kreatif (%)	5	5.3-5.5		
		Pertumbuhan PDB informasi dan komunikasi (%)	5	8.27-10.11		
ProP : Penyediaan Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand	Terlaksananya penyediaan insentif inovasi dan pengembangan brand	Jumlah Skema Insentif Inovasi dan Pengembangan Brand (skema)	5	3,00		Kemenparekraf
ProP : Penyediaan Insentif Penerapan dan Komersialisasi HKI	Terlaksananya penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI	Jumlah penyediaan insentif penerapan dan komersialisasi HKI (kegiatan)	5	2,00		Kemenparekraf
ProP : Fasilitas Rantai Pasok dan Scale-up Karya dan Platform Kreatif Unggulan	Terlaksananya fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan	Jumlah fasilitasi rantai pasok dan scale-up karya dan platform kreatif unggulan (kerjasama)	5	13,00		Kemenparekraf
ProP : Peningkatan Kerja Sama Pengembangan Kota Kreatif	Terlaksananya peningkatan kerja sama pengembangan kota kreatif	Jumlah kerja sama pengembangan kota kreatif (kawasan)	5	19,00		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan 'Start-up Parks' dan Center of Excellence	Terlaksananya pengembangan 'start-up parks' dan center of excellence	Jumlah 'start-up parks' dan center of excellence yang dikembangkan (kerjasama)	5	3,00		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Pendampingan dan Inkubasi di Ruang Kreatif	Terlaksananya pengembangan pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif	Jumlah pendampingan dan inkubasi di ruang kreatif (kegiatan)	5	5,00		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)	Terlaksananya pengembangan Kawasan Be Creative District (BCD)	Jumlah Kawasan Be Creative District (BCD) yang dikembangkan (kegiatan)	2	1,00		Kemenparekraf, BKPM
KP : Perbaikan Iklim Usaha dan Peningkatan Investasi, termasuk Reformasi Ketenagakerjaan	Terlaksananya perbaikan iklim usaha dan peningkatan investasi, termasuk reformasi ketenagakerjaan	Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	5	49,70		
		Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	5	49,00		
		Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (K/L/D)	4	bertahap		
ProP : Kepastian Hukum Berusaha dan Investasi	Terlaksananya kepastian hukum berusaha dan investasi	Jumlah usulan perubahan regulasi/peraturan yang menghambat investasi (usulan rekomendasi)	4	6,00		BKPM, KPPU, Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.11 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Fasilitasi Kemudahan Usaha dan Investasi	Terlaksananya fasilitasi kemudahan usaha dan investasi	Jumlah perusahaan yang difasilitasi penyelesaian masalah penanaman modal di Wilayah I, II, III, dan IV (perusahaan)	5	124,00		Kemenperin, BKPM, KPPU, Kemendag, Kemenkeu, Kemendagri
ProP : Peningkatan Iklim Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial	Meningkatnya jaminan perlindungan hak-hak pekerja dan Dialog sosial pada perusahaan	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial (orang)	5	1.634.775,00		Kemendagri, Kemenaker, BP2MI, Kemenko Perekonomian, Kemenkeu
KP : Pengembangan industri halal	Meningkatnya pengembangan industri halal	Jumlah sektor industri halal yang difasilitasi (sektor industri)	5	2,00		
ProP : Pengembangan Infrastruktur Industri Halal	Terlaksananya peningkatan pengembangan infrastruktur industri halal	Jumlah kawasan dengan zona tematik industri halal yang difasilitasi (Kawasan Industri)	5	2,00		Kemenlu, Kemenperin, Kemendag
PP : Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi Dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Meningkatnya ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	Neraca perdagangan (US\$ miliar)	5	10.76-12.75		
		Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	5	5.96-7.86		
		Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	5	4.0-7.0		
		Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (juta perjalanan)	5	180-220		
KP : Peningkatan Diversifikasi, Nilai Tambah, dan Daya Saing Produk Ekspor dan Jasa	Meningkatnya diversifikasi, nilai tambah, dan daya saing produk ekspor dan jasa	Pertumbuhan ekspor pertanian (%)	5	44.113,00		
		Ekspor hasil pertanian (FOB) (US\$ miliar)	5	4,30		
		Ekspor hasil perikanan (USD miliar)	5	6,05		
		Kontribusi ekspor industri pengolahan (%)	5	76,50		
		Kontribusi ekspor produk industri berteknologi tinggi (komputer, instrumen, ilmiah, mesin listrik, dirgantara) (%)	5	11,40		
		Pertumbuhan ekspor non migas (%)	5	5.96-7.86		
		Rasio ekspor jasa terhadap PDB (%)	5	2,80		
		Nilai ekspor produk industri kehutanan (USD miliar)	5	2,60		
		Nilai ekspor industri pengolahan (USD miliar)	5	122.8-127.5		
ProP : Peningkatan Diversifikasi Produk Ekspor dan Jasa	Terlaksanakannya peningkatan diversifikasi produk ekspor dan jasa	Jumlah perusahaan yang difasilitasi bantuan permesinan (perusahaan)	5	30,00		Kemenperin
ProP : Peningkatan Nilai Tambah Produk Ekspor dan Jasa	Terlaksananya peningkatan nilai tambah produk ekspor dan jasa	Jumlah produk ekspor yang diberikan fasilitasi pengembangan produk (Produk)	5	155,00		Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.12 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor	Meningkatnya akses dan pendalaman pasar ekspor	Jumlah negara tujuan ekspor (Negara)	5	220,00		
		Share ekspor produk Indonesia di kawasan Afrika, Amerika Selatan, dan Eropa Timur (%)	5	1,30		
		Share ekspor produk Indonesia di pasar tradisional (%)	5	3,30		
ProP : Peningkatan Pangsa Pasar Produk Indonesia	Terlaksananya peningkatan pangsa pasar produk Indonesia	Jumlah promosi dan misi dagang (kegiatan promosi)	5	26,00		Kemenperin, Kemenko Perekonomian, Kemendag
ProP : Fasilitasi Ekspor	Terlaksananya Fasilitasi Ekspor	Jumlah kegiatan fasilitasi ekspor (fasilitasi)	5	56,00		Kemenko Perekonomian, Kemenparekraf, Kemendag, Kemenkeu
ProP : Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Terlaksananya Peningkatan Daya Saing Industri Guna Mendorong Peningkatan Ekspor	Nilai Ekspor produk industri sektor ILMATE (USD Miliar)	5	41,08		Kemenperin, Kemenko Perekonomian, BSN
		Nilai Ekspor produk industri sektor Agro (USD Miliar)	5	57,05		
		Nilai Ekspor produk industri sektor IKFT (USD Miliar)	5	35,97		
KP : Pengelolaan Impor	Meningkatnya Pengelolaan Impor	Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	5	49,90		
		Produk industri yang mendapatkan sertifikat TKDN (Produk per tahun)	5	6.630,00		
		Jumlah wisatawan nusantara (8.9.1(b) (Juta perjalanan)	5	320-333		
ProP : Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	Terlaksananya Penguatan Kebijakan Perlindungan Akses Pasar Dalam Negeri	Jumlah pengawasan Post Border (Berita Acara)	5	825,00		Kemenperin, Kemendag
KP : Peningkatan Kandungan dan Penggunaan Produk Dalam Negeri termasuk Melalui Pengadaan Pemerintah yang Efektif	Meningkatnya kandungan dan penggunaan produk dalam negeri termasuk melalui pengadaan pemerintah yang efektif	Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (%)	5	5,00		
ProP : Pengembangan Sistem Katalog	Terlaksananya Pengembangan sistem katalog	Jumlah katalog produk dalam negeri (katalog)	5	15,00		LKPP
KP : Peningkatan Partisipasi dalam Jaringan Produksi Global	Meningkatnya partisipasi dalam jaringan produksi global	Jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global (Sektor)	5	4,00		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.13 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Investasi (inbound & outbound) Industri GPN Berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	Terlaksananya Peningkatan Investasi (inbound & outbound) Industri GPN berbasis Hilirisasi SDA, Teknologi Tinggi	Jumlah investasi asing yang masuk di sektor industri (investor/perusahaan)	5	5,00		Kemenperin, Kemendag
KP : Peningkatan Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Meningkatnya Citra dan Diversifikasi Pemasaran Destinasi Pariwisata Prioritas dan Destinasi Branding, dan Produk Kreatif	Jumlah branding Wonderful Indonesia (destinasi branding)	5	10,00		
		Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD Miliar)	5	17,45		
		Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration) (Lokasi)	5	8 (kumulatif)		
ProP : Branding Wonderful Indonesia	Terlaksanakannya media branding	Jumlah media branding (media)	5	4,00		Kemenparekraf
ProP : Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	Terlaksananya Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru	Jumlah Pendalaman Pasar Tradisional dan Diversifikasi Pemasaran ke Pasar Baru (regional pemasaran)	5	3,00		Kemenparekraf
ProP : Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce	Terlaksanakannya Perluasan Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce	Jumlah Pemasaran Produk Kreatif, termasuk Melalui e-commerce (jenama/orang)	5	89,00		Kemenparekraf
ProP : Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	Terlaksananya Perluasan Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran	Jumlah Diklat Manajemen Usaha dan Pemasaran (orang)	1	13.000,00		Kemenparekraf
KP : Peningkatan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Diplomasi Ekonomi	Meningkatnya efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi ekonomi	Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia (Negara)	5	91,00		
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke Indonesia (Negara)	5	88,00		
		Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional (Ratifikasi)	5	4,00		
		Jumlah promosi Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi (Promosi terintegrasi)	5	8,00		
		PTA/FTA/CEPA yang disepakati (kesepakatan)	5	25 (kumulatif)		
ProP : Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia (Negosiator) dan Kelembagaan Perwakilan RI di Luar Negeri termasuk FTA Center	Jumlah kegiatan peningkatan kapasitas negosiator (kegiatan)	5	1,00		Kemenperin, Kemendag
ProP : Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	Terlaksananya Peningkatan Jumlah Kesepakatan dan Penyelesaian Proses Ratifikasi Kerjasama Ekonomi Internasional	Jumlah kesepakatan dan penyelesaian proses ratifikasi kerja sama ekonomi internasional (dokumen)	5	160,00		Kemenperin, Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.I.14 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Promosi Terintegrasi	Terlaksananya Promosi Terintegrasi	Jumlah promosi terintegrasi (Pameran)	5	7,00		Kemenlu, Kemenperin, BKPM, Kemendag
PP : Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	Meningkatnya penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	5	4,17		
		Biaya logistik terhadap PDB (%)	5	22,20		
		Rasio M2/PDB (%)	5	39,74		
		Peringkat travel and tourism competitiveness index (peringkat)	5	36-39		
		Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	5	11,99		
		Imbal hasil (yield) surat berharga negara (%)	5	menurun		
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	5	25,94		
KP : Peningkatan Pendalaman Sektor Keuangan	Meningkatnya pendalaman sektor keuangan	Rasio Kredit/PDB (%)	5	32,60		
		Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (Unit)	5	56,30		
		Jumlah Kantor Bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (Unit)	5	15,40		
		Skema pembiayaan berbasis HKI (Skema)	5	1,00		
ProP : Peningkatan Inklusi Keuangan, Inovasi Sektor Keuangan, dengan Menjaga Stabilitas dan Integritas Sistem Keuangan	Terlaksananya peningkatan inklusi keuangan, inovasi sektor keuangan, dengan menjaga stabilitas dan integritas sistem keuangan	Indeks Inklusi Keuangan (%)	3	80,00		Kemenparekraf
ProP: Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	Terlaksanakannya Peningkatan Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan Pemerintah	Turnover Rasio SBN (%)	5	5,02		Kemendagri & Kemenkeu
KP : Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Digital dan Industri 4.0	Meningkatnya Optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dan industri 4.0	Kontribusi ekonomi digital (%)	5	3,50		
		Nilai transaksi e-commerce (Rp triliun)	5	345,00		
		Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (Orang)	1	9.000,00		
ProP : Penguatan Industri Fintech, e-commerce, on-demand Service, dan Internet Of things	Terlaksananya penguatan industri Fintech, e-commerce, on-demand service, dan Internet Of things	Jumlah fasilitator edukasi perdagangan melalui sistem elektronik yang mendapat pelatihan (Fasilitator)	5	200,00		Kemendag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.15 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Modernisasi Industri Hingga 4.0 Sesuai Karakteristik Industri	Terlaksananya modernisasi industri hingga 4.0 sesuai karakteristik industri	Jumlah Perusahaan yang didampingi (perusahaan)	5	195,00		Kemenperin
KP : Peningkatan Sistem Logistik dan Stabilitas Harga	Meningkatnya sistem logistik dan stabilitas harga	Skor Logistic Performance Index (indeks)	5	3,20		
		Tingkat inflasi (%)	5	2.0 - 4.0		
ProP : Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Efisiensi Sistem Logistik	Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pendukung efisiensi sistem logistik	jumlah sarana prasarana pendukung efisiensi distribusi yang dibangun (sarana dan prasarana)	5	67,00		Kemen PUPR, Kemendag
ProP : Pengendalian Inflasi	Terjaganya inflasi pangan bergejolak	Tingkat inflasi pangan bergejolak (%)	5	2,3 - 4,3		Kemendag
KP : Peningkatan Penerapan Praktik Berkelanjutan di Industri Pengolahan dan Pariwisata	Meningkatnya penerapan praktik berkelanjutan di industri pengolahan dan pariwisata	Efisiensi perusahaan industri yang menerapkan prinsip industri hijau (%)	5	4,00		
		Jumlah lokasi penerapan sustainable tourism development (12.b.1) (Lokasi)	5	10,00		
ProP : Penerapan Standar Pariwisata Berkelanjutan	Terlaksananya penerapan standar pariwisata berkelanjutan	Jumlah destinasi dengan penerapan standar pariwisata berkelanjutan (destinasi)	5	10,00		Kemenparekraf
ProP : Penerapan Industri Hijau	Terlaksananya penerapan industri hijau	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (12.6.1(a)) (Perusahaan)	5	2.000,00		Kemenperin, BSN
KP : Reformasi Fiskal	Terlaksananya reformasi fiskal	Persentase realisasi penerimaan negara (%)	5	100,00		
ProP : Pembaruan Sistem Informasi Administrasi Perpajakan yang Andal dan Terintegrasi	Terlaksananya pembaruan sistem informasi administrasi perpajakan yang andal dan terintegrasi	Penyelesaian modul core tax system (modul)	5	2,00		Kemenkeu
ProP : Perumusan Kebijakan terkait PPnBM Sektor Properti	Terlaksananya kajian terkait PPnBM Sektor Properti	Persentase penyelesaian rekomendasi kebijakan efektifitas dan efisiensi PPnBM di sektor properti (%)	5	100,00		Kemenkeu
KP : Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital	Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif (Data base)	5	3,00		
		Ketersediaan data dan informasi statistik e-commerce (Data base)	5	1,00		
		Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (Data base)	5	2,00		
ProP : Pengembangan Statistik Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Terlaksananya pengembangan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah publikasi/laporan statistik pariwisata dan ekonomi kreatif yang dikembangkan (database)	5	2,00		Kemenparekraf, BPS
ProP : Pengembangan Statistik e-commerce	Terlaksanakannya Pengembangan Statistik e-commerce	Jumlah publikasi/laporan statistik e-commerce yang dikembangkan (Data base)	5	1,00		BPS
ProP : Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan Perbaikan Statistik Pangan	Terlaksanakannya Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan Statistik Pangan	Jumlah publikasi/laporan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan statistik pangan (Data base)	5	2,00		BPS



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.I.16 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendetilan proyek:						
Ketahanan Pangan (termasuk pengembangan food estate di Kalteng)						
Pengembangan Kawasan Industri (KI Teluk Bintuni, KI Batang dan Subang)						
Dukungan untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.1 -

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN WILAYAH UNTUK MENGURANGI KESEJANGAN DAN MENJAMIN PEMERATAAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN 2 : Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan					72.138.253,2	
PP : Pembangunan Wilayah Sumatera	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sumatera	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sumatera (persen/tahun)	5	3,9 - 5,1		
		IPM Provinsi di Wilayah Sumatera (min-maks)	5	70,1-76,5		
		Persentase penduduk miskin wilayah Sumatera (%)	5	9,6		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	9		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	5	2		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)	5	2		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	5	4		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan (Jumlah KI)	5	1		
Provinsi Aceh						
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh (nilai)	5	>1		Kemen PUPR Kemendagri
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Arun Lhokseumawe	Rasio pertumbuhan investasi kawasan KEK terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Aceh (nilai)	5	>1		Kemen PUPR Kemendagri
Provinsi Sumatera Utara						
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Sei Mangkei	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara (nilai)	5	>1		KPBU, BKPM, KemenPUPR, dan Kemendagri
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Danau Toba dan sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Utara (nilai)	5	>1		Kemenparekraf, KemenPUPR, Kemenhub, dan Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sumatera Barat						
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Padang-Bukittinggi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sumatera Barat (nilai)	5	>1		Kemenuh dan Kemenparekraf
Provinsi Riau						
Provinsi Jambi						
Provinsi Sumatera Selatan						
Provinsi Bengkulu						
Provinsi Lampung						
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bangka Belitung/KEK Tanjung Kelayang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (nilai)	5	>1		Kemenuh, Kemenparekraf, dan Kemendagri
Provinsi Kepulauan Riau						
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KPBPB Batam, Bintan, dan Karimun	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		BP Batam
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	Terlaksananya Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Galang Batang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		Kemenperin dan Kemendagri
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Batam Bintan	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kepulauan Riau (nilai)	5	>1		KemenPUPR, Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Kemenparekraf
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Aceh						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kementan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kementan
ProP: Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kementan
ProP :Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kemen KP
ProP: Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun per Provinsi Aceh (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Aceh (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Sumatera Utara						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Utara (%)	5			Kemen KP
Provinsi Sumatera Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kementan
ProP :Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kementan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.4 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Barat (%)	5			Kemen KP
Provinsi Riau						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya Pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya optimalisasi komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Riau (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Jambi						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jambi (%)	5			Kemen KP
Provinsi Sumatera Selatan						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kementan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sumatera Selatan (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Bengkulu						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bengkulu (%)	5			Kementan
Provinsi Lampung						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Lampung (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan timah	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan timah	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kepulauan Riau						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kepulauan Riau (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Banda Aceh (Angka perhitungan sementara)	5	46,25		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sabang (Angka perhitungan sementara)	5	42,56		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lhokseumawe (Angka perhitungan sementara)	5	38,5		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Langsa (Angka perhitungan sementara)	5	38,56		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Medan (Angka perhitungan sementara)	5	56,13		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sibolga (Angka perhitungan sementara)	5	59,26		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pematangsiantar (Angka perhitungan sementara)	5	54,34		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gunungsitoli (Angka perhitungan sementara)	5	36,44		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Padang (Angka perhitungan sementara)	5	46,22		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Solok (Angka perhitungan sementara)	5	40,99		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bukittinggi (Angka perhitungan sementara)	5	47,22		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Dumai (Angka perhitungan sementara)	5	57,47		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekanbaru (Angka perhitungan sementara)	5	60,76		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jambi (Angka perhitungan sementara)	5	42,31		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Palembang (Angka perhitungan sementara)	5	47,47		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Prabumulih (Angka perhitungan sementara)	5	48,01		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Lubuklinggau (Angka perhitungan sementara)	5	54,5		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bengkulu (Angka perhitungan sementara)	5	44,44		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Bandar Lampung (Angka perhitungan sementara)	5	44,38		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pangkal Pinang (Angka perhitungan sementara)	5	45,28		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tanjungpinang (Angka perhitungan sementara)	5	46,5		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batam (Angka perhitungan sementara)	5	50,18		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	20		
	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.8 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	2		
Provinsi Aceh						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	4		Kemenhub, KemenPUPR, Kemen ESDM
Provinsi Sumatera Utara						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemendag, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM,
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3		Kemenhub dan KemenPUPR
Provinsi Sumatera Barat						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3		Kemenhub, Kemen ESDM dan KemenPUPR
Provinsi Riau						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen ESDM dan Kemenhub
Provinsi Jambi						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM dan Kemenhub
Provinsi Sumatera Selatan						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, BPS, Kemen ESDM,
	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		
Provinsi Bengkulu						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Lampung						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemenhub, Kemen ESDM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.9 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kepulauan Riau						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	57,85		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	10,1 – 10,5		
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	55,98		
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sumatera (IPKT)	5	56,59		
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Sumatera (kecamatan)	5	56		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sumatera	5	0,47		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
Provinsi Aceh						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	55,95		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Aceh Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Aceh Timur (Poin IPKP)	5	61,95		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Ketapang Nusanantara, Samar Kilang, dan Selaut	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Aceh	5	55,99		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Aceh	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Aceh (kecamatan)	2	2		Kemendesa PDTT



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.II.10 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Sabang	5	0,45		Kemendesa PDTT, KKP, Kemen ESDM
Provinsi Sumatera Utara						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	51,89		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Toba Samosir dan Samosir	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Toba Samosir dan Kab. Samosir (Poin IPKP)	5	61,95		Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sumatera Utara	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Sumatera Utara (kecamatan)	2	1		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
Provinsi Sumatera Barat						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	65,37		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Agam	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Agam (Poin IPKP)	5	53,62		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lunang Silaut	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Barat	5	64,05		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
Provinsi Riau						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,28		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Banyuasin (Poin IPKP)	5	48,86		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Riau	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Riau (kecamatan)	2	5		Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Bengkalis	5	0,51		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
Provinsi Jambi						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	60,06		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Muaro Jambi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Muaro Jambi (Poin IPKP)	5	48,86		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Bathin III Ulu	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Jambi (IPKT)	5	32,00		Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.11 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sumatera Selatan						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,01		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Banyuasin	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Banyuasin (Poin IPKP)	5	51,86		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Parit Rambutan, Telang, dan Kikim	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sumatera Selatan (IPKT)	5	57,08		Kemendesa PDTT
ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Selatan	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 18,3 – 18,8; 2) 65,6 – 66,1		Kemendesa PDTT
Provinsi Bengkulu						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	56,68		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bengkulu Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Bengkulu Tengah (Poin IPKP)	5	53,62		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Lagita	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bengkulu (IPKT)	5	69,36		Kemendesa PDTT
Provinsi Lampung						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	62,31		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mesuji dan Tulang Bawang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Mesuji dan Kab. Tulang Bawang (Poin IPKP)	5	50,30		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rawa Pitu dan Mesuji	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Lampung (IPKT)	5	52,94		Kemendesa PDTT
ProP : Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di Provinsi Lampung	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Lampung	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 14,0 – 14,5; 2) 65,2 – 65,7		Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemenkes
Kepulauan Bangka Belitung						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	70,26		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Belitung, Belitung Timur, dan Bangka Selatan (Poin IPKP)	5	50,13		Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.12 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Batu Betumpang	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Bangka Belitung (IPKT)	5	68,60		Kemendesa PDTT
Kepulauan Riau						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,95		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bintan dan Karimun	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bintan dan Karimun (Poin IPKP)	5	71,55		Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kepulauan Riau	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kepulauan Riau (kecamatan)	2	17		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Ranai	5	0,45		KemenKP, Kemendesa PDTT
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,08		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,383		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	105		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	61		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	13286		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	28		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	61		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	2		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,74734		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	2		
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	838.292,5 ha (1.676.585 bidang)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.13 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	87500		
		Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		
		Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	10		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	8		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	46		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	15		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	27		
		Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
Provinsi Aceh						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	82.284		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	107.924		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	14.747		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.14 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
Provinsi Sumatera Utara						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	83.583		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	50.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	135.809		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	73.097		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	6		
Provinsi Sumatera Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	52.655		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	151.012		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.390		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		Kemen ATR/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.15 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	3		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
Provinsi Riau						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	314.267		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	188.159		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	716		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
Provinsi Kepulauan Riau						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.289		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	2.500		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	33.367		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	2.805		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.16 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Jambi						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	311.137		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	25.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	228.945		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	4.400		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	16		
Provinsi Sumatera Selatan						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan	4	8		Kemendagri



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- A.II.17 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		kinerja baik (Tugas dan wewenang)				
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	568.701		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	317.102		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	15.235		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Lampung						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	165.901		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	63.703		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	16.500		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.18 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
Provinsi Bengkulu						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.870		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	17.143		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	6.603		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	44.898		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	53.070		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.215		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.19 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
PP : Pengembangan Wilayah Jawa-Bali	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Jawa-Bali	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Jawa-Bali (persen/tahun)	5	4,8 – 5,5		
		IPM Provinsi di Wilayah Jawa-Bali (min-maks)	5	72,7-82,5		
		Persentase penduduk miskin Wilayah Jawa-Bali (%)	5	7,9		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	7		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	5	2		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)	5	3		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	5	2		
Provinsi DKI Jakarta						
Provinsi Jawa Barat						
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemenhub, Kemenparekraf
Provinsi Jawa Tengah						
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Kendal	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah (nilai)	5	>1		Kemenhub



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.20 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Tengah (nilai)	5	>1		Kemenparekraf, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemendagri
Provinsi DI Yogyakarta						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Borobudur dan Sekitarnya	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi DI Yogyakarta (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemendagri
Provinsi Jawa Timur						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Bromo-Tengger-Semeru	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemendagri
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Banyuwangi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Timur (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf.
Provinsi Banten						
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Tanjung Lesung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Banten (nilai)	5	>1		Kemenhub, BKPM, Kemendagri
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Ujung Kulon-Halimun-Bandung-Pangandaran	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Jawa Barat (nilai)	5	>1		Kemenhub
Provinsi Bali						
ProP: Peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	Terlaksananya peningkatan keberlanjutan DPP Revitalisasi Bali	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Bali (nilai)	5	>1		Kemenparekraf, Kemenhub, Kemen PUPR
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi DKI Jakarta						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan timah	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DKI Jakarta (%)	5			Kemen KP
Provinsi Jawa Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.21 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Barat (%)	5			Kemen KP
Provinsi Jawa Tengah						
ProP : Peningkatan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Peningkatan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Tengah (%)	5			Kemen KP
Provinsi DI Yogyakarta						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi DI Yogyakarta (%)	5			Kemen KP
Provinsi Jawa Timur						
ProP : Peningkatan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kemen KP



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.22 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Jawa Timur (%)	5			Kemen KP
Provinsi Banten						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Banten (%)	5			Kemen KP
Provinsi Bali						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Bali (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Jakarta (Angka perhitungan sementara)	5	59		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Bandung (Angka perhitungan sementara)	5	40,71		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Sukabumi (Angka perhitungan sementara)	5	42,08		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cirebon (Angka perhitungan sementara)	5	43,15		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Semarang (Angka perhitungan sementara)	5	43,06		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Magelang (Angka perhitungan sementara)	5	47,93		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Surakarta (Angka perhitungan sementara)	5	48,9		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.23 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pekalongan (Angka perhitungan sementara)	5	44,41			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tegal (Angka perhitungan sementara)	5	46,08			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Yogyakarta (Angka perhitungan sementara)	5	75,08			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Surabaya (Angka perhitungan sementara)	5	42,34			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kediri (Angka perhitungan sementara)	5	50,19			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Malang (Angka perhitungan sementara)	5	44,68			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Probolinggo (Angka perhitungan sementara)	5	45,56			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pasuruan (Angka perhitungan sementara)	5	43,65			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Batu (Angka perhitungan sementara)	5	46,63			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Maja (Angka perhitungan sementara)	5	29,9			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Cilegon (Angka perhitungan sementara)	5	61,94			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Serang (Angka perhitungan sementara)	5	54,15			
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Denpasar (Angka perhitungan sementara)	5	66,56			
		Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5			4
		Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5			14
Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1				
Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1				
Provinsi DKI Jakarta							
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM.	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.24 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Jawa Barat						
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemendag, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
Provinsi Jawa Tengah						
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM,
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	4		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM,
Provinsi DI Yogyakarta						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemenhub, Kemen ESDM
Provinsi Jawa Timur						
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemenhub, Kemendag, Kemen PUPR, Kemen ESDM.
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	5		Kemenhub, Kemen ESDM
Provinsi Banten						
ProP : Peningkatan Kualitas Wilayah Metropolitan	Meningkatnya kualitas WM di Jawa	Jumlah WM di Jawa yang ditingkatkan kualitasnya (WM)	5	1		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Kota Baru	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemenparekraf
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM,
Provinsi Bali						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	68,68		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.25 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	11.45 - 11.85		
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	61,60		
	Terpilihkannya daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		
Provinsi Jawa Barat						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	69,46		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sukabumi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sukabumi (Poin IPKP)	5	47,18		Kemendesa PDTT
Provinsi Jawa Tengah						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	68,33		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Magelang dan Kendal	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Magelang dan Kendal (Poin IPKP)	5	55,97		Kemendesa PDTT
Provinsi DI Yogyakarta						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	77,03		Kemendesa PDTT, Kemendagri
Provinsi Jawa Timur						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	67,27		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pamekasan dan Banyuwangi	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pamekasan dan Banyuwangi (Poin IPKP)	5	72,26		Kemendesa PDTT
Provinsi Banten						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	63,29		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pandeglang	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pandeglang (Poin IPKP)	5	64,41		Kemendesa PDTT
ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kawasan Pesisir Selat Sunda	Terpilihkannya pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		BNPB
Provinsi Bali						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	74,08		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Buleleng dan Klungkung	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Buleleng dan Klungkung (Poin IPKP)	5	68,20		Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.26 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,36		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,62		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	90		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	47		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	8585,5		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	16		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	47		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	2		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,788971429		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	4		
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	2.333.978 ha (4.667.956 bidang)		
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	1.559.750		
		Jumlah kantor wilayah dan kantor pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital (satker)	5	82		
		Panjang kawasan Hutan yang dilakukan perapatan batas (km)	5	2.422		
		Terbentuk dan operasional lembaga Bank Tanah (lembaga)	5	1		
		Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (provinsi)	5	33		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.27 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
		Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1			
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	9			
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2			
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	28			
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1300%			
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	35			
		Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	2			
		Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kesepakatan teknis)	3	3.059		
		Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5000 (km2)	2	11.300			
		Tersusunnya Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5000 (km2)	2	28.132			
		Terlaksananya Layanan Data Center (Hari)	2	360			
		Terbangunnya Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia (Terabyte)	2	600			
		Provinsi DKI Jakarta					
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Mempercepat kemudahan berusaha di daerah termasuk reformasi pelayanan perizinan yang berbasis sistem informasi digital (e-gov) dengan indikator	Persentase perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (%)	4	1		Kemendagri	
	Meningkatnya kerja sama daerah	Jumlah Daerah yang mengimplementasikan kesepakatan dan perjanjian kerja sama (daerah)	4	12			
	Meningkatnya persentase pencapaian SPM di Daerah	Persentase pencapaian SPM di Daerah (%)	4	0,7428			
	Meningkatnya persentase daerah dengan indeks inovasi tinggi	Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,18			



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.28 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Meningkatnya proporsi pendapatan asli daerah	Jumlah daerah yang penerimaan daerahnya meningkat (daerah)	4	359		
	Meningkatnya kualitas belanja daerah	Jumlah daerah yang realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	210		
	Meningkatnya tata kelola keuangan daerah yang efektif dan efisien	Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	210		
	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		
	Meningkatnya kualitas pelaksanaan kebijakan otonomi (regulasi) pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota negara	Jumlah pelaksanaan kebijakan otonomi pada daerah otonomi khusus, daerah istimewa, dan daerah khusus ibukota (regulasi)	4	5		
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	51.530		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	1.559.750		
	Terwujudnya percepatan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan pertanahan yang modern	Jumlah Layanan Data dan Informasi (satker)	5	82		
	Terwujudnya pemetaan dan perapatan batas kawasan hutan dan non hutan	Panjang Batas Kawasan Hutan dengan APL dalam skala kadastral (km)	5	2.422		
	Terwujudnya operasioanal kelembagaan Bank Tanah	Jumlah Lembaga Bank Tanah (lembaga)	5	1		
	Terwujudnya sosialisasi dan penatausahaan tanah adat/ulayat	Jumlah provinsi yang mendapatkan sosialisasi untuk penetapan peraturan perundangan terkait tanah adat/ulayat (satker)	5	33		
	Terwujudnya percepatan pemenuhan proporsi SDM ideal (PNS Juru Ukur Bidang Pertanahan) dalam mendukung pencapaian target stelsel posirif	Jumlah PNS Juru Ukur Pertanahan (orang)	5	1.500		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	280		
	Tersusunnya data lokasi indikatif pengadaan tanah	Jumlah Data lokasi indikatif pengadaan tanah (satker)	5	495		
	Tersusunnya basis data pengadaan tanah	Jumlah basis data pengadaan tanah (satker)	5	66		
	Terwujudnya percepatan peta Zona Nilai Tanah	Luas Peta Zona Nilai Tanah (ha)	5	3.951.110		
	Terwujudnya percepatan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang	Luas Peta Tematik (ha)	5	2.115.396		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.29 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Jawa Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.527.096		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	629.981		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	42.069		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	7		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	5		
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	767		BIG
	Tersusunnya Data Geospasial Dasar Skala 1:5.000	Jumlah luasan data geospasial dasar skala 1:5.000 yang diakuisisi (km ²)	2	11.300		
	Tersusunnya Data Informasi Geospasial Dasar Skala 1 : 5.000	Cakupan peta RBI skala 1:5.000 (km ²)	2	28.132		
	Terlaksananya Layanan Data Center	Jumlah hari layanan data center beroperasi (Hari)	2	360		
	Terbangunnya Sistem Penyimpanan Pendukung Satu Data Indonesia	Jumlah kapasitas sistem penyimpanan pendukung pelaksanaan kebijakan Satu Data Indonesia yang dibangun (TerraByte)	2	600		
Provinsi Jawa Tengah						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.30 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.516.966		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	706.084		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	145.235		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	5		
ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	771		BIG
Provinsi D.I.Yogyakarta						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	62.038		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	20.371		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	26.510		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
Provinsi Jawa Timur						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.31 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	1.333.558		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	512.197		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	46.245		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	7		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	15		
ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	778		BIG
Provinsi Banten						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	167.010		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	100.974		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	10.450		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.32 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	3		
ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	743		BIG
Provinsi Bali						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanian	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	9.758		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	2.687		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	4.425		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	10		
PP : Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Nusa Tenggara	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Nusa Tenggara (persen/tahun)	5	3,5 - 5,2		
		IPM Provinsi di Wilayah Nusa Tenggara (min-maks)	5	66,3-69,5		
		Persentase penduduk miskin wilayah Nusa Tenggara (%)	5	17,8		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (mohon dilengkapi satuan)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan	5	3		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.33 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	5	2		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	5	1		
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	Telaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Lombok-Mandalika/ KEK Mandalika	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenparekraf, Kemendagri.
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Telaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Nusa Tenggara Timur (nilai)	5	>1		Kemenparekraf, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan tembaga	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan tembaga	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTB (%)	5			Kemen KP
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Telaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.34 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulaperikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi NTT (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Mataram (Angka perhitungan sementara)	5	44,34		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kupang (Angka perhitungan sementara)	5	43,91		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	56,42		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	19.15 - 19.55		
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	51,18		
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kepulauan Nusa Tenggara (IPKT)	5	47,67		
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Nusa Tenggara (kecamatan)	5	38		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Nusa Tenggara (IPKP)	5	0,45		



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
- A.II.35 -

PROGRAM PRIORITAS (PF)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
	Terpulihkannya daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	68,45		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Sumbawa, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Dompu (Poin IPKP)	5	53,08		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tambora dan Labangka	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat	5	56,13		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Barat	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 25,7 – 26,2; 2) 66,7 – 67,2		Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemendikbud, Kemenparekraf
ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Pulau Lombok dan Sekitarnya	Terpulihkannya pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		BNPB, Kemen KUKM, Kemendikbud
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	51,74		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Manggarai Barat, Ngada, dan Sumba Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Manggarai Barat, Ngada, Sumba Timur (Poin IPKP)	5	49,27		Kemendesa PDTT, KKP
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobalima Timur, Ponu, dan Melolo	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (IPKT)	5	42,03		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Nusa	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata	2	4		Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.36 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Nusa Tenggara Timur	Tenggara Timur	kelolanya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (kecamatan)				
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Atambua	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Atambua (IPKP)	5	0,41		KemenUKM, Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenuh
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Kefamenanu	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Kefamenanu (IPKP)	5	0,49		KemenKUKM, Kemendesa PDTT, Kementan, KemenPUPR
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 25,1 – 25,6; 2) 63,2 – 63,7		Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemendikbud, KKP
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,07		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,245		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	22		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	13		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	1202,5		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	8		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	13		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	2		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,69835		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	1		
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	79.005 ha (158.010 Bidang)		
	Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	40.000			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.37 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
Provinsi Nusa Tenggara Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	55.651		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	52.072		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	6.920		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arah Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
Provinsi Nusa Tenggara Timur						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan	4	8		Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.38 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		kinerja baik (Tugas dan wewenang)				
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	102.359		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	40.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	67.645		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	11.550		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
PP : Pembangunan Wilayah Kalimantan	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kalimantan	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Kalimantan (persen/tahun)	5	3,6 - 5,7		
		IPM Provinsi Wilayah Kalimantan (min-maks)	5	69,0-77,7		
		Persentase penduduk miskin wilayah Kalimantan (%)	5	5,6		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (mohon dilengkapi satuan)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		4		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)		2		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan (Jumlah KI)		2		
Provinsi Kalimantan Barat						
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Ketapang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat (nilai)	5	>1		Kemenperin, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemendagri
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Sambas-Singkawang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Barat (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenparekraf



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.39 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Tengah						
ProP : Fasilitasi Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Terfasilitasinya Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Surya Borneo	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Kalimantan Tengah (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenperin, Kemendagri
Provinsi Kalimantan Selatan						
Provinsi Kalimantan Timur						
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Derawan-Berau	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi	5	>1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemenparekraf
Provinsi Kalimantan Utara						
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Kalimantan Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan bauksit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan bauksit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Barat (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kementan



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.40 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen ESDM
ProP: Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kalimantan Selatan						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Selatan (%)	5			Kemen KP
Provinsi Kalimantan Timur						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan karet	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan karet	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen KP



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.41 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Timur (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Utara						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Kalimantan Utara (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Pontianak (Angka perhitungan sementara)	5	45,12		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Singkawang (Angka perhitungan sementara)	5	39,54		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palangkaraya (Angka perhitungan sementara)	5	46,65		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Banjarmasin (Angka perhitungan sementara)	5	38,12		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Ibu Kota Negara (Angka perhitungan sementara)	5	38,54		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Balikpapan (Angka perhitungan sementara)	5	50,88		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Samarinda (Angka perhitungan sementara)	5	47,36		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Tanjung Selor (Angka perhitungan sementara)	5	37,02		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tarakan (Angka perhitungan sementara)	5	47,6		
		Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	6	
Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.42 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		
	Terbangunnya Ibu Kota Negara	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	5	5.600		
	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		
Provinsi Kalimantan Barat						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Tengah						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Selatan						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Terlaksananya penyelesaian ER untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, BPS, Kemen ESDM
	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		
Provinsi Kalimantan Timur						
ProP : Pembangunan Ibu Kota Negara	Terbangunnya Ibu Kota Negara	Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	5	5600		Kemenkeu, Kemen PAN dan RB, Kemen PPN/Bappenas, Kemen ATR/BPN, Kemen PUPR, KLHK, Kemenhub, Kemerkominfo, TNI AD, TNI AL, TNI AU, Mabes TNI
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Kalimantan Utara						
ProP : Pembangunan Kota Baru	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	55,76		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	6.3 - 6.8		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.43 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA	
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	48,46			
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Kalimantan (IPKT)	5	52,59			
		Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Kalimantan (kecamatan)	5			37
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Kalimantan (IPKT)	5	0,42			
Provinsi Kalimantan Barat							
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	52,66		Kemendesa PDTT, Kemendagri	
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang dan Sambas	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kubu Raya, Mempawah, Bengkayang, dan Sambas (Poin IPKP)	5	40,79		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM	
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Rasau Jaya, Gerbang Mas Perkasa, dan Subah	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Barat (IPKT)	5	57,86		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN	
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kalimantan Barat (kecamatan)	2	2		Kemendesa PDTT	
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Paloh Aruk	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Paloh Aruk (IPKP)	5	0,45		Kemendesa PDTT, Kementan, Kemenhub, KemenPUPR	
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jagoi Babang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Jagoi Babang (IPKP)	5	0,34		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM	
Provinsi Kalimantan Tengah							
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	53,84		Kemendesa PDTT, Kemendagri	
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kotawaringin Barat	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Kota Waringin Barat	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Kota Waringin Barat (Poin IPKP)	5	54,68		Kemendesa PDTT	



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.44 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Belantikan Raya, serta Kawasan Transmigrasi Lamunti-Dadahup dan Pulang Pisau yang mendukung pengembangan food estate sesuai direktif presiden dalam rangka penguatan ketahanan pangan nasional	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Tengah (IPKT)	5	24,60		Kemendesa PDTT
Provinsi Kalimantan Selatan						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	59,25		Kemendesa PDTT , Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barito Kuala dan Banjar	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Barito Kuala dan Banjar (Poin IPKP)	5	57,44		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kalimantan Selatan (IPKT)	5	64,57		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
Provinsi Kalimantan Timur						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	58,66		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Berau dan Kutai Timur	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Berau dan Kutai Timur (Poin IPKP)	5	50,63		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kerang dan Maloy Kaliorang	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Timur (IPKT)	5	53,96		Kemendesa PDTT
Provinsi Kalimantan Utara						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	48,86		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Bulungan dan Nunukan	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Kab. Bulungan dan Nunukan (Poin IPKP)	5	47,73		Kemendesa PDTT, KKP, Kemen ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Salim Batu dan Seimenggaris	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Kalimantan Utara	5	51,30		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Kalimantan Utara	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Kalimantan Utara (kecamatan)	2	5		KemendesPDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Nunukan	5	0,38		KemendesPDTT, KKP, Kementan, Kemen ESDM
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Midang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Midang	5	0,38		KemendesPDTT, KemenPUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.45 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tou Lumbis	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Tou Lumbis	5	0,38		KemendesPDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Long Nawang	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN Long Nawang	5	0,60		KemendesPDTT
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,13		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,248		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	42		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	27		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	3189,2		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	9		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	27		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	4		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,727		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	1		
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	214.819,5 ha (429.639 bidang)		
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	180.000		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	6,00		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	25,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.46 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	6,00		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4,00		
Provinsi Kalimantan Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	176.937		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	100.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	469.538		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	14.740		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	3		
Provinsi Kalimantan Tengah						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	101.647		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	232.676		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	8.800		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		Kemen ATR/BPN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.47 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Kalimantan Selatan						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	60.968		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	322.636		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	12.700		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	3		
Provinsi Kalimantan Timur						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	90.087		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	75.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	157.108		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	784		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.48 -

PROGRAM PRIORITAS (PF)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Kalimantan Utara						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan (Catatan : Target dan anggaran Kalimantan Utara bergabung dengan Kalimantan Timur)	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	0		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	0		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	0		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	0		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
PP : Pembangunan Wilayah Sulawesi	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Sulawesi	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Sulawesi (persen/tahun)	5	5,4 - 7,0		
		IPM Provinsi di Wilayah Sulawesi (min-maks)	5	67,0-73,9		
		Persentase penduduk miskin Wilayah Sulawesi (%)	5	9,8		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan (kawasan)	5	7		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)	5	2		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)	5	1		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)	5	3		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan (Jumlah KI)	5	1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.49 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Utara						
ProP : Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	Terlaksananya Percepatan Peningkatan Investasi KEK Bitung	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemendagri
ProP : Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinas Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	Terlaksananya Percepatan Operasionalisasi KEK Likupang/Destinas Pariwisata Prioritas Manado-Likupang	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Utara (nilai)	5	>1		Kemendagri, Kemen PUPR, Kemenhub, BKPM, Kemenparekraf
Provinsi Sulawesi Tengah						
ProP : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI/KEK Palu	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Tengah (nilai)	5	>1		Kemenperin, Kemenhub, Kemendagri
Provinsi Sulawesi Selatan						
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Toraja-Makassar-Selayar	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi Provinsi Sulawesi Selatan (nilai)	5	>1		Kemenhub, Kemenparekraf
Provinsi Sulawesi Tenggara						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Wakatobi	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Sulawesi Tenggara (nilai)	5	>1		Kemenhub, Kemenparekraf, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Sulawesi Utara						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Utara (%)	5			Kemen KP



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.II.50 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tengah						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tengah (%)	5			Kemen KP
Provinsi Sulawesi Selatan						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan garam	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan garam	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Selatan (%)	5			Kemen KP
Provinsi Sulawesi Tenggara						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.51 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Tenggara (%)	5			Kemen KP
Provinsi Gorontalo						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan tebu	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tebu	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Gorontalo (%)	5			Kemen KP
Provinsi Sulawesi Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa sawit	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan budidaya	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Sulawesi Barat (%)	5			Kemen KP



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.52 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Manado (Angka perhitungan sementara)	5	46,94		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palu (Angka perhitungan sementara)	5	44,09		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB WM Makassar (Angka perhitungan sementara)	5	41,39		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Parepare (Angka perhitungan sementara)	5	47,01		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Palopo (Angka perhitungan sementara)	5	40,5		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Kendari (Angka perhitungan sementara)	5	44,61		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Gorontalo (Angka perhitungan sementara)	5	39,1		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Mamuju (Angka perhitungan sementara)	5	33,88		
		Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5		
	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		
Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	2			
Provinsi Sulawesi Utara						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Terlaksananya penyelesaian RTR untuk WM di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan (WM)	5	1		
Provinsi Sulawesi Tengah						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Sulawesi Selatan						
ProP : Pengembangan Wilayah Metropolitan	Berkembangnya Wilayah Metropolitan di luar Jawa	Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan (WM)	5	1		Kemendag, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.53 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tenggara						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM
Provinsi Gorontalo						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Sulawesi Barat						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	60,59		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	12.1 -12.45		
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	51,20		
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Sulawesi (IPKT)	5	54,87		
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Sulawesi (kecamatan)	5	18		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Sulawesi	5	0,44		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
	Terpilihkannya daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.54 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Utara						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	60,37		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Minahasa Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Minahasa Utara (Poin IPKP)	5	61,17		Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Sulawesi Utara	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Sulawesi Utara (kecamatan)	2	5		Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tahuna	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Tahuna (IPKP)	5	0,46		Kemendesa PDTT, Kemenuh
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Melonguane (IPKP)	5	0,42		Kemendesa PDTT, KKP
Provinsi Sulawesi Tengah						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	58,01		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morowali, Buol, dan Poso	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Morowali, Buol, dan Poso (Poin IPKP)	5	46,53		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Palolo, Bungku, Air Terang, Tampolore, Padauloyo, dan Bahari Tomini Raya	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tengah (IPKT)	5	52,41		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah	1) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 15,1 – 15,6; 2) 67,5 – 68,0		Kemendesa PDTT, KKP, Kemensos
ProP : Pemulihan Pasca Bencana Daerah Terdampak di Kota Palu dan Sekitarnya	Terpulihkannya pelayanan publik	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	5	75		BNPB, Kemen KUKM, Kemendikbud, Kemenuh
Provinsi Sulawesi Selatan						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	63,14		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Barru, Pinrang, Luwu Timur, dan Bone (Poin IPKP)	5	51,23		Kemendesa PDTT, Kemen ESDM
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Gilireng, Masamba, dan Mahalona	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Selatan (IPKT)	5	51,56		Kemendesa PDTT



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.55 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Sulawesi Tenggara						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	57,62		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Konawe Selatan, Wakatobi, dan Muna (Poin IPKP)	5	45,85		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tinanggea, Mutiara, dan Asinua/Routa	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Tenggara (IPKT)	5	51,40		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
Provinsi Gorontalo						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	63,48		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Gorontalo, Boalemo, dan Gorontalo Utara (Poin IPKP)	5	53,89		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Sumalata, Paguyaman Pantai, Pawonsari, dan Pulubala	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Gorontalo (IPKT)	5	59,02		Kemendesa PDTT
Provinsi Sulawesi Barat						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	57		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Mamuju dan Mamuju Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Mamuju dan Mamuju Tengah (Poin IPKP)	5	45,61		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Tobadak dan Sarudu Baras	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Sulawesi Barat (IPKT)	5	64,09		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	3,10		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,255		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	59		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	36		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.56 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
Provinsi Sulawesi Utara		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	4867				
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	9				
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	36				
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	5				
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	0,742116667				
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	2				
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	204.548,5 ha (409.097 bidang)				
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	150.000				
		Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1,00				
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	7,00				
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	28,00				
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	9,00				
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	6,00				
		Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1,00				
	Meningkatnya kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah) pendukung industri dan pariwisata	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan (Kesepakatan teknis)	3	1.275,00				
	ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4			8	Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.57 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	48.734		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	46.500		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	5.500		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
ProP : Penyelenggaran Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	443		BIG
Provinsi Sulawesi Tengah						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	87.317		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	100.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	126.999		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	11.911		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.II.58 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Sulawesi Selatan						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	127.721		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	50.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	129.075		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	53.295		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	3		
	Terlaksananya gelar perkara kasus dengan berkas lengkap	Jumlah Gelar Perkara Kasus dengan status Berkas Lengkap (kasus)	2	1		
ProP : Penyelenggaran Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	504		BIG
Provinsi Sulawesi Tenggara						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	69.244		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	102.143		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	15.620		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

– A.II.59 –

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	5		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
ProP : Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Tercapainya jumlah Kesepakatan Teknis Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan	Jumlah kesepakatan teknis batas wilayah administrasi desa/kelurahan yang dihasilkan (Kesepakatan teknis)	3	328		BIG
Provinsi Gorontalo						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	37.981		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	27.723		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	3.410		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Perpres RTR KSN	Jumlah RPerpres RTR KSN (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Provinsi Sulawesi Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.60 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	38.100		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	23.759		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	22.240		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/ Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
PP : Pembangunan Wilayah Maluku	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Maluku	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Maluku (persen/tahun)	5	5,2 - 6,2		
		IPM Provinsi di Wilayah Maluku (min-maks)	5	69,9-70,5		
		Persentase penduduk miskin wilayah Maluku (%)	5	12,8		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan		3		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)		1		
		-KEK berbasis pariwisata dan industri (kawasan)		1		
		-KI Prioritas dan KI pengembangan (Jumlah KI)		1		
Provinsi Maluku Utara						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Morotai	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Maluku Utara (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenparekraf, Kemendagri
ProP : Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Terlaksananya Fasilitas Realisasi Investasi dan Pembangunan KI Teluk Weda	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Maluku Utara (nilai)	5	>1		Kemenperin, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Maluku						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.61 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku (%)	5			Kemen KP
Provinsi Maluku Utara						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kelapa	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kelapa	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemen KP
ProP : Pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan budidaya perikanan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Maluku Utara (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ambon (Angka perhitungan sementara)	5	62,27		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Tual (Angka perhitungan sementara)	5	44,3		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Ternate (Angka perhitungan sementara)	5	44,7		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sofifi (Angka perhitungan sementara)	5	37,91		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	3		
	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		
Provinsi Maluku						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	2		Kemen ESDM
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Kota Baru	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemen PUPR
Provinsi Maluku Utara						
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Terbangunnya desa terpadu, kawasan perdesaan, dan kawasan transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	51,74		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	15.75 - 16.00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.62 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	54,35		
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Kepulauan Maluku (IPKT)	5	32,42		
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Kepulauan Maluku (kecamatan)	5	34		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN di Kepulauan Maluku (IPKP)	5	0,47		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
Provinsi Maluku						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	50		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Maluku Tengah	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Maluku Tengah (Poin IPKP)	5	50,00		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Kobisonta	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku	5	40,51		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Maluku	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Maluku (kecamatan)	2	4		-
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Saumlaki	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Saumlaki (IPKP)	5	0,45		Kemen KP
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Maluku	1) Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 22,2 - 22,7; 2) 64,6 - 65,1		Kemendesa PDTT, Kemensos, KKP, Kemen PUPR
Provinsi Maluku Utara						
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	52		Kemendesa PDTT, Kemendagri



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.II.63 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pulau Morotai	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Pulau Morotai (Poin IPKP)	5	58,70		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Pulau Mangoli dan Pulau Morotai	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Maluku Utara (IPKT)	5	28,38		Kemendesa PDTT, Kemen ATR/BPN
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Daruba	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Daruba (IPKP)	5	0,48		Kemendesa PDTT, KemenPUPR
ProP : Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal di Provinsi Maluku Utara	1) Persentase Penduduk miskin di daerah tertinggal (%) 2) Rata-rata IPM di daerah tertinggal	5	1) 6,9 – 7,4; 2) 62,9 – 63,4		Kemendesa PDTT, Kemensos, Kemen KUKM
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,89		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	18		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	16		
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	10		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	1283,9		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	72		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	10		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4	1		
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	34.215,5 ha (68.431 bidang)		
Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	4			



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.64 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	7		
Provinsi Maluku						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	26.336		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	44.809		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	5.642		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	7		
Provinsi Maluku Utara						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	42.095		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	26.092		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.487		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		Kemen ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.65 -

PROGRAM PRIORITAS (PF)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	2		
PP : Pengembangan Wilayah Papua	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Wilayah Papua	Laju pertumbuhan PDRB Wilayah Papua (persen/tahun)	5	2,6 - 5,8		
		IPM Provinsi di Wilayah Papua (min-maks)	5	61,1-65,4		
		Persentase penduduk miskin Wilayah Papua (%)	5	25,5		
KP : Pengembangan Kawasan Strategis	Berkembangnya Kawasan Strategis	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi wilayah (nilai)	5	>1		
		Jumlah Kawasan pusat pertumbuhan yang difasilitasi dan dikembangkan (kawasan)		2		
		-Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) (jumlah destinasi)		1		
		-Destinasi Pariwisata (jumlah destinasi)		1		
Provinsi Papua						
ProP : Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	Terlaksananya Pembangunan Destinasi Pariwisata Pengembangan Biak-Teluk Cenderawasih	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemenparekraf
Provinsi Papua Barat						
ProP : Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	Terlaksananya Perbaikan Aksesibilitas, Atraksi dan Amenitas Destinasi Pariwisata Prioritas Raja Ampat	Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/DPP/kawasan yang ditetapkan) terhadap pertumbuhan investasi provinsi Papua Barat (nilai)	5	>1		Kemen PUPR, Kemendag, Kemenhub, Kemenparekraf, Kemendagri
KP : Pengembangan Sektor Unggulan	Berkembangnya Sektor Unggulan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun (%)	5			
Provinsi Papua						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kopi	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kopi	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kementan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.66 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemen KP
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan emas	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan emas	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan Tembaga	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan tembaga	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua (%)	5			Kemen ESDM
Provinsi Papua Barat						
ProP : Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat (%)	5			Kementan
ProP : Pengembangan komoditas unggulan kakao	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan kakao	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat (%)	5			Kementan
ProP : Optimalisasi komoditas unggulan pertambangan	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan pertambangan	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat (%)	5			Kemen ESDM
ProP : Pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Terlaksananya pengembangan komoditas unggulan perikanan tangkap	Persentase peningkatan produksi komoditas unggulan per tahun Provinsi Papua Barat (%)	5			Kemen KP
KP : Pengembangan Kawasan Perkotaan	Berkembangnya Kawasan Perkotaan	Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Jayapura (Angka perhitungan sementara)	5	44,25		
		Skor Indeks Kota Berkelanjutan/IKB Kota Baru Sorong (Angka perhitungan sementara)	5	37,83		
	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		
	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		
Provinsi Papua						
ProP : Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	Berkembangnya Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil sebagai PKN/PKW	Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yang dikembangkan sebagai PKN/PKW (kota)	5	1		Kemen PUPR, Kemen ESDM
Provinsi Papua Barat						
ProP : Pembangunan Kota Baru	Terbangunnya Kota Baru	Jumlah Kota Baru yang dibangun (kota)	5	1		Kemen ESDM, Kemenhub
KP : Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Berkembangnya Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Peningkatan Status Pembangunan Desa menjadi Berkembang dan Mandiri (Peningkatan Nilai Indeks Desa)	5	33,14		
		Penurunan Angka Kemiskinan Desa (%)	5	34.45 - 34.75		
		Rata-rata nilai indeks perkembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (Poin IPKP)	5	39,62		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.67 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Pulau Papua (IPKT)	5	34,59		
	Berkembangnya pusat kegiatan strategis nasional (PKSN), lokasi prioritas perbatasan, dan daerah tertinggal	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Pulau Papua (kecamatan)	5	39		
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP) PKSN di Pulau Papua	5	0,49		
		Jumlah Daerah Tertinggal (Kabupaten) *alokasi masih merupakan total di seluruh Wilayah Adat di Provinsi Papua (belum spesifik pada daerah tertinggal mengingat tidak semua kabupaten dalam Wilayah Adat merupakan daerah tertinggal)	5	Jumlah daerah tertinggal tahun 2021 tidak dapat ditentukan karena evaluasi dan penetapan daerah tertinggal dilakukan 5 tahun sekali, atau pada akhir RPJMN (sesuai PP No. 78 Tahun 2014)		
Provinsi Papua						
ProP : Wilayah Adat Papua: Laa Pago	Meningkatnya IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	Rata-rata IPM di 10 Kabupaten: Kab. Pegunungan Bintang, Yahukimo, Yalimo, Jayawijaya, Nduga, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Puncak Jaya, Puncak	5	48,40		Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, Kementan, Kemenperin, Kemenkes, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
ProP : Wilayah Adat Papua : Mee Pago	Meningkatnya IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	Rata-rata IPM di 6 Kabupaten: Kab. Nabire, Kab. Dogiyai, Kab. Paniai Kab. Deiyai, Kab. Mimika, Kab. Intan Jaya	5	59,30		Kemendesa PDTT, KKP, Kementan, Kemenhub, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Wilayah Adat Papua : Saireri	Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Waropen, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, Supiori	5	68,10		KKP, Kemen PUPR, Kemen ESDM
ProP : Wilayah Adat Papua : Tabi	Meningkatnya IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	Rata-rata IPM di 5 Kabupaten/Kota: Kab. Mamberamo Raya, Sarmi, Jayapura, Keerom, Kota Jayapura	5	67,60		Kemendesa PDTT, Kementan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
ProP : Wilayah Adat Papua : Anim Ha	Meningkatnya IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	Rata-rata IPM di 4 Kabupaten: Kab. Merauke, Boven Digoel, Mappi, Asmat	5	61,00		Kemendesa PDTT, Kementan, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.II.68 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pembangunan Desa Terpadu	Terlaksananya Pembangunan Desa Terpadu	Peningkatan Rata-Rata Indeks Desa (poin Indeks Desa)	2	31		Kemendesa PDTT, Kemendagri
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Jayapura dan Merauke	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Jayapura dan Merauke (Poin IPKP)	5	41,91		Kemendesa PDTT, KKP
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Senggi, Salor, dan Muting	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua	5	37,08		Kemendesa PDTT
ProP : Peningkatan Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	Meningkatnya Kesejahteraan dan Tata Kelola di Kecamatan Lokasi Prioritas di Provinsi Papua	Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya di Prov Papua (kecamatan)	2	11		Kemendesa PDTT
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Jayapura	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Jayapura (IPKP)	5	0,39		Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, Kementan, KemenPUPR
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Merauke (IPKP)	5	0,58		Kemendesa PDTT, KKP, Kementan
ProP : Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	Berkembangnya Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Tanah Merah	Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan PKSN Tanah Merah (IPKP)	5	0,51		Kemendesa PDTT, Kemenhub
Provinsi Papua Barat						
ProP : Wilayah Adat Papua : Domberay	Meningkatnya IPM di 11 Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	Rata-rata IPM di 11 Kabupaten/Kota: Kab. Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Manokwari, Sorong Selatan, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Maybrat, Manokwari Selatan, Pegunungan Arfak, Kota Sorong	5	63,30		Kemendesa PDTT, Kemen KUKM, Kementan, Kemenperin, Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
ProP : Wilayah Adat Papua : Bomberay	Meningkatnya IPM di 2 Kabupaten/Kota: Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	Rata-rata IPM di 2 Kabupaten/Kota: Kab. Kaimana, Kab. Fak-Fak	5	67,00		Kemen PUPR, Kemenhub, Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	Terlaksananya Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Raja Ampat dan Manokwari	Indeks Pembangunan Kawasan Perdesaan Raja Ampat dan Manokwari (Poin IPKP)	5	37,33		Kemendesa PDTT
ProP : Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Weriangi Werabur dan Bomberay - Tomage	Terlaksananya Revitalisasi Kawasan Transmigrasi Weriangi Werabur dan Bomberay - Tomage	Rata-Rata Nilai Indeks Perkembangan Kawasan Transmigrasi yang Direvitalisasi di Provinsi Papua Barat (IPKT)	5	30,86		Kemendesa PDTT
KP : Kelembagaan dan Keuangan Daerah	Terlaksananya peningkatan kapasitas kelembagaan dan aparatur serta keuangan bagi pemerintahan daerah	Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	4	2,42		
		Persentase daerah yang mempunyai nilai indeks inovasi tinggi (%)	4	0,18		
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerah meningkat (daerah)	4	25		



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**

- A.II.69 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjanya berkualitas (daerah)	4	16		
		Jumlah perizinan yang kewenangannya sudah didelegasikan ke PTSP Prima berbasis elektronik (izin)	4	979		
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasis elektronik (daerah)	4	2		
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (daerah)	4	-		
		Jumlah daerah yang mengimplementasikan Kesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah (daerah)	4	0,66675		
		Persentase capaian SPM di daerah (%)	4	16		
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja GWPP kategori baik (daerah)	4			
	Meningkatnya pelayanan pertanahan dan terselenggarakannya penataan ruang	Luas cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan memiliki georeferensi yang baik (ha)	5	38.971		
		Luas cakupan peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
		Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	3		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
		Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	6		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
		Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	7		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.II.70 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
Provinsi Papua						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	8.179		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan penyediaan peta dasar pertanahan	Luas peta dasar pertanahan (ha)	5	5.000		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	22.179		
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	4.950		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya Rancangan Perpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara	Jumlah RPerpres RDTR Kawasan Perbatasan Negara (Materi Teknis dan Raperpres)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	2		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	4		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahan Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	6		
Provinsi Papua Barat						
ProP : Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan hubungan pusat-daerah	Peningkatan penataan hubungan pusat daerah	Jumlah tugas dan wewenang yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dengan kinerja baik (Tugas dan wewenang)	4	8		Kemendagri
ProP : Pengelolaan dan pelayanan pertanahan	Terwujudnya percepatan sertifikasi tanah	Jumlah sertipikat Hak Atas Tanah (bidang)	5	30.792		Kemen ATR/BPN
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah dan ruang	Jumlah Bidang Tanah (bidang)	5	37.772		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.II.71 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Terwujudnya percepatan peta bidang tanah K4	Jumlah Bidang Tanah K4 (bidang)	5	1.797		
ProP : Penyelenggaraan Penataan Ruang	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Peninjauan Kembali/Penyusunan RTRW Daerah	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RTRW (Materi Teknis dan Raperda RTRW)	2	1		Kemen ATR/BPN
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bimbingan Teknis Penyusunan RDTR	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	3		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan Materi Teknis RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	2		
	Tersusunnya materi teknis yang dihasilkan dari Bantuan Teknis Penyusunan RDTR Kawasan Tematik Arahana Prioritas Nasional (KI/KEK/KSPN/KPPN)	Jumlah materi teknis dan Rancangan Perda RDTR (Materi Teknis dan Raperda RDTR)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RTRW Provinsi/Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
	Terlaksananya Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan dan pendampingan Persetujuan Substansi Teknis RRTR/RDTR Kabupaten/Kota (Persetujuan Substansi)	2	1		
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendetilan proyek:						
Dukungan pengembangan kewilayahan						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetilan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstitusi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA
- A.III.1 -

PRIORITAS NASIONAL : MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA BERKUALITAS DAN BERDAYA SAING

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN: Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing					257.316.816,0	
PP : Perlindungan Sosial Dan Tata Kelola Kependudukan	Meningkatnya cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan menguatnya sistem pemutakhiran data kependudukan	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	4	70		
		Persentase provinsi/ kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	4	40		
		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	4	60		
		Persentase kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun (%)	1	95		
KP : Percepatan Cakupan Administrasi Kependudukan	Meningkatnya percepatan cakupan administrasi kependudukan	Jumlah pedoman teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bagi Penduduk rentan Administrasi Kependudukan dan kelompok khusus yang disusun untuk mempercepat cakupan administrasi kependudukan (dokumen pedoman teknis)	4	1		
ProP : Perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	Terlaksananya perluasan jangkauan layanan administrasi kependudukan	Jumlah inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan Reformasi Birokrasi di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil (inovasi)	4	1028		Kemendagri
ProP : Percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	Terlaksananya percepatan kepemilikan dokumen pendataan penduduk dan pencatatan sipil bagi kelompok khusus	Jumlah daerah yang tertangani dalam kegiatan afirmatif (daerah)	4	50		Kemendagri
KP : Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Menguatnya Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan	Jumlah Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) yang dikembangkan dan diintegrasikan (sistem)	4	1		
ProP : Penguatan integrasi data administrasi kependudukan	Menguatnya integrasi data administrasi kependudukan	Jumlah lembaga pengguna yang menandatangani kerjasama pemanfaatan data kependudukan nasional untuk pelayanan publik (lembaga pengguna)	4	2.500		Kemendagri
ProP : Pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	Terlaksananya pengembangan data dan informasi kependudukan (statistik hayati) yang akurat, lengkap dan tepat waktu	Jumlah <i>database</i> kependudukan yang update (<i>database</i>)	4	1		Kemendagri, BPS, BKKBN



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.III.2 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Pendampingan dan Layanan Terpadu	Terlaksananya Pendampingan dan Layanan Terpadu	Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	4	70		
		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	4	60		
		Persentase Provinsi/kab/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan movev unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	4	40		
ProP : Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Terlaksananya Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu	Jumlah Kabupaten/ Kota yang mengembangkan SLRT (Kabupaten/Kota)	4	300		Kemensos
ProP : Penguatan pendampingan masyarakat	Terwujudnya penguatan pendampingan masyarakat	Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitas dan kemampuannya (orang)	1	40.201		Kemensos
KP: Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk	Indeks kepedulian terhadap Isu Kependudukan (nilai)	4	52		
ProP: Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Meningkatnya sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang	Persentase Pemerintah Daerah yang mempergunakan GDPK sebagai salah satu dasar perencanaan pembangunan daerah (%)	4	45		BKKBN
ProP : Penguatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	Menguatnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan kependudukan	Persentase Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang telah mendapatkan pengetahuan pengelolaan kependudukan (%)	4	90		BKKBN
ProP : Pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Meningkatnya pemanfaatan data dan informasi kependudukan	Persentase Pemerintah Daerah Provinsi, Kab/Kota yang melaksanakan dan memanfaatkan analisis kependudukan dan informasi kependudukan (%)	4	25		BKKBN
PP : Penguatan Pelaksanaan Perlindungan Sosial	Menguatnya pelaksanaan perlindungan sosial dalam menjangkau penduduk miskin dan kelompok rentan	Persentase cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)(%)	4	85		
		Tingkat kemiskinan penduduk penyandang disabilitas (%)	1	14,7		
		Tingkat kemiskinan penduduk lanjut usia (%)	1	11		
		Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	4	5		
		Persentase cakupan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan (%)	1	33,88		
		Pekerja formal (%)	1	29,44		
		Pekerja informal (%)	1	4,44		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.III.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Sistem jaminan sosial nasional	Terwujudnya sistem jaminan sosial nasional	Jumlah dokumen rancangan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi terpadu Sistem Jaminan Sosial Nasional (dokumen)	1	1		
ProP : Pengembangan program jaminan sosial	Terlaksananya pengembangan program jaminan sosial	Jumlah dokumen kajian Kebutuhan Dasar Kesehatan dan Kelas Perawatan Standar (dokumen)	1	1		Kemendes
ProP : Penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	Terwujudnya penguatan kelembagaan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional	Jumlah kajian atau naskah akademik harmonisasi peraturan perundangan terkait hubungan antar kelembagaan Sistem Jaminan Sosial Nasional, pengelolaan aset dana jaminan sosial, dan tata kelola BPJS (dokumen kajian atau naskah akademis)	1	1		Kemendagri
KP : Bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Tersalurkannya bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran	Penyaluran Bantuan keluarga untuk kesehatan dan pendidikan (Keluarga Penerima Manfaat)	1	10.000.000		
		Penyaluran Bantuan Pangan melalui Kartu Sembako Murah (Keluarga Penerima Manfaat)	5	15.600.000		
		Penyaluran Bantuan LPG 3 KG (Keluarga Penerima Manfaat)	5	31.400.000		
		Penyaluran Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA (Keluarga Penerima Manfaat)	2	31.400.000		
ProP : Penyelenggaraan Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Terselenggaranya Bantuan dan Subsidi Tepat Sasaran	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial tepat sasaran (Keluarga Penerima Manfaat)	4	15.600.000		Kemensos
KP : Perlindungan sosial adaptif	Tersusunnya Sistem Perlindungan Sosial Adaptif	Penduduk yang memperoleh bantuan sosial bencana dan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana (jiwa)	1	578.500		
ProP : Pelaksanaan Perlindungan Sosial yang Adaptif	Terlaksananya bantuan sosial untuk perlindungan korban bencana	Penduduk terdampak bencana yang memperoleh bantuan sosial (jiwa)	1	284.500		Kemensos
KP : Kesejahteraan Sosial	Terwujudnya Kesejahteraan Sosial	Presentase lanjut usia yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (%)	1	21.70		
		Presentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (%)	1	16.62		
ProP : Penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	Terwujudnya penguatan kelembagaan dan pemberdayaan kelanjutusiaan (lansia aktif dan produktif)	Jumlah Lanjut Usia yang memperoleh pelayanan sosial tingkat lanjut (jiwa)	1	140		Kemensos, BKKBN
ProP : Pelaksanaan Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long-term Care</i>)	Terlaksananya Perawatan Jangka Panjang berbasis komunitas yang terintegrasi (<i>Long-term Care</i>)	Jumlah lansia yang memperoleh layanan berbasis komunitas (jiwa)	1	59,5		BKKBN, Kemensos
ProP : Penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya	Terwujudnya penguatan pelayanan sosial kelompok rentan lainnya	Jumlah penduduk rentan yang memperoleh bantuan kesejahteraan sosial (jiwa)	1	367.500		Kemensos



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.III.4 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Peningkatan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Meningkatnya pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan melakukan reformasi sistem kesehatan	Angka kematian bayi (AKB) (per 1.000 kelahiran hidup)	1	19,5		
		Angka kematian neonatal (per 1.000 kelahiran hidup)	1	12,2		
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalance Rate (mCPR)	1	62,16		
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) (%)	1	8,3		
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun/Age Specific Fertility Rate (ASFR 15-19) (kelahiran hidup per 1000 perempuan)	1	24		
		Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	1	7,8		
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	1	0,21		
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria (kabupaten/kota)	1	345		
		Jumlah kabupaten/kota sehat (kabupaten/kota)	1	280		
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	1	78		
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	1	80		
		Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	1	90		
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	1	59		
		Persentase obat memenuhi syarat (%)	1	83,6		
Persentase makanan memenuhi syarat (%)	1	80				
KP : Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Meningkatnya kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 bulan (Kabupaten/Kota)	1	431		
		Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (%)	1	25,93		
ProP : Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Terwujudnya Penurunan Kematian Ibu dan Bayi	Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan (%)	1	89		Kemenkes, BKKBN
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap (%)	1	100		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.III.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan KB dan Kesehatan Reproduksi	Meningkatnya KB dan Kesehatan Reproduksi	Persentase tingkat putus pakai pemakaian kontrasepsi (Drop out/DO) (%)	1	24,5		Kemenkes, BKKBN
KP : Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Terlaksananya Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan mendapat ASI eksklusif (%)	1	45		
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronis (KEK) (%)	1	14,5		
ProP : Penurunan Stunting	Terwujudnya penurunan stunting	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan surveilans gizi (%)	1	70		Kemendagri, Kemenkes, Kemen KP, Kemen PPPA, BPOM, BKKBN
KP : Peningkatan Pengendalian Penyakit	Meningkatnya Pengendalian Penyakit	Persentase Orang Dengan HIV-AIDS yang menjalani Terapi ARV (ODHA on ART) (%)	1	45		
		Persentase angka keberhasilan pengobatan TBC (TBC Success Rate) (%)	1	90		
		Persentase kabupaten/kota dengan ketersediaan obat program malaria yang disediakan (%)	2	100		
		Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi kusta (kabupaten/kota)	1	416		
		Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis yang mencapai eliminasi (kabupaten/kota)	1	80		
		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) (kabupaten/kota)	1	52		
		Jumlah kabupaten/kota yang menerapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) (kabupaten/kota)	1	324		
ProP : Pengendalian Penyakit Menular	Terkendalinya penyakit menular	Persentase ODHA baru ditemukan yang memulai pengobatan ARV (%)	1	80		Kemenkes
		Persentase cakupan penemuan dan pengobatan TBC (TBC Treatment Coverage (%))	1	85		
		Jumlah kabupaten/kota yang mencapai API <1/1.000 penduduk (kabupaten/kota)	1	475		
		Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan deteksi dini Hepatitis B dan C pada populasi berisiko (%)	1	90		
		Proporsi kasus kusta baru tanpa cacat (%)	1	88		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.III.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah kabupaten/kota endemis filariasis berhasil menurunkan angka mikrofilaria <1% (kabupaten/kota)	1	190		
		Jumlah desa endemis schistosomiasis yang mencapai eliminasi (desa)	1	15		
ProP : Pengendalian Penyakit Tidak Menular	Terkendalinya penyakit tidak menular	Jumlah kabupaten/kota yg melakukan pelayanan terpadu (Pandu) PTM di ≥ 80% puskesmas (kabupaten/kota)	1	205		Kemenkes, BPOM
		Jumlah kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini faktor risiko PTM ≥ 80% (kabupaten/kota)	1	129		
KP : Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	Terlaksananya Penguatan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat(Germas)	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan Germas (%)	4	35		
ProP : Pengembangan Lingkungan Sehat	Terlaksananya Pengembangan Lingkungan Sehat	Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang air besar Sembarangan (SBS) (%)	1	50		Kemenkes, BPOM
ProP : Penguatan Promosi Germas	Terlaksananya Penguatan Promosi Germas	Persentase kabupaten/kota dengan minimal 80% posyandu aktif (%)	4	35		Kemenkes, Kemenkeu
KP : Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Menguatnya Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	2	0		
		Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya (%)	2	75		
		Jumlah kabupaten/kota yang telah melakukan perbaikan tata kelola pembangunan kesehatan (%)	4	35		
		Persentase puskesmas dengan obat esensial (%)	1	90		
		Persentase RS milik pemerintah daerah yang memenuhi sarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (%)	2	85		
		Persentase FKTP yang memenuhi sarana, prasarana dan alat (SPA) sesuai standar (%)	2	83		
		Persentase alat kesehatan memenuhi syarat (%)	2	92		
ProP : Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Terlaksananya Penguatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKTP)	2	4.009		Kemenkes
		Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan rujukan yang memenuhi persyaratan survei akreditasi (FKRTL)	2	851		
		Jumlah rencana induk nasional pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan (rencana)	2	1		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Terlaksananya Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara tim (Orang)	1	1.493		Kemenkes
		Jumlah kumulatif penempatan baru dan pemulangan tenaga kesehatan pada penugasan khusus secara individu (Orang)	1	4.324		
		Jumlah lulusan pendidikan dokter spesialis yang didayagunakan (Orang)	1	660		
		Jumlah dokter penerima bantuan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS)/Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis (PPDGS)	1	2.100		
ProP : Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Terlaksananya Pemenuhan dan Peningkatan Daya Saing Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan	Jumlah instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar (kabupaten/ kota)	2	264		Kemenkes, BPOM
		Persentase produk alat kesehatan (alkes) dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT) yang diuji dan memenuhi syarat (%)	2	90		
ProP : Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dalam Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK) (Aplikasi)	4	25		Kemenkes
ProP : Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Terlaksananya Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan	Jumlah SDM pengawas obat dan makanan yang tersertifikasi sesuai standar (SDM Pengawas)	2	83,6		BPOM
PP : Peningkatan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	Meningkatnya pemerataan layanan pendidikan berkualitas	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 persen termiskin dan 20 persen terkaya (rasio)				
		a. SMA/SMK/MA Sederajat	1	0,74		
		b. Pendidikan Tinggi	1	0,2		
		Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam tes PISA (%):				
		a. Membaca	1	33		
		b. Matematika	1	30		
		c. Sains	1	42,6		
		Proporsi anak di atas batas kompetensi minimal dalam asesmen kompetensi (%)				
		a. Literasi	1	58,2		
b. Numerasi	1	27,4				



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.8 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Tingkat penyelesaian pendidikan (%)				
		a. SD/MI/ sederajat	1	93,25		
		b. SMP/MTs/ sederajat	1	86,53		
		c. SMA/SMK/MA/ sederajat	1	68,69		
		Persentase anak kelas 1 SD/MI/ SDLB yang pernah mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (%)	1	68,06		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi (PT) (%)	1	34,56		
KP : Peningkatan Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Meningkatnya Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran	Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Test AKSI (%):				
		a. Membaca	1	58,2		
		b. Matematika	1	27,4		
		c. Sains	1	31,4		
		Persentase Guru (TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB) yang Bersertifikat Pendidik (%)	1	91,05		
ProP : Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	Terlaksananya Penerapan Kurikulum dan Pola Pembelajaran Inovatif	Jumlah model kurikulum yang dikembangkan untuk peningkatan mutu pendidikan (model kurikulum)	1	9		Kemendikbud, Kemenag
		Jumlah model pembelajaran inovatif yang sesuai dengan kurikulum dan berbasis hasil asesmen (model pembelajaran)	1	72		
ProP : Peningkatan Kompetensi Pendidik	Meningkatnya Kompetensi Pendidik	Persentase guru dan tenaga kependidikan profesional (%)	1	48,33		Kemendikbud, Kemenag
ProP : Penguatan Kualitas Penilaian Pendidikan	Menguatnya Kualitas Penilaian Pendidikan	Persentase satuan pendidikan yang menggunakan hasil asesmen yang terstandar untuk perbaikan pembelajaran (%)	1	50		Kemendikbud, Kemenag
ProP : Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Terwujudnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi	Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK (%)	2	2,79		Kemendikbud, LPP RRI, LPP TVRI
ProP : Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	Terwujudnya Integrasi Softskill dalam Pembelajaran	Persentase perangkat/model pembelajaran yang berkualitas yang digunakan satuan pendidikan dalam proses pembelajaran (%)	1	100		Kemendikbud
KP : Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Terwujudnya Pemerataan Akses dan Wajib Belajar 12 Tahun	Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di Perguruan Tinggi (rasio)	1	105,5		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/SDLB/ Sederajat (%)	1	104,48		
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/SMPLB/ Sederajat (%)	1	94,34		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.9 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA / SMK / MA / SMLB / Sederajat (%)	1	88.39		
ProP : Sarana dan Prasarana Pendidikan	Terwujudnya Sarana dan Prasarana Pendidikan	Jumlah lembaga/satuan pendidikan yang ditingkatkan kualitas sarana prasarananya (Lembaga)	2	35.603		Kemendikbud, Kemenag, Kemen PUPR
ProP : Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	Terlaksananya Bantuan Pendidikan Bagi Anak Kurang Mampu, Daerah Afirmasi, dan Berbakat	Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran (%)	1	100		Kemenag, Kemenkeu, Kemendikbud
ProP : Penanganan Anak Tidak Sekolah	Terlaksananya Penanganan Anak Tidak Sekolah	Jumlah kab/kota dengan APK SD/MI/SDI-B sekurang kurangnya 100% (Kab/Kota)	1	391		Kemendikbud
		Jumlah kab/kota dengan APK SMP/MTs/SMPLB sekurang kurangnya 100% (Kab/Kota)	1	317		
		Jumlah kab/kota dengan APK SMA/MA/SMLB sekurang kurangnya 95% (Kab/Kota)	1	219		
ProP : Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Terlaksananya Penguatan Pelayanan 1 Tahun Prasekolah	Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan (%)	1	64,7		Kemendikbud, Kemenag
KP : Peningkatan Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Pengelolaan dan Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (%)	1	13,53		
ProP : Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Terlaksananya Pendidikan Profesi Guru dan Peningkatan Kualifikasi Pendidik	Persentase guru dan tenaga kependidikan bersertifikat pendidik (%)	1	91,05		Kemendikbud, Kemenag
		Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1 (%)	1	89,20		
ProP : Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	Terlaksananya Pemenuhan dan Distribusi Tenaga Pendidik Berbasis Kebutuhan	Jumlah satuan PAUD yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Satuan Pendidikan)	1	2.266		Kemendikbud, Kemenag
		Jumlah satuan Dikdas yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Satuan Pendidikan)	1	6.797		
		Jumlah satuan Dikmen yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Satuan Pendidikan)	1	6.117		
ProP : Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	Terlaksananya Peningkatan Kesejahteraan Pendidik Berbasis Kinerja	Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif (orang)	1	834.803		Kemendikbud, Kemenag



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.10 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penjaminan Mutu Pendidikan	Terwujudnya Mutu Pendidikan	Persentase satuan pendidikan berakreditasi minimal B (%):	1			
		a. SD/MI	1	81,19		
		b. SMP/MTS	1	76,01		
		c. SMA/MA	1	74,53		
		Perguruan Tinggi Terakreditasi A (PT)	1	160		
ProP : Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Akselerasi Akreditasi	Jumlah Satuan Pendidikan yang diakreditasi sesuai SNP (sekolah/madrasah)	1	57.490		Kemendikbud, Kemenag
ProP : Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	Terwujudnya Perluasan Budaya Mutu Pendidikan	Jumlah SNP yang dikembangkan untuk penyusunan kebijakan peningkatan mutu pendidikan (Dokumen)	1	8		Kemendikbud, Kemenag
KP : Peningkatan Tata Kelola Pendidikan	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan	Persentase kab/kota memenuhi SPM pendidikan (%)	1	100		
ProP : Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	Terlaksananya Penguatan Tata Kelola Pemenuhan SPM Pendidikan	Jumlah provinsi memenuhi SPM Pendidikan (Provinsi)	4	34		Kemendagri, Kemendikbud, Kemenag
ProP : Penguatan Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Menguatnya Strategi Pembiayaan dan Efektivitas Pemanfaatan Anggaran Pendidikan	Jumlah PTN yang Mendapatkan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi (Lembaga)	4	243		Kemendikbud, Kemenag
ProP : Peningkatan Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	Meningkatnya Sinkronisasi Data Pokok Pendidikan	Persentase pedayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan (%)	4	68,8		Kemendikbud, Kemenag
ProP : Sinkronisasi Pelaksanaan PAUD-HI	Terwujudnya Sinkronasi Pelaksanaan PAUD-HI	Persentase satuan PAUD yang menyelenggarakan layanan Holistik Integratif (%)	4	25		Kemendikbud
PP : Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan Dan Pemuda	Meningkatnya perlindungan anak dan perempuan dari berbagai tindak kekerasan, pemberdayaan perempuan, serta partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial masyarakat, organisasi dan berwirausaha	Persentase perempuan umur 20-24 tahun yang menikah sebelum 18 tahun (%)	1	9,80		
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	1	Menurun		
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (nilai)	1	73,5		
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan (%)	1	53,13		
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	1	Menurun		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.11 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan white collar (%)	1	0,39		
KP : Pemenuhan hak dan Perlindungan Anak	Terpenuhinya Hak dan Perlindungan Anak	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (nilai)	1	76,13		
		Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) (nilai)	1	65,79		
ProP : Penjaminan pemenuhan hak anak secara universal	Terjaminnya pemenuhan hak anak secara universal	Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak (%)	1	3,59		Kemendagri, Kemenkumham, Kemen PPPA
		Jumlah Provinsi/Kab/Kota yang memperoleh peringkat KLA (Provinsi/Kabupaten/Kota)	1	270		
		Jumlah daerah dengan penurunan angka perkawinan anak (Provinsi)	1	5		
ProP : Perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Terlaksananya perlindungan anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja (%)	1	5,53		MA, Keajugung, Kemenkumham, Kemen PPPA
		Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif (%)	1	100		
KP : Peningkatan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan	Indeks PUG Nasional (nilai)	1	67,95		
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Kelembagaan PUG	Persentase K/L yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK (%)	1	38,1		Kemendagri, Kemen PPPA
		Persentase provinsi yang memperoleh Indeks PUG dengan kategori minimal BAIK (%)	1	61,76		
ProP : Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	Terwujudnya Perlindungan perempuan, termasuk pekerja migran dari kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapat layanan komprehensif (%)	1	40		Kemendagri, Kemen PPPA
KP : Kualitas Pemuda	Terwujudnya kualitas pemuda yang berkarakter dan berdaya saing	Persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dalam tiga bulan terakhir (%)	1	81,97		
ProP : Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	Terwujudnya penguatan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan	Persentase provinsi yang melakukan penyusunan RAD kepemudaan (%)	1	25		Kemendagri
		Persentase tim koordinasi lintas sektor layanan kepemudaan di tingkat pusat dan provinsi yang terbentuk (%)	1	25		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.12 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pencegahan Perilaku Beresiko	Terlindunginya pemuda dari perilaku beresiko	Angka kesakitan pemuda (nilai)	1	7,43		Kemenpora
ProP : Partisipasi Aktif Sosial dan Politik Pemuda	Meningkatnya partisipasi sosial dan politik pemuda	Persentase pemuda berumur 16-30 tahun yang mengikuti kegiatan organisasi dalam tiga bulan terakhir (%)	1	6,86		Kemenpora
PP : Pengentasan Kemiskinan	Memperluas akses aset produktif bagi rumah tangga miskin dan rentan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanaan usaha (%)	1	38		
		Jumlah rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh akses kepemilikan tanah (rumah tangga)	1	1.718.556		
KP : Akselerasi penguatan ekonomi keluarga	Terakselerasinya penguatan ekonomi keluarga miskin	Keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (%)	1	0,11		
ProP : Fasilitasi Modal Usaha	Terfasilitasinya Modal Usaha Bagi Keluarga Miskin dan Rentan	Jumlah keluarga miskin dan rentan yang memperoleh modal usaha ultra mikro (KK)	1	3,328,071		Kemenkeu, Kemensos
KP : Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Terlaksananya pengembangan Keperantaraan Usaha dan Dampak Sosial	Desa yang mengembangkan keperantaraan usaha (desa)	1	11600		
		Pendamping kelompok usaha yang meningkat kapasitasnya (kelompok)	1	8.687.613		
		Pengembangan kewirausahaan sosial (KPM)	1	535		
ProP : Penguatan pemberdayaan berdampak sosial	Menguatnya pemberdayaan berdampak sosial	Jumlah kelompok yang memperoleh layanan kesejahteraan sosial dari dunia usaha (kelompok)	1	150		Kemensos
ProP : Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Terlaksananya Penyuluhan dan/atau Pendampingan bagi kelompok masyarakat lingkungan hidup dan kehutanan	Jumlah KTH Mandiri (unit)	1	100		Kemen LHK
		Jumlah Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat/LP2UKS (pembentukan wanawiyata widyakarya) (unit)	1	160		
		Jumlah penyuluh dan/atau pendamping yang handal (Perhutanan Sosial, RHL, KPH, Gambut, dan Kemitraan Konservasi) (orang)	1	2.000		
KP : Reforma Agraria	Terlaksananya Reforma Agraria	Luas bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi dalam kerangka reforma agraria (ha)	1	1,766,315		
		Jumlah Kepala Keluarga Penerima Akses RA (KK)	1	120.427		
ProP : Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk Pelepasan Kawasan Hutan)	Terlaksananya penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan)	Penataan penguasaan dan pemilikan TORA (termasuk pelepasan kawasan hutan) dalam kerangka reforma agraria (ha)	1	615		Kemen ATR/BPN, Kemen LHK
ProP : Peningkatan Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora	Meningkatnya Kualitas Data Pertanahan dan Legalisasi Atas Tora	Jumlah bidang tanah yang didistribusi dan dilegalisasi (Bidang)	1	409.936		Kemen ATR/BPN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.13 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	Terlaksananya Pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam penggunaan, pemanfaatan, dan produksi atas TORA (KK)	1	120.427		Kemen ATR/BPN
KP : Perhutanan Sosial	Terwujudnya kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat	Luas Distribusi Akses Kelola dan Manfaat Kawasan Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan bagi Masyarakat (Ha)	1	1.000.000		
ProP : Pengelolaan kawasan hutan oleh masyarakat	Terkelolanya kawasan hutan oleh masyarakat	Luas Kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat (Ha)	1	1.000.000		Kemen LHK
PP : Peningkatan Produktivitas Dan Daya Saing	Meningkatnya Produktivitas dan Daya Saing	Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	1	48,40		
		Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	1	65,2		
		Jumlah prototipe dari perguruan tinggi (prototipe)	1	184		
		Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina (produk)	1	150		
		Jumlah inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha (inovasi)	1	20		
		Jumlah permohonan paten yang memenuhi syarat administrasi formalitas KI domestik (paten)	1	2000		
		Jumlah paten granted (domestik) (paten)	1	850		
		Persentase sumber daya manusia Iptek (dosen, peneliti, perekayasa) berkualifikasi S3 (%)	1	16,00		
		Jumlah Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan (PUI)	1	120		
		Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif) (lembaga/unit kerja)	1	60		
		Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan (infrastruktur)	1	4		
		Jumlah Science Techno Park yang ada yang dikembangkan:	1			
		a. Berbasis perguruan tinggi (unit)	1	5		
		b. Berbasis non perguruan tinggi (unit)	1	3		
		Jumlah produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan (produk)	1	0		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.III.14 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:	1			
		a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam (teknologi)	1	15		
		b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana (teknologi)	1	35		
		Proporsi anggaran litbang terhadap PDB (%)	1	0,30		
		Budaya dan Prestasi Olahraga:	1			
		b. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games (medali)	1	2		
		c. Jumlah perolehan medali emas pada Paralympic Games (medali)	1	1		
KP : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerjasama industri	Lulusan pendidikan vokasi bersertifikat kompetensi (orang)	1	1.890.345		
		PT Vokasi berakreditasi A (PT)	1	10		
		Jumlah lulusan pendidikan menengah vokasi (orang)	1	1.913.804		
		Jumlah lulusan pendidikan tinggi vokasi (orang)	1	64.224		
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi (orang) (Pelaksanaan Kartu Pra-Kerja)	1	2.200.000		
		Jumlah pemagangan dalam negeri (orang) (SMK)	1	1.908.367		
		Jumlah pemagangan luar negeri (orang) (SMK)	1	5.437		
ProP : Peningkatan Peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Meningkatnya peran dan Kerjasama Industri dalam Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Jumlah SMK yang melibatkan praktisi profesional industri dalam proses pembelajaran (Sekolah)	1	560		Kemenaker, Kemenperin, Kemendikbud
		Jumlah pengelola lembaga kursus dan pelatihan yang dilatih industri (Orang)	1	200		
ProP : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Terlaksananya reformasi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan vokasi	Jumlah SMK yang mendapatkan fasilitasi pengembangan sarana prasarana (Sekolah)	1	292		Kemendesa PDTT, Kemen PUPR, Kemenperin, Kemenaker, Kemen ESDM, Kemenhub, Kemendikbud, Kemenag, Kemen KP, Kemenparekraf, Kemendag, Kemen LHK
		Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang memperoleh fasilitas berstandar industri (Lembaga)	1	100		
		Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory (%)	1	8		
		Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi (orang)	1	2.200.000		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.15 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Kualitas Pendidik Vokasi	Meningkatnya Kualitas Pendidik Vokasi	Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industri (Orang)	1	5.200		Kemendikbud, Kemeneraker
		Jumlah guru kejuruan yang mengikuti pelatihan Upskilling dan Reskilling berstandar Industri (Orang)	1	2.160		
		Jumlah kepala sekolah yang mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas manajerial berbasis industri (Orang)	1	440		
		Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industri (Orang)	1	400		
		Jumlah SDM Pendidikan Tinggi Vokasi yang mengikuti Peningkatan Kompetensi (orang)	1	300		
ProP : Penguatan Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Menguatnya Tata Kelola Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Jumlah SMK yang memperoleh pembinaan untuk memperoleh status BLUD (Sekolah)	1	65		Kemendagri, Kemeneraker, Kemendikbud
		Penguatan Mutu Pendidikan Tinggi Vokasi Berstandar Industri (PT)	1	120		
ProP : Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	Menguatnya Sistem Sertifikasi Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan sertifikat kompetensi (orang)	1	1.890.345		Kemendikbud, Kemenerperin, Kemen ESDM, Kemeneraker
KP : Penguatan Pendidikan Tinggi Berkualitas	Menguatnya Pendidikan Tinggi Berkualitas	Jumlah publikasi ilmiah di jurnal internasional (publikasi)	1	23.077		
		Jumlah sitasi di jurnal internasional (sitasi)	1	49.178		
ProP : Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	Terwujudnya Perguruan Tinggi sebagai Produsen Iptek Inovasi dan Pusat Keunggulan	Jumlah Kekayaan Intelektual yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi (KI)	1	182		Kemeneristek/BRIN
ProP : Peningkatan Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	Meningkatnya Kualitas dan Pemanfaatan Penelitian	Jumlah Paten yang dihilirkan ke industri/dipakai di masyarakat (paten)	1	10		Kemendikbud, Kemenerag
ProP : Peningkatan Kualitas Lulusan PT	Meningkatnya Kualitas Lulusan PT	Jumlah lulusan yang bekerja dalam jangka waktu 1 tahun (orang)	1	220.000		Kemendikbud
KP : Peningkatan Kapabilitas Iptek dan Penciptaan Inovasi	Meningkatnya Kapabilitas IPTEK dan Penciptaan Inovasi	Jumlah KI yang dimanfaatkan menjadi lisensi (lisensi)	5	100		
ProP : Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Terlaksananya Pemanfaatan Iptek dan penciptaan Inovasi di Bidang-bidang Fokus Rencana Induk Riset Nasional 2017-2045 untuk pembangunan yang berkelanjutan	Jumlah hasil inovasi Flagship PRN (inovasi)	5	0		Kemeneristek/BRIN, LIPI, BATAN, BPPT, LAPAN, Bapeten
ProP : Pengembangan Research Power-House	Terlaksananya Pengembangan Research Power-House	Jumlah SDM Iptek yang ditingkatkan kualifikasinya (orang)	1	970		Kemeneristek/BRIN, LIPI, BATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.16 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penciptaan ekosistem inovasi	Terciptanya ekosistem inovasi	Jumlah STP yang ditingkatkan kualitasnya (STP)	2	8		Kemenristek/BRIN, BATAN, LIPI
KP : Prestasi Olahraga	Meningkatnya prestasi olahraga Indonesia di tingkat internasional	Jumlah olahragawan andalan nasional yang lolos kualifikasi Olimpiade Tokyo 2021 (orang)	1	35		
		Jumlah atlet elite nasional yang lolos kualifikasi Paralimpiade Tokyo 2021 (orang)	1	25		
ProP : Penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	Terlaksananya penguatan dan penataan regulasi keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan yang disusun dan dimanfaatkan dalam rangka penguatan sinergitas dan tata kelola olahraga pendidikan dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah (dokumen)	1	2		Kemenpora
ProP : Pengembangan budaya olahraga	Terlaksananya pengembangan budaya olahraga di masyarakat	Persentase penduduk usia 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir (%)	1	35,4		Kemenpora
ProP : Penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah	Terlaksananya penataan sistem pembinaan olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade dan potensi daerah	Persentase olahragawan Olimpik di PPLP/PPLM yang menjadi olahragawan andalan nasional (%)	1	10		Kemenpora, LPP TVRI
		Persentase olahragawan Olimpik/Paralimpik di SKO yang menjadi olahragawan andalan nasional (%)	1	30		
		Jumlah fasilitasi penyelenggaraan kejuaraan olahraga prestasi tingkat nasional berbasis cabang olahraga Olimpiade dan potensi daerah (event)	1	40		
ProP : Penataan kelembagaan olahraga	Terlaksananya Penataan Kelembagaan Olahraga	Jumlah fasilitasi pembinaan organisasi keolahragaan berbasis Olimpik dalam memenuhi standar minimal organisasi keolahragaan (lembaga)	1	22		Kemenpora
ProP : Peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	Terlaksananya peningkatan ketersediaan tenaga keolahragaan berstandar internasional	Jumlah pengelola organisasi keolahragaan yang difasilitasi dalam pelatihan manajemen dan perencanaan pembinaan dan pengembangan olahraga (orang)	1	600		Kemenpora
		Jumlah tenaga keolahragaan olimpik yang difasilitasi dalam pengembangan tenaga keolahragaan (orang)	1	2.340		
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	Terlaksananya Peningkatan sarana dan prasarana olahraga berstandar internasional	Jumlah prasarana gedung olahraga berbasis cabang olahraga Olimpiade/Paralimpiade ramah difabel yang dibangun, direhabilitasi dan/atau direnovasi (unit)	2	11		Kemen PUPR, Kemenpora
		Jumlah prasarana pendukung PON XX dan Peparnas XVI Tahun 2021 di Papua yang dibangun, direnovasi dan/atau direhabilitasi (unit)	2	3		
		Jumlah fasilitasi sarana olahraga pendidikan, olahraga rekreasi dan olahraga prestasi berbasis cabang olahraga olimpik (lembaga)	2	59		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.III.17 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	Terlaksananya pengembangan peran dunia usaha dalam pendampingan dan pembiayaan keolahragaan	Jumlah naskah kebijakan pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga yang disusun dan dimanfaatkan (dokumen)	1	1		Kemenpora
		Jumlah koordinasi dan kemitraan keolahragaan dengan lembaga lintas sektoral, antar tingkat pemerintah daerah dan luar negeri (dokumen)	1	10		
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendetilan proyek:						
Reformasi perlindungan Sosial						
Reformasi Kesehatan Nasional						
Penguatan Anggaran Pendidikan						
Penyelenggaraan event olahraga						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetilan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstitusi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.1 -

PRIORITAS NASIONAL : REVOLUSI MENTAL DAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan					4.797.580,7	
PP : Revolusi Mental Dan Pembinaan Ideologi Pancasila Untuk Memperkuat Ketahanan Budaya Bangsa Dan Membentuk Mentalitas Bangsa Yang Maju, Modern, Dan Berkarakter	Terwujudnya Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Melayani (nilai)	1	79,06		
		Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersih (nilai)	1	69,97		
		Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Tertib (nilai)	1	79,96		
		Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Mandiri (nilai)	1	53,64		
		Nilai Dimensi Gerakan Indonesia Bersatu (nilai)	1	68,4		
	Meningkatnya peran dan ketahanan keluarga dalam rangka pembentukan karakter	Indeks Kerentanan Keluarga (nilai)	1	11,5		
	Indeks Karakter Remaja (nilai)	1	68,42			
KP : Revolusi mental dalam sistem pendidikan untuk memperkuat nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Menguatnya nilai integritas, etos kerja, gotong royong, dan budi pekerti	Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter (berdasarkan hasil survei karakter pelajar)	1	35		
ProP : Pengembangan budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan (bullying free school environment)	Berkembangnya budaya belajar dan lingkungan sekolah yang menyenangkan dan bebas dari kekerasan	Jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan pembinaan pendidikan karakter (satuan pendidikan)	1	7719		Kemendikbud
ProP : Penguatan pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	Menguatnya pendidikan agama, nilai toleransi beragama, dan budi pekerti dalam sistem pendidikan	Persentase guru pendidikan agama di sekolah keagamaan dan sekolah umum yang dibina dan ditingkatkan kualitasnya	1	100,0		Kemenag
ProP : Peningkatan kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda, serta pengembangan pendidikan kepramukaan	Meningkatnya kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan pemuda dan berkembangnya pendidikan kepramukaan	Jumlah pemuda kader yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kesukarelawanan dan kepramukaan (orang)	1	3500		Kemenpora, Kemendikbud
KP : Revolusi mental dalam tata kelola pemerintahan untuk penguatan budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	Menguatnya budaya birokrasi yang bersih, melayani, dan responsif	Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara cepat dan tidak berbelit-belit (%)	4	Meningkat (Baseline: 76,75 tahun 2019)		
		Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan dengan biaya yang jelas (%)	4	Meningkat (Baseline: 80,32 tahun 2019)		
		Persentase rumah tangga yang menyatakan bahwa pelayanan publik di wilayah tempat tinggalnya telah dilakukan secara tanggap melayani keluhan atau permintaan masyarakat (%)	4	Meningkat (Baseline: 79,63 tahun 2019)		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	Terlaksananya peningkatan budaya kerja pelayanan publik yang ramah, cepat, efektif, efisien, dan terpercaya	Jumlah Intansi yang Melaksanakan Forum Konsultasi Publik (IP) dalam rangka peningkatan kualitas kerja pelayanan publik (instansi)	4	150		Kemen PANRB, LAN, BKPM
ProP : Penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi	Terlaksananya penerapan disiplin, reward dan punishment dalam birokrasi	Jumlah laporan tindaklanjut permasalahan kepegawaian di bidang kode etik, disiplin, pemberhentian dan pensiun PNS (laporan)	4	25		Kemen PANRB, KASN, BKN
KP : Revolusi mental dalam sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Menguatnya sistem sosial untuk memperkuat ketahanan, kualitas dan peran keluarga dan masyarakat dalam pembentukan karakter	Indeks pengasuhan keluarga yang memiliki remaja (indeks)	1	76,22		
		Indeks Kemandirian Ekonomi Keluarga (indeks)	1	33		
ProP : Penyiapan kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Terlaksananya kehidupan berkeluarga dan kecakapan hidup	Persentase keluarga ikut pembinaan Bina Keluarga Remaja (BKR) (%)	1	31,46		BKKBN, Kemenag
ProP : Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	Terlaksananya Peningkatan ketahanan keluarga berdasarkan siklus hidup dengan memperhatikan kesinambungan antargenerasi, sebagai upaya penguatan fungsi dan nilai keluarga	Persentase Keluarga Balita dan Anak yang Ikut BKB (%)	1	50		BKKBN, Kemenag
ProP : Pewujudan lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	Terwujudnya lingkungan yang kondusif melalui penguatan masyarakat, kelembagaan, regulasi, penyediaan sarana dan prasarana, serta partisipasi dunia usaha	Persentase daerah yang Indeks Pembangunan Partisipasi Masyarakatnya (IPPM) (berkategori) Baik (%)	1	8		Kemen PPPA
KP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	Terwujudnya Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental	Jumlah pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental (pusat)	1	20		
ProP : Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Terwujudnya Pemantapan pelaksanaan lima program Gerakan Nasional Revolusi Mental untuk mewujudkan Indonesia Melayani, Indonesia Bersih, Indonesia Tertib, Indonesia Mandiri, dan Indonesia Bersatu	Jumlah Kegiatan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang dilaksanakan oleh Gugus Tugas Gerakan Nasional Revolusi Mental (kegiatan)	1	49		Kemendagri, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK
ProP : Penguatan pusat-pusat perubahan gerakan revolusi mental di daerah	Terlaksananya penguatan pusat-pusat perubahan di tingkat daerah	Jumlah pusat-pusat perubahan di tingkat daerah yang dikuatkan perannya dalam melaksanakan dan menguatkan program GNRM (pusat perubahan)	1	20		Kemenko PMK
KP : Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila	Terwujudnya Pembangunan dan Pembudayaan Sistem Ekonomi Kerakyatan berlandaskan Pancasila	Persentase rumah tangga yang menyatakan adanya peningkatan jumlah usaha baru di wilayah tempat tinggal rumah tangga dalam 6 bulan terakhir	5	Meningkat (Baseline 77,94 tahun 2019)		
ProP : Membangun budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif	Terwujudnya budaya ekonomi nasional dengan platform koperasi dalam kegiatan usaha produktif	Jumlah koperasi yang dinilai kesehatannya	5	50		Kemen KUKM



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.IV.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong	Menguatnya etos kerja dan kewirausahaan berlandaskan semangat gotong royong	Jumlah masyarakat yang terjaring untuk memulai berwirausaha (orang)	5	7000		Kemen KUKM
ProP : Penumbuhan Budaya Konsumen Cerdas dan Cinta Produk Dalam Negeri	Terwujudnya budaya konsumen cerdas dan cinta produk dalam negeri	Jumlah peserta kampanye penggunaan produk DN (orang)	5	1000		Kemendag
KP : Pembinaan Ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme dan patriotisme	Terwujudnya jiwa nasionalisme dan patriotisme pada setiap warga negara	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, wawasan kebangsaan dan bela negara (%)	1	100		
ProP : Pembinaan ideologi Pancasila, penguatan pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	Menguatnya pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, nilai-nilai kebangsaan dan bela negara (%)	1	100		Kemendagri, Kemenhan, Wantanas, Lemhanas, BPIP
ProP : Peningkatkan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Terwujudnya peningkatan peran dan fungsi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP)	Persentase capaian pelaksanaan kegiatan peningkatan peran dan fungsi BPIP (%)	1	100		BPIP
ProP : Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.	Terwujudnya Harmonisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila	Jumlah dokumen analisis dan sinkronisasi hukum nasional terhadap nilai-nilai Pancasila (dokumen)	3	3		BPIP
ProP : Membersihkan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	Terwujudnya Pembersihan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara	Jumlah dokumen evaluasi dan penanganan unsur-unsur yang mengancam ideologi negara (dokumen)	1	3		BPIP
PP : Meningkatkan Pemajuan Dan Pelestarian Kebudayaan Untuk Memperkuat Karakter Dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, Dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Terbangunnya ekosistem kebudayaan untuk mendukung pemajuan kebudayaan	Nilai Dimensi Warisan Budaya (nilai)	1	49,36		
		Nilai Dimensi Ekspresi Budaya (nilai)	1	37,79		
		Nilai Dimensi Ekonomi Budaya (nilai)	1	40,28		
KP : Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Terwujudnya Revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Persentase benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	3,55		
		Persentase warisan budaya takbenda yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	1	12,01		
ProP : Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Terwujudnya Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan nilai budaya, tradisi, sejarah dan kearifan lokal	Jumlah satuan pendidikan yang menyelenggarakan muatan lokal nilai budaya dan objek pemajuan kebudayaan (satuan pendidikan)	1	0		Kemendikbud
ProP : Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas pelayanan museum dan arsip	Persentase lembaga kebudayaan pemerintah memperoleh layanan pembinaan museum dan taman budaya (persentase)	1	50		Kemendikbud, ANRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.4 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa	Terwujudnya Pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan manuskrip dan arsip sebagai sumber nilai budaya, sejarah, dan memori kolektif bangsa)	Persentase peningkatan pelestarian bahan pustaka dan naskah kuno (%)	1	20		Perpusnas, ANRI
KP : Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Persentase penduduk yang pernah terlibat sebagai pelaku/pendukung pertunjukan seni yang menjadikan keterlibatan sebagai sumber penghasilan (terhadap masyarakat 15 tahun ke atas) (%)	1	0,39		
		Persentase masyarakat yang menggunakan produk tradisional (%)		59,81		
ProP : Pengembangan produk seni, budaya, dan film	Terwujudnya Pengembangan produk seni, budaya, dan film	Jumlah Karya Perfilman dan Musik Indonesia (judul)	1	35		Kemendikbud
ProP : Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Terwujudnya Penyelenggaraan festival budaya dan membangun opera berkelas internasional	Jumlah festival skala internasional (Mega Events) dengan pengunjung minimal 50.000 orang dan 15% di antaranya pengunjung internasional yang dilaksanakan (festival)	1	9		Kemendikbud
ProP : Pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Terwujudnya pengelolaan cagar budaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat	Persentase kabupaten/kota yang memiliki Tim Ahli Cagar Budaya dan Tim Ahli Warisan Budaya Takbenda (%)	1	30		Kemendikbud
ProP : Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	Terwujudnya pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	Jumlah komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau-pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif) (komunitas)	1	5		Kemen KP
KP : Pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Terwujudnya pelindungan Hak Kebudayaan dan Ekspresi Budaya untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif	Persentase rumah tangga yang menghadiri atau menyelenggarakan upacara adat (%)	1	22,33		
ProP : Pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	Terwujudnya pengembangan wilayah adat sebagai pusat pelestarian budaya dan lingkungan hidup	Wilayah Adat yang Dikembangkan Menjadi Ruang Interaksi Pemajuan Kebudayaan (wilayah adat)	1	5		Kemendikbud, Kemen ATR/BPN
ProP : Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Terwujudnya pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya	Jumlah Penguatan Lembaga Kepercayaan dan Lembaga Adat (lembaga)	1	30		Kemendikbud
ProP : Pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	Terwujudnya pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta	Persentase database KI Komunal yang terintegrasi pada Aplikasi (%)	1	75		Kemenkumham
KP : Pengembangan Diplomasi Budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Terlaksananya pengembangan diplomasi budaya untuk memperkuat pengaruh Indonesia dalam perkembangan peradaban dunia	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang)	1	500		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.IV.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	Pengembangan diplomasi budaya melalui pengembangan Bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, muhibah seni budaya, dan kuliner nusantara	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang)	1	500		Kemendikbud
ProP : penguatan pusat studi dan rumah budaya Indonesia di luar negeri	Meningkatnya Partisipasi Indonesia dalam Forum Internasional Bidang Kebudayaan	Jumlah SDM dan Lembaga Kebudayaan Yang Diapresiasi (Konferensi Internasional Kebudayaan Indonesia) (orang)	1	500		Kemendikbud
KP : Pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Terwujudnya pengembangan tata kelola pembangunan kebudayaan	Persentase SDM kebudayaan yang ditingkatkan kapasitasnya (%)	1	35		
ProP : Pengelolaan dana perwalian kebudayaan	Terlaksananya pengelolaan dana perwalian kebudayaan	Jumlah layanan pengelolaan dana perwalian kebudayaan (layanan)	1	1		
ProP : Peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	Terwujudnya peningkatan kualitas sumber daya manusia kebudayaan	Jumlah SDM kebudayaan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	1	6056		Kemendikbud
ProP : Peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan	Jumlah Fasilitas pemerintah bidang kebudayaan (kegiatan)	1	80		Kemendikbud
ProP : Pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	Terlaksananya pengembangan sistem pendataan kebudayaan terpadu	Jumlah layanan data dan statistik kebudayaan (layanan)	1	1		Kemendikbud
ProP : Pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	Terlaksananya pengembangan kerja sama dan kemitraan dalam pemajuan kebudayaan	Jumlah layanan umum, kerja sama dan kehumasan bidang kebudayaan (layanan)	1	1		Kemendikbud
PP : Memperkuat Moderasi Beragama Untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan Dan Harmoni Sosial	Memperkuat Moderasi Beragama untuk Mengukuhkan Toleransi, Kerukunan dan Harmoni Sosial	Indeks Kepuasan Layanan Ibadah Haji (nilai)	1	85,96		
		Indeks Kepuasan Layanan KUA (nilai)	1	81		
		Indeks Kepuasan Layanan Produk Halal (nilai)	1	65		
		Tingkat Penerimaan Umat Beragama terhadap Keragaman Budaya (nilai)	1	70		
KP : Penguatan cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Menguatnya cara pandang, sikap, dan praktik beragama dalam perspektif jalan tengah untuk memantapkan persaudaraan dan kebersamaan di kalangan umat beragama	Tingkat moderasi beragama kelompok sasaran penyuluhan agama (%)	1	86,42		
ProP : Pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	Terwujudnya pengembangan penyiaran agama untuk perdamaian dan kemaslahatan umat	Rasio penyuluh agama dengan kelompok sasaran yang mendapatkan bimbingan agama	1	0,05		Kemenag, LPP TVRI
ProP : Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	Menguatnya Penguatan sistem pendidikan yang berperspektif moderat mencakup pengembangan kurikulum, materi dan proses pengajaran, pendidikan guru dan tenaga kependidikan, dan rekrutmen guru	Persentase siswa madrasah/sekolah pendidikan keagamaan yang memperoleh nilai karakter minimal Baik (%)	1	73,75		Kemenag



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.IV.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Menguatnya Penguatan peran pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan ajaran agama untuk kemaslahatan	Persentase peningkatan peserta pendidikan diniyah takmilyah, pendidikan Al-Qur'an dan pesantren dalam mengembangkan moderasi beragama (%)	1	3,5		Kemenag
ProP : Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Terwujudnya Pengelolaan rumah ibadah sebagai pusat syiar agama yang toleran	Persentase rumah ibadah yang ramah (%)	1	100		Kemenag
ProP : Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku bangsa	Terlaksananya Pemanfaatan ruang publik untuk pertukaran ide dan gagasan di kalangan pelajar, mahasiswa, dan pemuda lintas budaya, lintas agama, dan lintas suku	Jumlah Aktor-aktor Kerukunan Umat Beragama (orang)	1	1000		Kemenag, Kemendikbud
KP : Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Terwujudnya Penguatan Harmoni dan Kerukunan Umat Beragama	Persentase konflik antar umat beragama yang diselesaikan (%)	1	100		
ProP : Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	Terwujudnya Pelindungan umat beragama untuk menjamin hak-hak sipil dan beragama	Persentase jumlah kasus pelanggaran hak beragama yang ditindaklanjuti (%)	1	100		Kemenag
ProP : Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Terwujudnya Penguatan peran lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat, ASN, TNI, dan Polri sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa	Persentase lembaga agama, organisasi sosial keagamaan, tokoh agama, tokoh masyarakat yang difasilitasi (%)	1	15		Kemenag
ProP : Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Terwujudnya Penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk membangun solidaritas sosial, toleransi, dan gotong royong	Persentase FKUB yang aktif dalam membina kerukunan umat beragama (%)	1	100		Kemenag, Kemendagri
KP : Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Terwujudnya Penyelarasan Relasi Agama dan Budaya	Persentase kasus konflik budaya dan agama yang diselesaikan (%)	1	75		
ProP : Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Terwujudnya Penghargaan atas ekspresi budaya berbasis nilai-nilai agama	Budaya keagamaan yang dibina dan dikembangkan	1	35		Kemenag
ProP : Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	Terwujudnya Pengembangan literasi khazanah budaya bernafas agama	Persentase literasi khazanah budaya bernafas agama yang dihasilkan dan mudah diakses (%)	1	27,3		Kemenag
ProP : Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Terwujudnya Pelestarian situs keagamaan dan pemanfaatan perayaan keagamaan dan budaya untuk memperkuat toleransi	Persentase event keagamaan dan budaya yang menumbuh kembangkan sikap toleran (hari besar keagamaan) yang difasilitasi (%)	1	100		Kemenag
KP : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Kehidupan Beragama	Persentase layanan keagamaan yang memenuhi standar pelayanan (%)	1	50		
ProP : Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	Terwujudnya Peningkatan Fasilitasi Pelayanan Keagamaan	Persentase pemenuhan fasilitas pelayanan keagamaan (%)	1	80		Kemenag
ProP : Peningkatan pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	Terwujudnya pelayanan bimbingan perkawinan dan keluarga	Persentase keluarga yang menerima layanan dan bimbingan perkawinan (%)		50		Kemenag



**PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA**
- A.IV.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Terwujudnya Penguatan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal	Persentase produk yang teregistrasi dan tersertifikasi halal berdasarkan permohonan (%)	1	60		Kemenag
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Terwujudnya Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Haji dan Umrah	Persentase jemaah haji yang mendapatkan pelayanan haji sesuai standar (%)	1	85,25		Kemenag, Kemenkes
KP : Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Terwujudnya Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya Keagamaan	Persentase penggunaan dana sosial keagamaan untuk mendukung layanan pendidikan dan keagamaan (%)	1	51		
ProP : Pemberdayaan dana sosial keagamaan	Terwujudnya Pemberdayaan dana sosial keagamaan	Persentase partisipasi umat beragama dalam dana sosial keagamaan (%)	1	27,37		Kemenag
ProP : Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	Terwujudnya Pengembangan Kelembagaan Ekonomi Umat	Persentase partisipasi umat Islam dalam pangsa pasar keuangan syariah (%)	1	12		Kemenag
ProP : Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Terwujudnya Pengelolaan Dana Haji secara profesional, transparan, dan akuntabel	Persentase realisasi pelaksanaan dana operasional haji (%)	1	92		Kemenag
PP : Peningkatan Budaya Literasi, Inovasi Dan Kreativitas Bagi Terwujudnya Masyarakat Berpengetahuan, Dan Berkarakter	Meningkatnya akses dan kualitas infrastruktur literasi untuk mewujudkan masyarakat berpengetahuan, inovatif dan kreatif	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (nilai)	1	12		
KP : Peningkatan Budaya Literasi	Terwujudnya Peningkatan Budaya Literasi	Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan dengan penduduk (rasio)	1	1:15		
		Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk (rasio)	1	1:19.000		
		Persentase peningkatan perpustakaan sesuai standar (%)	1	20,45		
ProP : Pengembangan budaya kegemaran membaca	Terwujudnya Pengembangan budaya kegemaran membaca	Jumlah orang yang mengikuti kegiatan pengembangan budaya literasi (orang)	1	32249		Kemendagri, Kemendikbud, Perpunas
ProP : Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	Terwujudnya Pengembangan sistem perbukuan dan penguatan konten literasi	Jumlah SDM Perbukuan yang tersertifikasi (orang)	1	300		Kemendikbud, Perpunas
		Jumlah Lembaga Perbukuan yang terakreditasi (lembaga)	1	20		
ProP : Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	Terwujudnya Peningkatan akses dan kualitas perpustakaan berbasis inklusi sosial	Jumlah perpustakaan berbasis inklusi sosial (perpustakaan)	1	884		Perpunas, Kemensos
KP : Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Terwujudnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, serta sastra	Rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia (nilai)	1	515		
ProP : Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Terwujudnya Peningkatan fungsi Bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia (negara)	1	30		Kemendikbud



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
– A.IV.8 –

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	Terwujudnya Pengembangan pendidikan sastra di satuan pendidikan dan komunitas	Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia (kosakata)	1	130030		Kemendikbud
		Jumlah Tenaga Profesional yang Mahir Berbahasa Indonesia (orang)	1	73050		
ProP : Revitalisasi bahasa dan aksara daerah sebagai khazanah budaya bangsa	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa da sastra daerah kritis dan terancam punah (orang)	1	22249		Kemendikbud
KP : Pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Terwujudnya pengembangan budaya Iptek, inovasi, kreativitas, dan daya cipta	Jumlah produk Riset dan Inovasi yang dihasilkan Siswa pendidikan menengah yang mendapat pendampingan peneliti (produk)	1	20		
ProP : Peningkatan budaya riset dan eksperimentasi ilmiah sejak usia dini	Terwujudnya peningkatan budaya riset dan eksperimentasi ilmiah sejak usia dini	Jumlah partisipan dalam kompetisi Karya Ilmiah Remaja (LKIR) dan National Young Inventor Award (NYIA) (Proposal)	1	4000		LIPI
ProP : Pengembangan budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	Terwujudnya budaya produksi dan kreativitas berbasis inovasi	UMKM yang menerapkan Iptek dalam proses produksinya (UMKM)	1	10		LIPI
KP : Penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Terwujudnya penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi	Persentase intitusi perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan (%)	1	0,35		
ProP : Pengembangan mitra perpustakaan (library supporter)	Terwujudnya Pengembangan mitra perpustakaan (library supporter)	Jumlah perpustakaan yang tergabung dalam jejaring nasional perpustakaan (perpustakaan)	1	500		Perpusnas
ProP : Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	Terwujudnya Pengembangan inovasi sosial yang didukung dari pendanaan filantropi	Jumlah Pojok Baca Digital di Daerah (lokasi)	1	160		Perpusnas

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.1 -

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT INFRASTRUKTUR UNTUK MENDUKUNG PENGEMBANGAN EKONOMI DAN PELAYANAN DASAR

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN : Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar					118.712.378,9	
PP : Infrastruktur Pelayanan Dasar	Meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan dan permukiman layak, aman dan terjangkau	Rasio KPR terhadap PDB (%)	2	3,10		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan kecukupan luas lantai per kapita (%)	2	92,67		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan ketahanan bangunan (atap, lantai, dinding) (%)	2	81,99		
		Persentase rumah tangga yang memiliki sertifikat hak atas tanah untuk perumahan (%)	2	47,62		
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi yang layak dan aman	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak (%)	2	92,81		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air minum aman (%)	2	8,4		
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	2	23,54		
		Persentase rumah tangga dengan akses air minum bukan jaringan perpipaan (%)	2	69,27		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	2	79,43 layak, termasuk 10 aman		
		Persentase rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	2	4,46		
		Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	2	73,70 penanganan dan 5,51 pengurangan		
	Meningkatnya Layanan Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan air bakunya secara berkelanjutan (Kabupaten/kota)	2	173		
	Meningkatnya layanan keselamatan dan keamanan transportasi	Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	2	27		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
	Meningkatnya Optimalisasi Waduk Multiguna dan Modernisasi Irigasi	Volume tampungan air per kapita (Kumulatif, m3/kapita)	2	53,53		
		Persentase luas sawah beririgasi (%)	2	54		
		Luas daerah irigasi premium yang dimodernisasi (ha)	2	398.123		
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau	Tersedianya akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau	Jumlah hunian baru layak huni yang terbangun (unit)	2	223.180		
		Jumlah rumah tangga yang menerima fasilitas pembiayaan perumahan (rumah tangga)	2	85.000		
		Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan (rumah tangga)	2	197.496		
		Jumlah peningkatan kualitas hunian (unit)	2	152.510		
		Jumlah pengurangan luas kawasan permukiman kumuh (ha)	2	5.779		
ProP : Peningkatan Fasilitas Penyediaan Hunian Baru	Terlaksananya peningkatan fasilitas penyediaan hunian baru	Jumlah hunian baru layak yang terbangun melalui fasilitas pemerintah (unit)	2	18.417		Kemen PUPR
		Jumlah penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM)/Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB)/Sertipikat Hak Satuan Rumah Susun (SHRS) (persil)	2	10.000		
ProP : Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Terlaksananya Peningkatan Fasilitas Pembiayaan Perumahan	Jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang menerima bantuan/subsidi pembiayaan perumahan berupa bantuan uang muka dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) (rumah tangga)	2	197.496		Kemen PUPR
		Jumlah rumah tangga yang mendapatkan fasilitas pembiayaan dari lembaga keuangan (rumah tangga)	2	85.000		
ProP : Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Peningkatan Kualitas Rumah	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan peningkatan kualitas (rumah tangga)	2	150.300		Kemensos, Kemen PUPR
ProP : Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Terlaksananya Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Jumlah rumah yang dilayani bantuan PSU pada perumahan, termasuk PSU kawasan skala besar (unit)	2	40.000		Kemen PUPR
ProP : Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	Terlaksananya Fasilitas Peningkatan Standar Keandalan Bangunan dan Keamanan Bermukim (IMB dan SLF)	Jumlah kabupaten/kota yang menerbitkan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) (kabupaten/ kota)	2	49		Kemendagri, Kemen PUPR
ProP : Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	Terlaksananya Fasilitas Penanganan Permukiman Kumuh	Jumlah luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu (ha)	2	5.779		Kemen PUPR



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Tersedianya Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala kota/regional (Sambungan Rumah)	2	62.352		
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD-T skala permukiman (Sambungan Rumah)	2	284.145,26		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani IPLT (Rumah Tangga)	2	1.730.314		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (Rumah Tangga)	2	3383023,197		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (Rumah Tangga)	2	255.938,36		
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (Rumah Tangga)	2	164.717,35		
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan air limbah, termasuk layanan lumpur tinja (Kab/Kota)	2	87		
		Jumlah kabupaten/kota yang memiliki sistem pengelolaan sampah domestik (Kab/Kota)	2	83		
		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (Sambungan Rumah)	2	16.405.116		
		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum Bukan Jaringan Perpipaan (Rumah Tangga)	2	48.274.527		
		Jumlah rumah tangga dengan akses air minum aman (Rumah Tangga)	2	5.853.992		
		Persentase PDAM dengan kinerja sehat (%)	2	75		
		Persentase angka BABS di tempat terbuka (%)	2	4,46		
		ProP : Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Terlaksananya Pengembangan Sistem Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah Pengembangan Kapasitas SPAM Regional (liter/detik)		
Jumlah Pembangunan dan Peningkatan Kapasitas SPAM (liter/detik)	2			3.312		
Jumlah Sambungan Rumah yang mendapatkan Perluasan SPAM (SR)	2			458.756		
Persentase Non Revenue Water (NRW) PDAM (%)	2			30		
Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala kota/regional (kab/kota)	2			28		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.V.4 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan perluasan layanan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) skala permukiman (kab/kota)	2	168		
		Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan baru dan rehabilitasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) (kab/kota)	2	50		
		Jumlah kab/kota yang memiliki pembangunan TPA baru (kab/kota)	2	56		
		Jumlah kab/kota yang memiliki TPS3R (kab/kota)	2	108		
		Jumlah kab/kota yang memiliki TPST (kab/kota)	2	13		
ProP : Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Terlaksananya Pembinaan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Persentase PDAM yang memiliki Business Plan menuju akses 100% aman yang berlaku hingga tahun 2024 (%)	2	25		Kemen PUPR, Kemendagri, Kemenkes
		Persentase PDAM dengan Tarif Full Cost Recovery (%)	2	63		
		Persentase pengelola/operator air minum berkinerja sehat (PDAM,UPTD, KPSPAMS dll) (%)	2	40		
		Jumlah provinsi yang terfasilitasi pendampingan implementasi dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (provinsi)	2	33		
		Jumlah provinsi yang terfasilitasi penguatan kapasitas daerah dalam pengelolaan sampah dan air limbah domestik (provinsi)	2	33		
		Persentase desa/kelurahan dengan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS) (%)	2	55		
ProP : Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Terlaksananya Pengaturan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman	Jumlah provinsi yang terfasilitasi penyiapan pengaturan bidang sanitasi (provinsi)	2	34		Kemen PUPR, Kemendagri
		Jumlah NSPK terkait sanitasi yang tersusun (NSPK)	2	0		
		Jumlah NSPK terkait air minum yang tersusun (NSPK)	2	5		
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki Jakstrada air minum (Kab/Kota)	2	101		
		Jumlah Kab/Kota yang memiliki RISPAM (Kab/Kota)	2	514		
ProP : Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Terlaksananya Pengawasan Kualitas Air Minum dan Sanitasi	Jumlah kabupaten/kota dengan penyelenggara SPAM yang memiliki dokumen Rencana Pengamanan Air Minum (RPAM) (kab/kota)	2	12		Kemen PUPR, Kemenkes, Kemen LHK
		Jumlah kab/kota yang melakukan pengawasan kualitas air minum (kab/kota)	2	34		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Jumlah kab/kota yang memiliki effluent IPAL, IPLT, dan leachate TPA yang memenuhi syarat (kab/kota)	2	33		
KP : Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Terkelolanya Air Tanah dan Air Baku Berkelanjutan	Jumlah debit air baku untuk kebutuhan domestik, industri, dan kawasan unggulan (m3/detik)	2	88,32		
		Persentase kesiapan implementasi pengelolaan SDA terpadu (aspek regulasi, kelembagaan, dan sistem informasi) (%)	2	51,1		
ProP : Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Terlaksananya Penyediaan dan pengamanan air baku dan air tanah	Tambahan debit air baku (m3/detik)	2	4,45		Kemen PUPR
ProP : Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	Terlaksananya Penataan regulasi serta perkuatan kelembagaan SDA	Jumlah peraturan perundangan turunan UU SDA yang ditetapkan (PP) (dokumen)	2	4		Kemendagri, Kemen PUPR, Kemen ESDM
		Jumlah wilayah sungai kewenangan pusat yang memiliki dan/atau memperbaharui kebijakan PSDA terpadu (wilayah sungai)	2	11		
ProP : Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Terlaksananya Pengembangan SISDA Terpadu berbasis teknologi cerdas (smart water management)	Persentase kesiapan pengembangan SISDA terpadu berbasis smart water management.	2	20		Kemen PUPR
KP : Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Terciptanya Keselamatan dan Keamanan Transportasi	Rasio kejadian kecelakaan pelayaran per 10.000 pelayaran (nilai)	2	1,25		
		Rasio kejadian kecelakaan penerbangan per 1 juta penerbangan (nilai)	2	65		
		Rasio kejadian kecelakaan KA per 1 juta km perjalanan KA (nilai)	2	0,25		
ProP : Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	Terlaksananya Pemenuhan fasilitas keselamatan dan keamanan transportasi & SAR	Jumlah peralatan SAR yang disediakan (paket)	2	77		Kemenhub, Basarnas
		Jumlah Pelaksanaan Promosi Keselamatan Jalan Nasional (Provinsi)	2	33		
		Lokasi yang disediakan fasilitas keselamatan jalan (provinsi)	2	33		
		Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang dibangun (provinsi)	2	33		
		Jumlah Pengadaan dan Pemasangan ATCS dan ITS (lokasi)	2	7		
ProP : Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	Terlaksananya Pembinaan dan Pendidikan SDM keselamatan dan keamanan transportasi, pencarian dan pertolongan	Jumlah SDM pencarian dan pertolongan yang berkompeten (orang)	1	5.000		Kemenhub, Basarnas
		Jumlah lulusan Diklat Pemberdayaan Masyarakat Keselamatan Safety and Security SDM Transportasi (orang)	1	45.641		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- A.V.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Terwujudnya Ketahanan Kebencanaan Infrastruktur	Persentase pertambahan jumlah korban bencana banjir (baseline 2019:12,6%) (%)	2	0		
		Persentase pertambahan jumlah korban bencana abrasi/pasang laut (baseline: -96,7%) (%)	2	0		
		Persentase pertambahan jumlah korban bencana lahar gunung api (baseline 2019:-88,8%) (%)	2	0		
ProP : Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	Terlaksananya Pengembangan kebijakan wilayah untuk ketahanan bencana dan penguatan infrastruktur vital tahan bencana	Jumlah wilayah sungai yang menetapkan peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana hidrometeorologi dan hidrogeologi (wilayah sungai)	2	5		Kemendagri, Kemen PUPR
		Jumlah provinsi yang memiliki peta risiko dan rencana induk peningkatan ketahanan wilayah dan infrastruktur vital terhadap bencana tsunami (Provinsi)	2	1		
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Terlaksananya pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur ketahanan bencana	Jumlah wilayah sungai dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pencegahan banjir (wilayah sungai)	2	20		Kemen PUPR
		Jumlah provinsi dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur pengendali bencana lumpur dan sedimen (provinsi)	2	5		
		Jumlah kawasan pesisir dengan pembangunan dan peningkatan infrastruktur ketahanan bencana wilayah pesisir (kawasan pesisir)	2	15		
ProP : Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Terlaksananya Penyediaan sistem terpadu peringatan dini dan tanggap darurat bencana	Jumlah kabupaten/kota dengan pemasangan alat pemantauan penurunan tanah dan kegiatan pemantauan penurunan tanah (kab./kota)	2	6		Kemen ESDM, Kemen PUPR
		Jumlah cekungan air tanah dengan pemantauan penggunaan air tanah (CAT)	2	10		
		Jumlah wilayah sungai dengan pengembangan peringatan dini bencana banjir (Wilayah sungai)	2	1		
		Jumlah lokasi dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana longsor (lokasi)	2	4		
		Jumlah kegiatan tanggap darurat akibat bencana (kegiatan)	2	115		
ProP : Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Terlaksananya Restorasi dan konservasi infrastruktur alami	Jumlah kawasan rawa dengan peningkatan tata kelola air (kawasan)	2	1		Kemen PUPR



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Tebangunnya Waduk Multipurpose dan Modernisasi Irigasi	Jumlah volume tampungan baru untuk memenuhi kebutuhan air (miliar m3) (Kumulatif)	2	15,1		
		Jumlah bendungan yang ditingkatkan fungsinya (unit) (Kumulatif)	2	15		
		Jumlah bendungan dengan peningkatan kinerja dan penurunan indeks risiko (unit)	2	20		
		Jumlah daerah irigasi yang melakukan modernisasi (Daerah Irigasi)	2	2		
		Luas lahan beririgasi untuk komoditas padi dan non padi (ha)	2	86.000		
ProP : Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	Terlaksananya Perencanaan pengembangan bendungan multiguna dan pemanfaatan tampungan alami	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bendungan baru multiguna dan pemanfaatan tampungan alami (dokumen)	2	6		Kemen PUPR
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi bendungan	Jumlah bendungan multiguna yang selesai dibangun (unit)	2	13		Kemen PUPR
ProP : Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Terlaksananya Optimalisasi dan pemanfaatan tampungan	Jumlah bendungan yang dimanfaatkan sesuai fungsi rencananya (unit)	2	15		Kemen PUPR
		Jumlah tampungan alami yang direvitalisasi dan dikembangkan manfaatnya (unit)	2	5		
		Jumlah potensi tenaga listrik dari infrastruktur SDA (MW)	2	36,53		
ProP : Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Terlaksananya Peningkatan OP dan keamanan bendungan	Jumlah bendungan yang indeks risikonya turun (unit)	2	20		Kemen PUPR
ProP : Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Terlaksananya Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi	Luas jaringan irigasi teknis yang dibangun (ha)	2	85.000		Kemen PUPR
		Luas jaringan daerah irigasi teknis yang direhabilitasi (ha)	2	250.000		
ProP : Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Terlaksananya Peningkatan pengelolaan alokasi air dan kapasitas kelembagaan irigasi	Jumlah dokumen peningkatan pengelolaan alokasi air (dokumen)	2	40		Kemen PUPR
		Jumlah kelembagaan irigasi yang ditingkatkan kapasitas kelembagaannya (unit)	2	3		
ProP : Pembangunan sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi	Tebangunnya sistem penyediaan air untuk komoditas pertanian bernilai tinggi	Luas lahan komoditas pertanian bernilai ekonomi tinggi beririgasi (ha)	2	1000		Kemen PUPR



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.8 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Infrastruktur Ekonomi	Meningkatnya konektivitas wilayah	Persentase kondisi mantap jalan nasional (%)	2	93		
		Persentase kondisi mantap jalan provinsi (%)	2	69,5		
		Persentase kondisi mantap jalan kabupaten/kota (%)	2	58,5		
		Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/ atau beroperasi (km)	2	242		
		Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	2	83		
		Panjang jalan baru yang terbangun (km)	2	679		
		Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km'sp)	2	6.293		
		Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	2	2		
		Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	2	26		
		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	2	6		
		Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	2	12 (berlanjut)		
		Jumlah rute jembatan udara (rute)	2	40 (berlanjut)		
KP : Konektivitas Jalan	Terwujudnya konektivitas jalan	Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Dukungan APBN; lokasi)	2	3		
		Panjang jalan pada kawasan prioritas yang dibangun (km)	2	679		
ProP : Pembangunan Jalan Strategis	Terlaksananya Pembangunan Jalan Strategis	Panjang Jalan Lintas Utama Pulau ditangani (km)	2	1.165		Kemen PUPR
		Panjang Jembatan Lintas Utama Pulau ditangani (m)	2	3.341		
ProP : Pembangunan Jalan Tol	Terlaksananya Pembangunan Jalan Tol	Panjang jalan tol yang dibangun (dukungan APBN; km)	2	3		Kemen PUPR
ProP : Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN)	Panjang jalan Mendukung Kawasan Prioritas (KI, KEK, dan KSPN) yang ditangani (km)	2	90,6		Kemen PUPR
ProP : Pembangunan Jalan Akses Sempul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	Terlaksananya Pembangunan Jalan Akses Sempul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal)	Panjang jalan Akses Sempul Transportasi (Pelabuhan, Bandara, Terminal) yang dibangun (km)	2	38,5		Kemen PUPR
ProP : Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	Terlaksananya Preservasi jalan nasional (termasuk peningkatan/pelebaran)	Panjang jalan nasional yang di preservasi (termasuk peningkatan/pelebaran; km)	2	4.927,00		Kemen PUPR
ProP : Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	Terlaksananya Pembangunan dan pemeliharaan jalan daerah	Panjang jalan daerah yang dibangun (km)	2	50,0		Kemen PUPR
		Panjang jembatan daerah yang dibangun dan ditingkatkan kapasitasnya (m)	2	5.992		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.9 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan Wilayah Suramadu	Terlaksananya Pengembangan Wilayah Suramadu	luas lahan Wilayah Suramadu yang dikembangkan (ha)	2	35		BPWS
		Panjang jalan Wilayah Suramadu yang dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (km)	2	13,7		
		Jumlah Prasarana/Sarana Permukiman Wilayah Suramadu dibangun/dipelihara/ ditingkatkan (paket)	2	1		
		Jumlah Kawasan yang di pelihara (Kawasan)	2	1		
KP : Konektivitas Kereta Api	Terwujudnya Konektivitas Kereta Api	Jumlah Jalur Kereta Api yang dibangun (lokasi)	2	7		
ProP : Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	Terlaksananya Pembangunan Jalur Kereta Api Antar Kota	Jumlah Jalur Kereta Api Antar Kota yang dibangun (lokasi)	2	4		Kemenuh
ProP : Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Terlaksananya Peningkatan, Pemeliharaan, Perawatan dan Pengoperasian Jaringan Prasarana Kereta Api	Jumlah Jalur Kereta Api yang ditingkatkan dan dipelihara (lokasi)	2	15		Kemenuh
		Jumlah kegiatan pemeliharaan, perawatan, dan pengoperasian jaringan prasarana kereta api (paket)	2	1		
ProP : Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	Terlaksananya Pembangunan KA Akses Pelabuhan dan Bandara	Jumlah KA akses Pelabuhan dan Bandara yang dibangun (lokasi)	2	3		Kemenuh
ProP : Penyediaan PSO dan Subsidi	Terlaksananya Penyediaan PSO dan Subsidi	Jumlah layanan subsidi perkeretaapian yang tersedia (lintas)	2	9		Kemenuh
KP : Konektivitas Laut	Terwujudnya konektivitas laut	Jumlah lokasi pengembangan/pembangunan pelabuhan pendukung konektivitas laut (lokasi)	2	15		
		Jumlah layanan angkutan tol laut tetap dan teratur (rute)	2	26		
		Jumlah layanan angkutan laut perintis (rute)	2	113		
		Jumlah layanan angkutan ternak (rute)	2	6		
		jumlah sarana transportasi laut yang dibangun (unit)	2	24		
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Pelabuhan laut	Jumlah pelabuhan yang dibangun dan dikembangkan (lokasi)	2	12		Kemenuh
ProP : Pelabuhan Mendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	Terbangunnya Pelabuhan Pendukung Kawasan Pariwisata Prioritas	Jumlah pelabuhan pendukung kawasan pariwisata prioritas (lokasi)	2	3		Kemenuh
ProP : Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Terlaksananya Penyelenggaraan layanan subsidi Tol Laut dan perintis angkutan laut	Jumlah layanan subsidi Tol Laut, perintis angkutan laut, dan angkutan ternak yang tetap dan teratur (rute)	2	145		Kemenuh
ProP : Pengadaan sarana dan prasarana transportasi laut	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasana transportasi laut	Jumlah kapal negara yang dibangun (unit)	2	24		Kemenuh



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.10 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengembangan teknologi informasi pelayaran	Terlaksananya Pengembangan teknologi informasi pelayaran	Jumlah teknologi informasi pelayaran yang dikembangkan (unit)	2	22		Kemenuh
KP : Konektivitas Udara	Terwujudnya konektivitas udara	Penyediaan layanan jembatan udara (paket)	2	1		
		Jumlah bandara pendukung konektivitas udara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		
		Jumlah bandara hub primer yang ditingkatkan kapasitasnya (lokasi)	2	21		
		Penyiapan bandara perairan (waterbased airport) yang dibangun (lokasi)	2	1		
ProP : Jembatan udara	Terlaksananya Penyediaan Subsidi perintis penumpang, Kargo dan BBM	Jumlah subsidi perintis penumpang, kargo dan BBM pendukung jembatan udara (rute)	2	40		Kemenuh
	Terlaksananya Pengembangan Bandar Udara Pendukung Jembatan Udara	Jumlah bandara pendukung jembatan udara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		
ProP : Pembangunan bandara baru	Terlaksananya Pembangunan bandara baru	Jumlah bandara yang dikembangkan (lokasi)	2	10		Kemenuh
ProP : Pengembangan Bandara Hub Primer	Terlaksananya Pengembangan Bandara Hub Primer	Jumlah bandara Hub Primer yang direhabilitasi/ dikembangkan (lokasi)	2	21		Kemenuh
ProP : Pembangunan bandara perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	Terlaksananya Penyusunan Kajian Penyiapan Pembangunan Perairan (waterbased airport) untuk mendukung destinasi pariwisata	Jumlah kajian penyiapan bandara perairan (dokumen)	2	1		Kemenuh
KP : Konektivitas Darat	Terwujudnya Konektivitas Darat	Jumlah pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai yang dibangun dan dikembangkan (lokasi)	2	41		
		Jumlah terminal penumpang dan barang antarnegara dibangun (lokasi)	2	7		
		Jumlah layanan perintis angkutan penyeberangan (lintas)	2	234		
		Jumlah layanan perintis angkutan jalan (lintas)	2	307		
ProP : Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Terlaksananya Pembangunan pelabuhan penyeberangan baru	Jumlah Pelabuhan penyeberangan, danau dan sungai pada jalur logistik yang dibangun (lokasi)	2	30		Kemenuh
ProP : Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	Terlaksananya Pembangunan terminal penumpang dan barang antarnegara	Jumlah terminal antarnegara yang dibangun/ditingkatkan (lokasi)	2	7		Kemenuh
ProP : Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	Terlaksananya Pembangunan kapal penyeberangan perintis baru	Jumlah kapal penyeberangan yang dibangun (unit)	2	6		Kemenuh
ProP : Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	Terlaksananya Penyediaan layanan perintis angkutan darat untuk penumpang dan barang	Jumlah trayek perintis angkutan penyeberangan yang dilayani (lintas)	2	234		Kemenuh
		Jumlah trayek perintis angkutan jalan yang dilayani (lintas)	2	307		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.V.11 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PP : Infrastruktur Perkotaan	Meningkatnya layanan infrastruktur perkotaan	Jumlah kota yang dibangun perlintasan tidak sebidang kereta api/ flyover/ underpass (kota)	2	5		
KP : Transportasi Perkotaan	Terwujudnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota yang dikembangkan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (perkotaan)	2	2		
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Terlaksananya Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 wilayah metropolitan (Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar, Semarang)	Jumlah kota yang dibangun angkutan massal berbasis rel (perkotaan)	2	2		Kemenuh
ProP : Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	Terlaksananya Pembangunan fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi	Jumlah fasilitas alih moda yang terintegrasi dengan pusat kegiatan perekonomian, permukiman dan fasilitas umum pada simpul-simpul transportasi yang terbangun (lokasi)	2	7		Kemenuh
ProP : Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	Terlaksananya Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal di Perkotaan Besar Lainnya	Jumlah Perkotaan yang dikembangkan Sistem Angkutan Umum Massal berbasis rel yang dibangun (perkotaan)	2	1		Kemenuh
ProP : Pembangunan jalan perkotaan	Terlaksananya Pembangunan jalan perkotaan	Panjang jalan perkotaan yang ditangani (km)	2	39		Kemen PUPR
		Panjang jembatan perkotaan yang ditangani (m)	2	10		
		Panjang Fly Over dan Underpass di perkotaan yang dibangun (meter)	2	1.241		
ProP : Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Terlaksananya Penyediaan subsidi angkutan umum massal perkotaan	Jumlah subsidi angkutan umum massal perkotaan (paket)	2	10		Kemenuh
ProP : Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Terlaksananya Pembangunan perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan	Panjang perlintasan tidak sebidang antara jalan dan KA di perkotaan yang dibangun (lokasi)	2	2		
KP : Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Terbangunnya Infrastruktur dan Ekosistem TIK perkotaan	Persentase rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar terhadap total rumah tangga (%) (kumulatif)	2	16,25		
ProP : Pengembangan TIK Perkotaan	Terlaksananya Pengembangan TIK Perkotaan	Jumlah rumah tangga terlayani jaringan internet akses tetap pitalebar (rumah tangga)(kumulatif)	2	11.000.000		Kemenkominfo
		Jumlah Kota/kabupaten pada kawasan pariwisata superprioritas dan kota/kabupaten yang berada di sekitar kawasan IKN yang difasilitasi menyusun masterplan smartcity (kab/kota kumulatif)	2	51		
KP : Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Terlaksananya Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi Layak dan Aman di Perkotaan	Jumlah kawasan perkotaan prioritas dengan penyediaan dan penyelenggaraan akses air minum dan air limbah yang aman dan handal (Kab/Kota)	2	7		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.12 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Terlaksananya Penyediaan dan Penyelenggaraan Air Minum dan Sanitasi yang Handal dan Terintegrasi	Jumlah PDAM dengan layanan Zona Air Minum Prima (ZAMP) (BUMD Air Minum/PDAM)	2	7		Kemen PUPR
		Jumlah PDAM yang menerapkan Smart Grid Water Management (BUMD Air Minum/PDAM)	2	3		
KP : Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Terlaksananya Penyediaan Akses Perumahan dan Permukiman Layak, Aman dan Terjangkau di Perkotaan	Jumlah pengurangan kawasan kumuh di perkotaan (kawasan)	2	0		
ProP : Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Terlaksananya Fasilitasi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Jumlah perumahan permukiman kumuh di perkotaan (kawasan)	2	0		Kemen PUPR
PP : Energi Dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga Listrik yang merata, andal, dan efisien	Nilai Penurunan Emisi CO2 Pembangkit (juta ton)	2	4,92		
		Jumlah Sambungan Rumah Jaringan Gas Kota-Kumulatif (SR)	2	1.470.506		
		Jumlah Kapasitas Kilang Minyak-kumulatif (Barrel per Calendar Day/BPCD)	2	1.151.000		
		Jumlah Produksi Tenaga Listrik (GWh)	2	359.946		
KP : Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	Terlaksananya Keberlanjutan Penyediaan Energi dan Ketenagalistrikan	Nilai Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/ Miliar Rupiah)	2	0,9		
		Prosentase Porsi kapasitas terpasang pembangkit EBT terhadap total pembangkit (%)	2	15		
ProP : Perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	Terlaksananya perbaikan efisiensi dan emisi energi dan ketenagalistrikan	Kapasitas Terpasang EBT Tambahan (MW)	2	743,41		Kemen ESDM
		Persentase Susut jaringan (%)	2	9,01		
KP : Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	Meningkatnya Akses dan Keterjangkauan Energi dan Ketenagalistrikan	System Average Interruption Duration Index (SAIDI) menjadi (jam / pelanggan)	2	10		
		Jumlah penyediaan gas (SBM)	2	185.530		
ProP : Perluasan Jaringan Gas Kota	Terlaksananya Perluasan Jaringan Gas Kota	Jumlah Pembangunan Jaringan Gas Kota-APBN(Sambungan Rumah)	2	120.776		Kemen ESDM
ProP : Perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Terlaksananya perluasan akses dan keterjangkauan energi dan ketenagalistrikan	Jumlah Pelanggan Listrik (Ribu Pelanggan)	2	79.187		Kemen ESDM
		Jumlah Penambahan Penyalur BBM Satu Harga (penyalur)	5	76		
KP : Kecukupan Penyediaan Energi dan Tenaga Listrik	Tersedianya pasokan energi dan tenaga listrik yang cukup	Jumlah cadangan operasional BBM (hari)	2	23		
	Terlaksananya Pembangunan Pipa Gas Bumi	Panjang Ruas Pipa Transmisi dan Distribusi Gas Bumi yang di Fasilitasi-Kumulatif (km)	2	15.800		
ProP : Peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Terlaksananya peningkatan kehandalan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Jumlah Penambahan Kapasitas Pembangkit (MW)	2	6.446		Kemen ESDM
		Jumlah Kebijakan Peningkatan Tata Kelola Ketenagalistrikan (Regulasi/Rekomendasi)	2	3		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.V.13 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pembangunan Kilang Minyak Bumi	Terlaksananya Pembangunan Kilang Minyak Bumi	Jumlah peningkatan Infrastruktur Kilang Minyak Bumi (kumulatif) (ribu BOPD)	2	1151		Kemen ESDM
ProP : Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Terlaksananya Pembangunan Pipa gas Bumi Trans Kalimantan	Jumlah Panjang Ruas Pipa Transmisi Kalimantan (km)	2	0		Kemen ESDM
PP : Transformasi Digital	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi	Persentase rata-rata pertumbuhan sektor TIK (%)	2	8,8		
		Persentase pengguna internet (%)	2	74,2		
		Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam (%)	1	72		
KP : Penuntasan Infrastruktur TIK	Terlaksananya penuntasan infrastruktur TIK	Persentase wilayah berpemukiman yang mendapatkan akses seluler (4G) (persen kumulatif)	2	98,5		
		Persentase kecamatan yang terjangkau infrastruktur jaringan serat optik (Persen kumulatif)	2	37,15		
		Persentase rasio harga layanan fixed broadband terhadap pendapatan per kapita (pada kecepatan up to 30 Mbps) (%)	2	10		
		Persentase rasio harga layanan mobile broadband terhadap pendapatan per kapita (dilihat dari rata-rata kuota 1 GB) (%)	2	0,4		
		Persentase populasi yang terlayani penyiaran radio publik (%)	2	91		
		Persentase jangkauan populasi penyiaran TV digital (%)	2	60		
ProP : Pengembangan infrastruktur pitalebar	Terlaksananya pengembangan infrastruktur pitalebar	Jumlah desa di wilayah 3T yang mendapatkan akses seluler 4G (kumulatif) (desa)	2	4.200		Kemenkominfo
ProP : Pengembangan infrastruktur penyiaran	Terlaksananya pengembangan infrastruktur penyiaran	Jumlah dukungan infrastruktur penyiaran digital (unit)	2	10		Kemenkominfo, LPP RRI, LPP TVRI
ProP : Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	Terlaksananya Pengembangan infrastruktur TIK pemerintahan	Persentase K/L/D yang menggunakan/terhubung jaringan intra pemerintah (JIP/Government Network) (%)	2	15		Kemenkominfo
KP : Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Terwujudnya Pemanfaatan Infrastruktur TIK	Persentase kontribusi sektor TIK terhadap PDB (%)	5	4,5-5,7		
		Persentase K/L/D yang memiliki layanan publik terintegrasi (%)	4	60		
ProP : Pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Terlaksananya pemanfaatan TIK layanan pemerintah	Jumlah aplikasi generik yang dikembangkan secara multi platform (aplikasi)	4	15		Kemenkominfo



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.V.14 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Terlaksananya Pemanfaatan TIK layanan masyarakat dan dunia usaha	Jumlah penambahan unicorn baru (kumulatif)	5	0		Kemenkominfo
KP : Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Tersedianya Fasilitas Pendukung Transformasi Digital	Jumlah Peserta Pelatihan digital Skill (termasuk kawasan prioritas) untuk menuju ekonomi digital (peserta)	1	50.000		
ProP : Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	Terlaksananya Pengelolaan informasi secara aman dan terintegrasi	Jumlah konten internet (media sosial, konten negatif, website) yang bisa ditangani per tahun (kumulatif) (konten)	1	150.000		Kemenkominfo
ProP : Pengembangan literasi dan keahlian TIK	Terlaksananya Pengembangan literasi dan keahlian TIK	Jumlah masyarakat yang mendapatkan literasi di bidang digital (orang)	5	12.448.750		Kemenkominfo
ProP : Pengembangan dan fasilitasi industri TIK	Terlaksananya Pengembangan dan fasilitasi industri TIK	Persentase pencapaian PNBP Biaya Hak Penggunaan (BHP) Frekuensi Radio (%)	5	100		Kemenkominfo
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendetilan proyek:						
Pembangunan Infrastruktur Konektivitas						
Penguatan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK)						
Pemeliharaan dan Perawatan Infrastruktur						
Pengendalian banjir dan daerah lainnya serta penugasan lainnya						
Infrastruktur energi						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetilan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VI.1 -

PRIORITAS NASIONAL : MEMBANGUN LINGKUNGAN HIDUP, MENINGKATKAN KETAHANAN BENCANA, DAN PERUBAHAN IKLIM

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim					10.468.202,9	
PP : Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas air, kualitas air laut, kualitas udara, dan kualitas tutupan lahan serta ekosistem gambut	Indeks Kualitas Air (IKA) (nilai)	5	55,20		
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) (nilai)	5	59,00		
		Indeks Kualitas Udara (IKU) (nilai)	5	84,20		
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem Gambut (IKTL) (nilai)	5	62,50		
KP : Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Menurunnya potensi kejadian pencemaran dan kerusakan SDA dan LH	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	5	1.141		
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang terpantau memenuhi baku mutu lingkungan hidup (perusahaan)	5	2.625		
		Luas area dengan nilai konservasi tinggi yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	5	70		
		Persentase penurunan luas kebakaran hutan dan lahan di provinsi rawan kebakaran hutan dan lahan dari <i>baseline</i> (%)	5	2,0		
		Luas kawasan konservasi (juta ha)	5	27,0		
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	5	24,6		
		Akurasi informasi meteorologi (%)	5	77		
		Akurasi informasi klimatologi (%)	5	76		
ProP : Pemantauan Kualitas Udara, Air, dan Air Laut	Tersedianya data kualitas air, air laut, dan udara	Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas udara ambien secara otomatis (unit)	5 dan 2	25		Kemen LHK, BMKG
		Jumlah penambahan alat pemantauan kualitas air sungai dan danau secara otomatis (unit)	5 dan 2	150		
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas air laut secara manual (provinsi)	5 dan 2	34		
ProP : Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Terlaksananya Pemantauan Kinerja Pengelolaan Lingkungan pada Usaha dan/atau Kegiatan	Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu emisi (badan usaha)	5 dan 3	2.625		Kemen LHK
		Jumlah badan usaha yang terpantau memenuhi baku mutu air limbah (badan usaha)	5 dan 3	2.625		
		Jumlah pelabuhan yang terpantau melaksanakan pengendalian pencemaran pesisir dan laut (pelabuhan)	5 dan 3	25		
		Jumlah badan usaha tambang yang meningkat kinerja pengelolaan lingkungannya (badan usaha)	5 dan 3	85		
		Jumlah badan usaha yang memenuhi persyaratan pemulihan ekosistem gambut (badan usaha)	5 dan 3	350		
		Jumlah lokasi pengawasan terhadap effluent IPAL, IPLT, dan Leachate TPA (Kab/Kota)	5 dan 3	33		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VI.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penyediaan Informasi Cuaca dan Iklim	Tersedianya Informasi Cuaca dan Iklim	Persentase Informasi Meteorologi yang Berkualitas (%)	5 dan 3	87		BMKG
		Persentase Informasi Klimatologi yang berkualitas (%)	5 dan 3	79		
ProP : Pencegahan Kebakaran Lahan dan Hutan	Menurunnya angka kejadian kebakaran lahan dan hutan	Jumlah desa yang dicegah dari kebakaran hutan dan lahan (desa)	5 dan 2	1.200		Kemen LHK
		Jumlah kawasan hidrologi gambut yang memiliki infrastruktur tata air adaptif kekeringan/ neraca air yang semakin membaik dalam suatu KHG (KHG)	5 dan 2	100		
ProP : Peningkatan Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kesadaran dan Kapasitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat terhadap Lingkungan Hidup	Jumlah Lembaga/Komunitas serta Generasi Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (unit)	1 dan 5	730		Kemen LHK
		Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister dan masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah (produk)	1 dan 5	5		
ProP : Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Terlaksananya Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	Luas kawasan konservasi (juta ha)	5	27		Kemen LHK, Kemen KP, LIPI
		Luas kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (ha, kumulatif)	5	12.500.000		
		Jumlah unit perlindungan kehati di luar kawasan konservasi yang dibentuk dalam rangka pencegahan kehilangan kehati dan kerusakan ekosistem (unit)	5	22		
		Luas hutan dengan Indeks Jasa Lingkungan tinggi (juta ha)	5	65		
ProP : Penyediaan Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Tersedianya Data dan Informasi Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi (ha)	5	18.000.000		Kemen LHK, Kemen ESDM, Kemenkeu, Kementan
KP : Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya respons cepat dalam mengurangi intensitas kerusakan SDA dan LH	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	5	67,1		
		Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (%)	5	30		
		Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	5	98,68		
		Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari (%)	5	0,032		
ProP : Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Tertanganinya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah terbangun (unit)	2 dan 5	30		Kemen LHK, Kemen KP
		Jumlah lokasi pengendalian pencemaran pesisir dan laut dari tumpahan minyak dan sumber pencemar lainnya (lokasi)	5	11		
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik	Terkelolanya timbulan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Plastik melalui pengurangan dan penanganan timbulan sampah	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	1 dan 5	16,4		Kemen LHK
		Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	1 dan 5	50,7		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.VI.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengurangan dan Penghapusan Merkuri	Meningkatnya kualitas lingkungan melalui pengurangan dan penghapusan penggunaan merkuri	Persentase penghapusan merkuri dari baseline tahun 2019 sebanyak 50 ton di 180 kab/kota di 30 Provinsi (%)	1 dan 5	10		Kemen LHK
		Jumlah pembangunan fasilitas pengolahan emas tanpa merkuri di PESK yang berizin (unit)	1 dan 5	9		
ProP : Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis dan Limbah B3 Terpadu	Meningkatnya jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dan limbah medis	Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 secara terpadu yang terbangun (unit)	2 dan 5	2		Kemenkes, Kemen LHK, KPBU
		Jumlah fasilitas pengolahan limbah B3 dari sumber fasilitas pelayanan kesehatan (unit)	1 dan 5	7		
KP : Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya upaya pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	5	310.000		
		Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan secara nasional (ton)	5	305.000		
		Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	5	6		
		Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	5	25		
ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Terlaksananya Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	5 dan 2	300.000		Kemen LHK
		Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	5 dan 2	10.000		
ProP : Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Terlaksananya Pemulihan Lahan Bekas Tambang dan Lahan Terkontaminasi Limbah B3	Luas lahan bekas tambang yang dipulihkan dan direklamasi secara nasional (ha)	1 dan 5	7.060		Kemen ESDM, Kemen LHK, Kementan, Kemen KP
		Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan institusi yang terpulihkan (ton)	1 dan 5	270.000		
		Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 dari kegiatan non institusi yang terpulihkan (ton)	1 dan 5	35.000		
ProP : Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Terlaksananya Pemulihan Kerusakan Lingkungan Pesisir dan Laut	Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	1 dan 5	6		Kemen KP, Kemen LHK
ProP : Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Terlaksananya Pemulihan Habitat Spesies Terancam Punah	Jumlah luas kawasan konservasi yang ditangani permasalahannya (juta ha)	5	1,8		Kemen LHK
ProP : Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Terlaksananya Peningkatan Populasi Spesies Tumbuhan dan Satwa Liar Terancam Punah	Jumlah luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (juta ha)	5	29,5		Kemen LHK, LIPI
KP : Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait bidang lingkungan hidup dan kehutanan (%)	5	60		
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	5	387		
		Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	5	1.900.000		
		Jumlah daerah yang memiliki Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (daerah)	5	7		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.VI.4 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Terlaksananya Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup di Pusat dan Daerah	Jumlah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang tervalidasi kelayakannya dan terjamin kualitasnya berbasis Dokumen Daya Dukung Daya tampung (KLHS)	5	30		Kemen LHK
ProP : Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah Usaha dan /atau Kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan dan Peraturan Perundang-Undangan terkait Bidang LHK (lembaga)	5	1500		Kemen LHK, Kemen KP
		Jumlah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Mampu Menerapkan Sistem Izin Lingkungan yang berfokus pada penurunan beban pencemar lingkungan hidup dengan berbasis sistem informasi dalam rangka Mendukung Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik/OSS (provinsi/kab/kota)	3 dan 4	50		
		Jumlah Operasi Pengamanan Kawasan Hutan dan Peredaran Hasil Hutan Illegal (operasi)	5	105		
ProP : Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penguatan Mekanisme Pidana, Perdata, dan Mediasi dalam Proses Penegakan Hukum Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah kasus pidana LHK yang terselesaikan sampai dengan P21/berkas perkara dinyatakan lengkap (perkara)	5	285		MA, Kejaksaan, Kemen LHK
		Jumlah Sengketa Lingkungan Hidup yang diselesaikan melalui pengadilan dan di luar pengadilan (perkara)	5	102		
PP : Peningkatan Ketahanan Bencana Dan Iklim	Berkurangnya potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana dan bahaya iklim, serta meningkatnya kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat dampak bencana (%)	5	0,10		
		Penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim (%)	5	0,59		
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5	4,50		
KP : Penanggulangan Bencana	Meningkatnya sistem dan respon peringatan dini yang didukung oleh upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana serta peningkatan kapasitas dan koordinasi kelembagaan dalam penanggulangan bencana	Rasio investasi PRB terhadap APBN (rasio) Persentase kelengkapan sistem peringatan dini bencana hidrometeorologis dan tektonis (%)	5 5 dan 2	0,47		
ProP : Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Terlaksananya Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	Jumlah layanan data dan informasi bencana yang akurat (layanan)	4	5		Kemen ESDM, BNPB, Kemendesa PDTT
		Jumlah forum konsolidasi data, informasi, dan pengetahuan (kegiatan)	4	15		
		Jumlah Sosialisasi Pengurangan Risiko Bencana (kegiatan)	1	100		
ProP : Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kebencanaan	Jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal Peralatan dan logistik kebencanaan (kab/kota)	4	225		BNPB
		Persentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai (%)	2	70		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.VI.5 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan Sarana Prasarana Kebencanaan	Meningkatnya Kualitas Sarana Prasarana Kebencanaan	Jumlah kab/kota yang memiliki Standar Minimal Peralatan dan logistik kebencanaan (kab/kota)	3	225		BNPB
		Prosentase daerah yang memiliki logistik dan peralatan penanggulangan bencana yang memadai (%)	2	70		
ProP : Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Terlaksananya Integrasi Kerjasama Kebijakan dan Penataan Ruang berbasis Risiko Bencana	Jumlah penyusunan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana (kajian)	2	50		Kemen ESDM
		Jumlah dokumen kajian risiko dan tata ruang di kawasan rawan bencana dan pasca bencana (dokumen)	3 dan 4	55		
ProP : Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Terlaksananya Penguatan Penanganan Darurat Bencana	Rata-rata korban akibat bencana di daerah rawan bencana per 100.000 jiwa (jiwa)	1	0,2		Kemenkes, BNPB, Kemenkeu
		Persentase waktu Respon penanganan darurat kurang dari 24 jam (%)	1	100		
ProP : Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana	Persentase pelayanan publik yang berhasil dipulihkan (%)	2	75		Kemen KUKM, BNPB, Kementan, Kemenkeu
		Kenaikan ketahanan di daerah pascabencana (%)	1	5		
ProP : Penguatan sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Menguatnya sistem mitigasi multi ancaman bencana terpadu	Jumlah sistem mitigasi multi ancaman bencana (MHEWS) terpadu (sistem)	2	1		Kemen ESDM, BMKG, BIG, BNPB, LPP RRI
		Jumlah kelompok masyarakat tangguh bencana (kelompok)	1	200		
		Jumlah daerah pelaksana kegiatan mitigasi multi ancaman bencana (kab/kota)	1	514		
		Kenaikan indeks kesiapsiagaan bencana (indeks)	1	0,0044		
KP : Peningkatan Ketahanan Iklim	Menurunnya potensi dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perubahan iklim pada sektor-sektor prioritas	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (%)	5 dan 2	0,412		
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air (%)	5 dan 2	0,028		
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (%)	5 dan 2	0,107		
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (%)	5 dan 1	0,044		
ProP : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Meningkatnya ketahanan sektor kelautan dan pesisir terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang meningkat ketangguhannya terhadap bencana dan dampak perubahan iklim (kawasan)	5	8		Kemen LHK, Kemen KP, BMKG
		Panjang tanggul laut dan bangunan pengamanan pantai lainnya yang dibangun atau ditingkatkan (km)	2 dan 5	31		
ProP : Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim	Meningkatnya ketahanan sektor air terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Luas hutan dan lahan yang direhabilitasi dalam rangka konservasi sumber daya air (ha)	2 dan 5	56.000		Kemen LHK
ProP : Perlindungan Ketahanan Pangan terhadap Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan sektor pertanian terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah Penyuluh Pertanian dan Petani yang meningkat Pemahaman Iklim melalui Sekolah Lapang Iklim (orang)	1 dan 5	1.275		Kemen LHK, BMKG, Kementan
		Jumlah Teknologi Adaptasi Perubahan Iklim (teknologi)	5	1		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.VI.6 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Perlindungan Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan dari Dampak Perubahan Iklim	Meningkatnya ketahanan sektor kesehatan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim	Jumlah kab/kota yang menyelenggarakan Kabupaten/kota sehat (KKS) (kab/kota)	3	220		Kemenkes
PP : Pembangunan Rendah Karbon	Meningkatnya capaian penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi, lahan, limbah, IPPU, serta pesisir dan kelautan	Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor energi (%)	2 dan 5	14,06		
		Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor lahan (%)	2 dan 5	35,11		
		Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor limbah (%)	2 dan 5	6,89		
		Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor IPPU (%)	2 dan 5	4,18		
		Penurunan emisi GRK terhadap <i>baseline</i> pada sektor pesisir dan kelautan (%)	2 dan 5	5,60		
KP : Pembangunan Energi Berkelanjutan	Meningkatnya keberlanjutan pengelolaan energi	Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (%)	2 dan 5	14,5		
		Intensitas energi primer (SBM/Rp Miliar)	2 dan 5	138		
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/Rp Miliar)	2 dan 5	0,9		
ProP : Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	Meningkatnya pembangunan pembangkit dan penggunaan energi baru terbarukan	Kapasitas tambahan terpasang pembangkit EBT (MW)	2 dan 5	1001,1		PLN, Swasta, Kemen ESDM, Pertamina
		Pemanfaatan biofuel untuk Domestik (juta kilo liter)	2 dan 5	10,2		
ProP : Efisiensi dan Konservasi Energi	Meningkatnya efisiensi dan konservasi energi	Jumlah peralatan yang disusun SKEM-nya (peralatan)	2 dan 5	2		Kemen ESDM
KP : Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Meningkatnya keberlanjutan pemulihan lahan	Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	5	310.000		
		Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	5	434.000		
		Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (%)	5	70		
ProP : Restorasi dan Pemulihan Lahan Gambut	Meningkatnya upaya restorasi dan pemulihan lahan gambut	Luas ekosistem gambut yang terkordinasi dan difasilitasi restorasi gambut pada 7 provinsi rawan kebakaran hutan (ha)	2 dan 5	300.000		Kemen LHK
		Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan di lahan masyarakat (ha)	5 dan 2	10.000		
ProP : Rehabilitasi Hutan Lahan dan Reforestasi	Meningkatnya upaya rehabilitasi hutan lahan dan reforestasi	Luas tutupan hutan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	5	434.000		Kemen LHK
ProP : Pengurangan Laju Deforestasi	Berkurangnya laju deforestasi	Laju Deforestasi (ha/tahun)	5	430.000		Kemen LHK
ProP : Peningkatan Produktivitas dan Efisiensi Pertanian	Terlaksananya Optimasi Lahan pertanian	Jumlah Optimasi Lahan pertanian (ha)	5	100.000		Kementan
KP : Pengelolaan Limbah	Meningkatnya pengelolaan limbah	Jumlah sampah yang dikelola secara nasional (juta ton)	5	67		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.VI.7 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pengelolaan Sampah Rumah Tangga	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga	Jumlah pengurangan timbulan sampah secara nasional (juta ton) Jumlah penanganan timbulan sampah secara nasional (juta ton)	1 dan 5 1 dan 5	16,4 50,7		Kemen LHK
KP : Pengembangan Industri Hijau	Meningkatnya keberlanjutan industri	Perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH) (%)	5	9		
ProP : Penerapan Modifikasi Proses dan Teknologi	Meningkatnya penerapan proses dan teknologi yang lebih hijau	Laporan penanganan masalah limbah B3 melalui standarisasi, circular economy dan pedoman (laporan)	5	2		Kemenperin, Kemen ESDM
KP : Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Meningkatnya pemulihan ekosistem pesisir dan kelautan	Jumlah luas rehabilitasi hutan mangrove (ha)	5	1.650		
ProP : Inventarisasi dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Kelautan	Meningkatnya upaya inventarisasi dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan kelautan	Jumlah lokasi pemulihan kerusakan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil (lokasi)	5	6		Kemen LHK, Kemen KP
Tambahan anggaran yang masih dalam proses untuk pendetilan proyek: Penguatan Ketahanan Bencana						

Keterangan:

Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetilan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.VII.1 -**

PRIORITAS NASIONAL : MEMPERKUAT STABILITAS POLHUKHANKAM DAN TRANSFORMASI PELAYANAN PUBLIK

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
PN: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik					31.329.829,9	
PP : Konsolidasi Demokrasi	Terwujudnya komunikasi publik yang efektif, integratif, dan partisipatif	Jumlah regulasi/ kebijakan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	3		
KP : Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi	Terwujudnya penguatan kapasitas lembaga demokrasi	Skor IDI Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi (nilai)	4	75,35		
ProP : Penguatan Peraturan Perundangan Bidang Politik	Terwujudnya penguatan peraturan perundangan bidang politik	Jumlah penyusunan UU Bidang Politik yang lebih komprehensif (UU)	3	2		Kemendagri
ProP : Peningkatan Bantuan Keuangan Partai Politik	Terlaksananya peningkatan bantuan keuangan partai politik	Jumlah peningkatan bantuan keuangan partai politik (suara sah)	3	126.376.418		Kemendagri
ProP : Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Terlaksananya Penguatan Demokrasi Internal, Transparansi, dan Akuntabilitas Partai Politik	Jumlah peningkatan kualitas demokrasi internal partai politik (orang)	1	50		Kemendagri
ProP : Penguatan Demokrasi di Daerah	Terlaksananya penguatan demokrasi di daerah	Jumlah provinsi yang mendapatkan penguatan demokrasi (provinsi)	3	15		Kemendagri
KP : Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Terlaksananya penguatan kesetaraan dan kebebasan	Skor IDI Variabel Kebebasan (nilai)	3	82,50		
		Skor IDI Variabel Kesetaraan (nilai)	3	77,90		
		Indeks Kerawanan Pemilu (nilai)	3	45		
ProP : Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Terlaksananya pendidikan politik dan pendidikan pemilih	Terbentuknya Rumah Pintar Pemilu dan Pusat Pengawasan Partisipatif di 549 satker (Nasional, 34 Provinsi, dan 514 Kabupaten/Kota) (satker)	1	549		Kemendagri, Kemen PPPA, KPU, Bawaslu
ProP : Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kepemiluan	Terlaksananya pemilu yang akuntabel dan sinergis	Jumlah pelaksanaan pemilu yang akuntabel dan sinergis di daerah (daerah)	1	2.100		KPU
ProP : Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Terlaksananya peningkatan kapasitas Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah pengurus ormas yang memperoleh penguatan ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, dan pendidikan politik (orang)	1	200		Kemendagri



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.VII.2 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik	Meningkatnya kualitas komunikasi publik	Persentase kepuasan masyarakat terhadap informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	1	71		
		Persentase konten informasi publik yang berkualitas (%)	1	83		
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang)	1	62.264		
ProP : Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	Terlaksananya penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah	Tata kelola informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah yang terintegrasi sesuai asas-asas keterbukaan informasi publik (dokumen)	3	3		Kemenkominfo, KIP
ProP : Peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya peningkatan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika	Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (orang)	1	62.264		Kemenkominfo
ProP : Peningkatan literasi TIK masyarakat	Terlaksananya peningkatan literasi TIK masyarakat	Jumlah masyarakat yang mendapat pengenalan TIK (orang)	1	4.400		Kemenkominfo
ProP : Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika	Terlaksananya penelitian strategis bidang komunikasi dan informatika	Jumlah Penelitian Strategis Bidang Komunikasi dan Informatika (kajian)	3,4	1		Kemenkominfo
ProP : Penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	Terlaksananya penguatan peran lembaga pers dan jurnalis	Indeks Kemerdekaan Pers (nilai)	1,5	74,3		Kemenkominfo, Dewan Pers
ProP : Peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Terlaksananya peningkatan kualitas lembaga penyiaran	Jumlah lembaga penyiaran yang berkualitas (lembaga penyiaran)	1,5	57		Kemenkominfo, KPI
PP : Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Meningkatnya Efektivitas Diplomasi dan Pemanfaatan Kerja Sama Internasional	Jumlah Forum yang Dipimpin oleh Indonesia pada Tingkat Regional dan Multilateral (forum)	5	10		
		Indeks Citra Indonesia di Dunia Internasional (nilai)	5	3,85		
		Indeks Kualitas Pelayanan dan Perlindungan WNI/BHI (nilai)	1	87,00		
KP : Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Terwujudnya Penguatan Integritas NKRI dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	Indeks Kemajuan Perundingan Batas Maritim (nilai)	2	49,64		
		Persentase Kasus WNI di Luar Negeri yang diselesaikan (%)	1	74		
ProP : Peningkatan dan Intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	Terlaksananya peningkatan dan intensifikasi efektivitas penyelesaian perbatasan dan percepatan pemetaan batas negara	Persentase kemajuan hukum dan perjanjian internasional di bidang perundingan penegasan batas darat, peningkatan kerja sama perbatasan dan peningkatan kerja sama kelautan yang diselesaikan (%)	2	100		Kemenlu, Kemendagri, BIG



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
- A.VII.3 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penguatan Perlindungan WNI dan BHI di Tingkat Bilateral, Regional, Multilateral	Terlaksananya penguatan perlindungan WNI dan BHI di tingkat bilateral, regional, multilateral	Indeks Pemanfaatan dan Pengembangan Sistem Informasi Pelayanan dan Pelindungan Terpadu bagi WNI di Luar Negeri (nilai)	1	96,42		Kemenlu, Kemenaker, BP2MI
		Indeks Penguatan Sistem Kelembagaan Pelayanan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (nilai)	1	95,38		
		Indeks Diplomasi Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri (nilai)	1	95,48		
KP : Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Jumlah Program/Kegiatan Kerjasama Selatan-Selatan Triangular (program/kegiatan)	5	85		
ProP : Peningkatan Penggunaan Sumber-Sumber dan Mekanisme Pendanaan Baru Kerjasama Pembangunan Internasional	Terlaksananya peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional	Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)	5	110,48		Kemensetneg, Kemenlu, Kemendikbud, Kemen KP, BPOM
ProP : Penciptaan lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Terciptanya lingkungan yang mendukung (enabling environment) peningkatan keterlibatan swasta dalam kerjasama pembangunan internasional	Tingkat Partisipasi Aktor Non Pemerintah dalam Kegiatan Kerja Sama Pembangunan Internasional (%)	5	2,48-2,55		Kemen PPN/Bappenas
KP : Peningkatan Citra Positif di Dunia Internasional	Meningkatnya citra positif di dunia internasional	Persentase Pemberitaan Positif Media Massa Internasional terhadap Kebijakan Hubungan Luar Negeri RI (%)	5	92		
ProP : Penyusunan Kebijakan Diplomasi Publik dan Turunannya	Tersusunnya kebijakan diplomasi publik dan turunannya	Persentase Dukungan Konstituen Internasional terhadap Promosi Aset-Aset Diplomasi Publik Indonesia (%)	5	98		Kemenlu, LPP RRI
KP : Peningkatan Peran Indonesia di tingkat Regional dan Global	Meningkatnya peran Indonesia di tingkat regional dan global	Presentase Prakarsa dan Rekomendasi Indonesia yang diterima dalam Pertemuan Tingkat Tinggi dan Tingkat Menteri Multilateral (%)	5	96		
		Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam pertemuan tingkat tinggi dan tingkat menteri ASEAN (%)	5	96		
		Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindak lanjuti oleh Stakeholder dalam Negeri (%)	5	85		
		Persentase Kesepakatan Kerjasama Bilateral di Kawasan Amerika dan Eropa yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder Dalam Negeri (%)	5	99		



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
- A.VII.4 -**

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Peningkatan inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Meningkatnya inisiatif/posisi Indonesia yang diterima	Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam forum kerja sama multilateral (rekomendasi/prakarsa)	5	250		Kemenlu
		Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan dalam pertemuan ASEAN (rekomendasi/prakarsa)	5	153		
ProP : Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Terlaksananya Optimalisasi Kontribusi Indonesia dalam Jajaran 10 Besar Negara Kontributor MPP PBB	Peringkat jumlah pasukan perdamaian (PKO) yang dikirim Pemerintah Indonesia (peringkat)	5	10		Kemenlu
PP : Penegakan Hukum Nasional	Meningkatnya penegakan dan pelayanan hukum serta akses terhadap keadilan	Indeks Perilaku Anti Korupsi (nilai)	5	4,03		
KP : Penataan Regulasi	Terlaksananya Penataan Regulasi	Persentase judicial review yang dikabulkan MK dan MA (%)	3	11,15 dan 10,05		
ProP : Pembentukan Lembaga Pengelola Regulasi	Terbentuknya Lembaga Pengelola Regulasi	Persentase peraturan perundang-undangan yang diharmonisasi (%)	3	0,1		MA, MK
ProP : Pembaruan Substansi Hukum	Terlaksananya Pembaruan Substansi Hukum	Jumlah pengundangan rancangan undang-undang jangka menengah (UU)	3	1		Komnas Perempuan, Kemenkumham,
KP : Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Terlaksananya Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata	Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek enforcing contracts (peringkat)	5	110		
		Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek resolving insolvency (peringkat)	5	28		
		Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek getting credits (peringkat)	5	28		
		Persentase Pelaku Residivis (peringkat)	5	8,06		
ProP : Penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	Terlaksananya penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha	Persentase eksekusi putusan perdata (%)	5	15		MA, Kemenkumham
ProP : Penerapan pendekatan Keadilan Restoratif	Terlaksananya penerapan pendekatan Keadilan Restoratif	Persentase penelesaian alternatif pemidanaan (%)	1	15		MA, Kemenkumham, Kejaksaan RI
ProP : Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Terwujudnya Dukungan TI di Bidang Hukum dan Peradilan	Jumlah wilayah kerja instansi penegak hukum yang mengimplementasikan SPPT TI (wilayah kerja)	5	212		Kemenko Polhukam, MA, Kemenkumham,Kejaksaan RI, KPK, Polri
ProP : Peningkatan integritas dan pengawasan hakim	Terlaksananya Peningkatan integritas dan pengawasan hakim	Indeks Integritas Hakim (nilai)	1	7,04		KY



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.5 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penguatan Sistem Anti Korupsi	Terwujudnya penguatan sistem anti korupsi	Survey Penilaian Integritas (Nilai)	5	70,00		
ProP : Penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Terlaksananya penguatan implementasi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi	Persentase capaian aksi Stranas PK (%)	5	35,00		Kemenkumham, MA, MK, KPK Kejaksaan RI
ProP : Optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	Terlaksananya optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset	Jumlah Aparat Penegak Hukum yang mengikuti Diklat Pemulihan Aset (orang)	1	160		Kejaksaan RI, KPK
KP : Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Terlaksananya Peningkatan Akses terhadap Keadilan	Indeks Akses Terhadap Keadilan (%)	5	-*)		
ProP : Penguatan layanan keadilan	Terlaksananya Penguatan layanan keadilan	Aspek Bantuan Hukum pada Indeks Akses Terhadap Keadilan (%)	5	-**)		MA, Kemenkumham, Komnas HAM, Komnas Perempuan
ProP : Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	Terlaksananya Pemberdayaan Hukum bagi Masyarakat	Aspek Kemampuan Masyarakat pada Indeks Akses Terhadap Keadilan (%)	5	-***)		Kejaksaan RI, MK
PP : Reformasi Birokrasi Dan Tata Kelola	Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Kementerian) (%)	1	100,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (LPNK) (%)	1	80,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Provinsi) (%)	1	49,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit kategori Baik ke Atas (Kabupaten/Kota) (%)	1	15,00		
		Instansi Pemerintah dengan tingkat kepatuhan pelayanan publik kategori baik (instansi pemerintah)	4	142 per 587		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (Kementerian/Lembaga) (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (Provinsi) (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik ke Atas (Kabupaten/Kota) (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kementerian/Lembaga) (%)	4	92,00		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

– A.VII.6 –

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Provinsi) (%)	4	92,00		
		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kabupaten) (%)	4	80,00		
		Persentase Instansi Pemerintah yang mendapatkan Opini WTP (Kota) (%)	4	92,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (Kementerian/Lembaga) (%)	4	96,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (Provinsi) (%)	4	87,00		
		Persentase Instansi Pemerintah dengan skor B ke atas Atas SAKIP (kabupaten/Kota) (%)	4	55,00		
KP : Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Terwujudnya Penguatan Implementasi Manajemen ASN	Persentase Kementerian dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	100		
		Persentase LPNK dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	80		
		Persentase Provinsi dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	49		
		Persentase Kabupaten/Kota dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (%)	1	15		
ProP : Manajemen Talenta Nasional ASN	Terbangunnya Manajemen Talenta Nasional ASN	Jumlah instansi yang menerapkan manajemen talenta ASN (K/L/Provinsi/Kab/Kota)	1	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		Kemen PANRB, LAN, BKN
ProP : Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Terlaksananya Peningkatan Penerapan Sistem Merit ASN	Jumlah Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori Baik Keatas (IP)	1	108		Kemen PANRB, KASN, LAN, BKN
KP : Transformasi pelayanan publik	Terwujudnya transformasi pelayanan publik	Jumlah instansi pemerintah dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (instansi)	4	142 per 587		
ProP : Pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	Terlaksananya pelayanan publik berbasis elektronik (e-services) yang terintegrasi	Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Pusat (portal pelayanan publik)	4	1 (tahun 2024)		Kemen PANRB
		Tersedianya portal pelayanan publik Pemerintah Daerah (portal pelayanan publik)	4	1 (tahun 2024)		



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- A.VII.7 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Terlaksananya penguatan pengawasan masyarakat atas kinerja pelayanan publik	Jumlah laporan/ pengaduan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik yang diselesaikan (laporan)	4	6300		Kemen PANRB, Ombudsman RI
ProP : Penguatan ekosistem inovasi	Terlaksananya Penguatan ekosistem inovasi	Jumlah unit pelayanan publik (UPP) yang mereplikasi inovasi (UPP)	4	500		Kemen PANRB, LAN
ProP : Penguatan pelayanan terpadu	Terlaksananya Penguatan pelayanan terpadu	Jumlah Mal Pelayanan Publik di Kota Besar/Sedang/KEK (MPP)	4	9		Kemen PANRB
KP : Penataan kelembagaan dan proses bisnis	Tertatanya kelembagaan dan proses bisnis	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Indeks Maturitas SPBE Baik Keatas (%)	4	Tahun 2021 tidak dilakukan penghitungan		
ProP : Penataan kelembagaan	Terlaksananya Penataan kelembagaan	Jumlah instansi yang ditata kelembagaannya (instansi)	4	21		Kemen PANRB
ProP : Penerapan SPBE terintegrasi	Terlaksananya penerapan SPBE terintegrasi	Integrasi portal pelayanan publik dan integrasi portal administrasi pemerintahan (portal)	4	2 (Tahun 2024)		Kemen PANRB, ANRI, LKPP
KP : Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Terwujudnya Reformasi Sistem Akuntabilitas Kinerja	Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Provinsi yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Kabupaten yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	80		
		Persentase Instansi Pemerintah Kota yang mendapatkan Opini WTP (%)	4	92		
		Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP (%)	4	96		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.8 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP (%)	4	87		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor B Ke atas Atas SAKIP (%)	4	55		
ProP : Perluasan implementasi sistem integritas	Terlaksananya perluasan implementasi sistem integritas	Jumlah unit kerja mendapatkan predikat WBK/WBBM di sektor strategis (WBK/WBBM)	4	1.000		Kemen PANRB
ProP : Penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Terlaksananya penguatan pengelolaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja organisasi	Persentase Intansi Pemerintah (K/L/D) dengan Indeks Penerapan Manajemen Risiko (Manajemen Risiko Indeks) Level 3 (%)	4	K/L: 42,53 Prov: 15 Kab/Kota: 10		Kemen PANRB, ANRI, BPKP, LKPP
		Persentase K/L/D yang melakukan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK (%)	4	40		
		Persentase Instansi Pemerintah Pusat (Kementerian/Lembaga) dengan Skor SAKIP B Ke atas (%)	4	96		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Provinsi) dengan Skor SAKIP B Ke atas (%)	4	87		
		Persentase Instansi Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota) dengan Skor SAKIP B Ke atas (%)	4	55		
ProP : Penguatan perencanaan dan penganggaran	Terlaksananya penguatan perencanaan dan penganggaran	Persentase Integrasi Sistem Perencanaan, Penganggaran, Pamantauan, Evaluasi, dan Audit (%)	4	40,0		Kemen PPN/Bappenas
PP : Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Terjaganya Stabilitas Keamanan Nasional	Indeks Kekuatan Militer (nilai)	5	0,25		
		Indeks Terorisme Global (nilai)	5	4,39		
		Persentase orang yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)	5	>55		
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional (nilai)	5	3,20		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.9 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA		
KP : Penguatan Keamanan Dalam Negeri		Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	5	38,14				
		Indeks Risiko Terorisme (Target)	5	54,36				
		Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara (pelanggaran)	5	<300				
		Angka Kejadian Konflik (kejadian)	5	50				
		Angka Korban Pengungsi Internal (orang)	5	≤15.500				
ProP : Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	Terlaksananya Peningkatan Deradikalisasi dan Penanganan Terorisme	Clearance Rate Terorisme (%)	5	75		Polri, BNPT, BIN, Kemensos		
		Jumlah Deradikalisasi terhadap masyarakat terpapar paham radikal terorisme (Orang)	5	125				
		Jumlah Kegiatan Pencegahan Tindak Pidana Terorisme (kegiatan)	5	134				
		Jumlah Instansi yang berpartisipasi aktif dalam Sinergisitas penanggulangan terorisme (institusi)	5	40				
ProP : Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	Terlaksananya Pengamanan Obyek Vital dan Target Rentan	Jumlah Obyek Vital dan Target Rentan yang mendapat Pengamanan (Obvitnas dan Target Rentan)	2	1023		Polri		
ProP : Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Terlaksananya Penguatan Pertahanan dan Keamanan di Perbatasan dan Pulau Terluar	Jumlah Jenis Sarpras Perbatasan yang Dibangun (Jenis)	2	5				Kemenhan, Kemenkumhan, Polri, BNPP
		Jumlah Penduduk perbatasan yang diberdayakan dalam sistem Hankam (orang)	1	180				
		Jumlah Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) yang ditingkatkan Sarana Prasarana Pertahanan dan Keamanannya (PPKT)	2	41				
ProP : Penanganan Konflik Secara Humanis	Tertanganinya Konflik Secara Humanis	Tertunggulangnya Potensi Konflik Sosial di Tingkat Kabupaten (kasus)	1	25		Kemendagri, Kemensos		
		Jumlah Anggota Satuan yang mendapatkan pelatihan penanganan konflik secara humanis (orang)	1	15.338				
ProP : Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Terwujudnya Keselamatan dan Reintegrasi di Wilayah Rawan dan Bencana	Jumlah Kegiatan Penyelamatan di Wilayah Rawan dan Bencana (kegiatan)	1	1		Polri		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.10 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
KP : Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Terwujudnya Penguatan Kemampuan Pertahanan dibarengi Confidence Building Measures (CBM)	Angka Pemenuhan MEF (%)	2	79		
		Persentase Kontribusi Industri Pertahanan (%)	5	≥50		
ProP : Pengadaan Alutsista	Terpenuhinya Pengadaan Alutsista	Jenis Alutsista yang diadakan (jenis)	2	60		Kemenhan
ProP : Pemeliharaan dan perawatan alutsista	Terlaksananya Pemeliharaan dan perawatan alutsista	Jenis Alutsista dengan Persentase Pemenuhan Norma Harwat 100% (jenis)	2	49		Kemenhan
ProP : Pembangunan sarana-prasarana pertahanan	Terlaksananya pembangunan sarana-prasarana pertahanan	Luas pembangunan Sarana Prasarana Pertahanan (M2)	2	118.000		Kemenhan
ProP : Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme dan Kesejahteraan Prajurit	Jumlah unit Rumah Dinas yang terbangun (unit)	2	2.410		Kemenhan
		Jumlah Rumah Sakit meningkat Akreditasinya (unit)	1	9		
ProP : Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Industri Pertahanan	Jumlah jenis Alpalhankam yang dikembangkan (jenis)	5	3		Kemenhan
KP : Penguatan Keamanan Laut	Terwujudnya Penguatan Keamanan Laut	Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan Keamanan di Laut (kasus)	5	265		
ProP : Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	Terlaksananya Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	Persentase Cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing (%)	5	45		Kemenhan, Kemen KP, Bakamla, Polri
ProP : Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	Terlaksananya Peningkatan Penyelesaian Kasus Keamanan Laut	Clearance Rate Tindak Pidana Laut (%)	5	75		Polri
KP : Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Terwujudnya Penguatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Angka Prevalensi Penyalahguna Narkotika (%)	1	1,86		
		Crime Rate (orang/100.000 penduduk)	5	112		
		Pelayanan Publik Polri yang Prima (%)	4	63		
ProP : Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Terlaksananya Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika	Clearance Rate Tindak Pidana Narkotika (%)	4	86		BNN, Polri
		Jumlah Kawasan yang Pulih dari Tanaman Terlarang (kawasan)	5	3		
ProP : Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Terlaksananya Peningkatan Pencegahan Penyalahgunaan dan Rehabilitasi Penyalahguna Narkotika	Indeks Ketahanan Diri Remaja (nilai)	1	51		BNN, Kemenpora, Kemensos
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Fisik (%)	1	6,5		
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Psikologis (%)	1	6,5		



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.11 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika: Aspek Hubungan Sosial (%)	1	5,5		
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu/Penyalahguna/Korban Penyalahgunaan Narkotika:Aspek Sumber Daya Lingkungan (%)	1	4,5		
		Indeks Kepuasan Layanan Rehabilitasi (nilai)	1	3,1		
ProP : Penanganan Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Tertanganinya Kasus TPPO, serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan Lainnya	Clearance Rate Tindak Pidana TPPO serta Kejahatan terhadap Perempuan, Anak, dan Kelompok Rentan (%)	4	83		Polri
ProP : Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	Terlaksananya Peningkatan Layanan Kepolisian yang Profesional, Modern, dan Terpercaya	Indeks Kepuasan Layanan Kepolisian (nilai)	4	8,2		Polri
		Clearance Rate (%)	4	64		
		Clearance Rate Tindak Pidana Kejahatan Perbankan dan TPPU (%)	4	58		
ProP : Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	Terlaksananya Pengadaan Almatsus dan Alpalkam Dukungan Layanan Kepolisian	Jumlah Almatsus dan Alpalkam Kepolisian (paket)	2	3		Polri
		Persentase Almatsus dan Alpalkam Kontribusi Industri Pertahanan (%)	2	25		
ProP : Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme, dan Kesejahteraan Anggota POLRI	Jumlah Unit Pemenuhan Rumah Negara (unit)	2	445		Polri
		Jumlah Rumah Sakit yang Dibangun/Meningkat Akreditasinya (unit)	2	1		
		Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat (%)	4	77		
KP : Penguatan Ketahanan dan Keamanan Siber	Terwujudnya Ketahanan dan Keamanan Siber yang Kuat	Skor Global Cyber Security Index (nilai)	1, 2	0,792		
ProP: Pembangunan dan Penguatan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber	Terlaksananya Pembangunan Tim Cepat Tanggap Keamanan Siber yang Kuat	Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	1	0,159		BSSN, BIN
ProP: Penguatan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber	Terlaksananya Pembangunan Infrastruktur, SDM, dan Regulasi Keamanan Siber yang Kuat	Skor Pilar Organizational pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	4	0,13		BSSN, BIN, Polri, Kejaksaan RI
		Skor Pilar Technical pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	2	0,159		
		Skor Pilar Capacity Building pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	1	0,189		
ProP: Penyelesaian Kejahatan Siber	Terlaksananya Penyelesaian Kejahatan Bidang Siber	Clearance Rate Tindak Pidana Siber (%)	5	0,62		Kejaksaan RI, Polri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- A.VII.12 -

PROGRAM PRIORITAS (PP)/ KEGIATAN PRIORITAS (KP)/ PROYEK PRIORITAS (ProP)	SASARAN	INDIKATOR	DUKUNGAN TERHADAP ARAHAN PRESIDEN	TARGET	ALOKASI (RP. JUTA)	INSTANSI PELAKSANA
ProP : Pencegahan Kejahatan Siber dan Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Terwujudnya Pencegahan Kejahatan Siber Melalui Peningkatan Kerjasama Internasional Bidang Siber	Skor Pilar Cooperation pada Global Cybersecurity Index (GCI) (nilai)	1, 5	0,12		BIN

Keterangan:

a. Dukungan terhadap arahan Presiden meliputi

- 1) Pembangunan SDM
- 2) Pembangunan Infrastruktur
- 3) Penyederhanaan Regulasi
- 4) Penyederhanaan Birokrasi
- 5) Transformasi Ekonomi

b. Penjelasan target pada KP Peningkatan Akses terhadap Keadilan

- *) Penghitungan dilakukan per tiga tahun, baseline 2019 sebesar 69,6 %
- **) Penghitungan dilakukan per tiga tahun, baseline 2019 sebesar 61,2 %
- ***) Penghitungan dilakukan per tiga tahun, baseline 2019 sebesar 78,3%

Catatan:

- 1) Sesuai dengan pendekatan THIS, sebuah proyek dapat mendukung lebih dari 1 (satu) Prioritas Nasional;
- 2) Beberapa Proyek Prioritas (ProP) dan Proyek KL masih dalam proses pendalaman dan pendetailan distribusi alokasi serta lokasi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- 3) Rincian pada masing-masing prioritas nasional merupakan hasil *Trilateral Meeting*;
- 4) Alokasi Pada Prioritas Nasional mencakup Belanja K/L dan KPBU-AP. Pemutakhiran angka, identifikasi dan integrasi antarinstansi, dan sumber pendanaan (KL, DAK, BUMN, Swasta) akan dilakukan pada Perpres RKP dan APBN.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

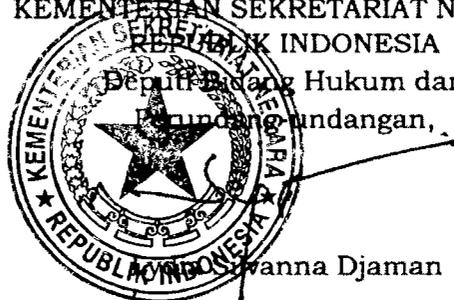
JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Wanna Djaman

SK No 017668 C